



**BUPATI PACITAN  
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN BUPATI PACITAN  
NOMOR 9 TAHUN 2016**

**TENTANG**

**RENCANA INDUK PENGEMBANGAN E-GOVERNMENT PEMERINTAH  
KABUPATEN PACITAN**

**BUPATI PACITAN,**

- Menimbang** :
- a. bahwa guna meningkatkan efisiensi, efektifitas, transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam rangka mewujudkan *good governance* perlu dilakukan pengembangan *e-government*;
  - b. bahwa dalam rangka mendorong perkembangan *e-government* Pemerintah Kabupaten Pacitan yang terarah, perlu disusun dokumen Rencana Induk Pengembangan *e-government*;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Induk Pengembangan *e-government* Pemerintah Kabupaten Pacitan.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
  2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
  4. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2001 tentang Pengembangan dan Pendetayagunaan Telematika di Indonesia;
  5. Keputusan Menteri Komunikasi dan Informasi Nomor : 69A/PER/MEN.KOMINFO/10/2004 tentang Panduan Teknis Pembangunan Infrastruktur Jaringan Sistem Informasi Pemerintahan
  6. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor : 41/PER/MEN.KOMINFO/11/2007 tentang Panduan Umum Tata Kelola Teknologi Informasi dan Komunikasi Nasional;

7. Peraturan Bupati Pacitan Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pendayagunaan Teknologi Informasi dan Komunikasi dalam Penyelenggaraan Pemerintahan di Kabupaten Pacitan.

### **MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA INDUK PENGEMBANGAN E-GOVERNMENT PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN.**

## **BAB I KETENTUAN UMUM**

### **Pasal 1**

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan :

- a. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pacitan yang terdiri dari Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah.
- b. Kepala Daerah adalah Bupati Pacitan.
- c. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintah oleh pemerintah daerah dan DPRD.
- d. Perangkat Daerah adalah lembaga yang membantu kepala daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.
- e. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Perangkat Daerah pada Pemerintah Kabupaten Pacitan.
- f. Bagian Pengolahan Data Elektronik Sekretariat Daerah Kabupaten Pacitan yang selanjutnya disebut Bagian PDE.
- g. Kecamatan adalah wilayah kerja camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Pacitan.
- h. Rencana Induk adalah sebuah perencanaan secara menyeluruh yang menitikberatkan uraian kebijakan sebuah organisasi, memiliki tujuan jangka panjang dan mempunyai ruang lingkup yang sangat luas.
- i. *Assessment* adalah proses sistematis dalam mengumpulkan data yang berfungsi untuk mengetahui kelemahan dan kekuatan saat itu, sebagai bahan untuk menentukan apa yang sesungguhnya dibutuhkan. Berdasarkan informasi tersebut akan dapat disusun program yang bersifat realitas sesuai dengan kenyataan objektif.
- j. Infrastruktur adalah perangkat keras, piranti lunak dan peralatan telekomunikasi, yang ketika digunakan bersama, menjadi pondasi dasar untuk mendukung pelaksanaan e-government.
- k. *Hardware* (perangkat keras) adalah salah satu komponen dari sebuah komputer yang sifat alatnya bisa dilihat dan diraba secara langsung atau yang berbentuk nyata, yang berfungsi untuk mendukung proses komputerisasi.
- l. *Software* (Perangkat Lunak) adalah kumpulan data elektronik yang disimpan dan diatur oleh komputer, data elektronik yang disimpan komputer bisa berupa program yang berguna untuk menjalankan suatu perintah.

- m. Data Center adalah suatu fasilitas yang digunakan untuk menempatkan sistem komputer beserta komponen-komponen terkaitnya, sistem ini meliputi sistem komunikasi dan penyimpanan data.
- n. Jaringan (*network*) adalah sebuah sistem operasi yang terdiri atas sejumlah komputer dan perangkat jaringan lainnya yang bekerja bersama-sama untuk mencapai suatu tujuan yang sama atau suatu jaringan kerja yang terdiri dari titik-titik (*nodes*) yang terhubung satu sama lain, dengan atau tanpa kabel.
- o. Interoperabilitas adalah kemampuan sebuah sistem atau produk untuk bekerja sama dengan sistem atau produk lain.
- p. Internet (*Interconnection Networking*) adalah suatu jaringan komputer yang saling terhubung antar komputer yang satu dengan komputer yang lainnya menggunakan standar sistem global Transmission Control Protocol/Internet Protocol Suite (TCP/IP) sebagai protokol pertukaran. Sehingga saling dapat berinteraksi, berkomunikasi, dan saling bertukar informasi.
- q. Intranet adalah satu jaringan khusus (*Private Network*) dengan system yang sama dengan internet tetapi tidak terhubung dengan internet untuk berbagi informasi penting dalam lingkup lokal. Intranet juga merupakan suatu jaringan LAN (*Local Area Network*) yang hanya mencakup wilayah lokal/kecil.
- r. Upgrade adalah suatu proses memperbaharui sesuatu, menambahkan fasilitas dan kemampuan yang baru; pemutakhiran dari suatu alat perangkat.
- s. Server adalah komputer sentral yang menangani kumpulan data (database) dan memberikan layanan berupa koneksi ataupun layanan yang lain terhadap komputer klient. Cara kerja server yaitu sebagai media penyimpanan data dari komputer klient.
- t. Fiber Optik adalah saluran transmisi atau sejenis kabel yang terbuat dari kaca atau plastik yang sangat halus dan lebih kecil dari sehelai rambut, dan dapat digunakan untuk mentransmisikan sinyal cahaya dari suatu tempat ke tempat lain.
- u. *Core Layer* (lapisan inti) merupakan tulang punggung jaringan pada suatu jaringan hirarki, layer core menempati layer teratas.
- v. *Distribution Layer* (lapisan distribusi) atau disebut '*layer workgroup*' merupakan titik komunikasi antara layer akses dan layer inti.
- w. *Access Layer* (lapisan akses) diperlukan untuk menyediakan fasilitas akses ke jaringan. Fungsi utamanya adalah menjadi sarana bagi suatu titik yang ingin berhubungan dengan jaringan luar.
- x. *Email (Electronic Mail)* adalah surat elektronik yang digunakan untuk atau sebagai media untuk berkomunikasi atau saling berkirim pesan melalui jaringan internet.
- y. Nama Domain adalah alamat internet dari seseorang, perkumpulan, organisasi, badan usaha atau instansi pemerintah yang dapat digunakan untuk berkomunikasi melalui internet yang berupa kode atau susunan karakter yang bersifat unik.
- z. Aplikasi adalah komponen sistem informasi yang digunakan untuk menjalankan fungsi, proses dan mekanisme kerja yang mendukung pelaksanaan *e-government*.

## **BAB II PERENCANAAN**

### **Pasal 2**

Perencanaan untuk penyusunan Rencana Induk Pengembangan *e-government* Pemerintah Kabupaten Pacitan dilaksanakan oleh Bagian Pengolah Data Elektronik Sekretariat Daerah Kabupaten Pacitan.

### **Pasal 3**

Rencana Induk Pengembangan *e-government* Pemerintah Kabupaten Pacitan dilaksanakan selama 5 (lima) tahun dari tahun 2016 sampai dengan Tahun 2020.

## **BAB III PENGEMBANGAN E-GOVERNMENT**

### **Pasal 4**

- (1) Pengembangan *e-government* di setiap SKPD harus mengacu dan selaras dengan Rencana Induk Pengembangan *e-government* Pemerintah Kabupaten Pacitan dan ketentuan Peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pengembangan *e-government* yang dilakukan oleh masing-masing SKPD sesuai dengan kebutuhan, tugas pokok dan fungsinya, dikoordinasikan dengan Bagian PDE dan SKPD lain yang terkait dengan tetap mengacu kepada ketentuan dalam Peraturan Bupati ini.
- (3) Sumber pembiayaan dalam pengembangan dan pelaksanaan *e-government* dibiayai dari APBD Kabupaten Pacitan.

## **BAB IV PEMELIHARAAN**

### **Pasal 5**

Secara berkala Bagian Pengolah Data Elektronik Sekretariat Daerah Kabupaten Pacitan melakukan pemeliharaan peralatan.

### **Pasal 6**

Pemeliharaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 adalah pemeliharaan peralatan (*hardware*), perangkat lunak (*software*) dan virus/spam.

### **Pasal 7**

Pemeliharaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 dibiayai secara rutin setiap Tahun melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Pacitan.

**BAB V  
DOKUMEN**

**Pasal 8**

Dokumen Rencana Induk Pengembangan *e-government* Kabupaten Pacitan adalah sebagaimana tersebut dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

**BAB VI  
KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 9**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pacitan.

Ditetapkan di Pacitan

Pada tanggal : 5 - 4 - 2016

**BUPATI PACITAN**



**INDARTATO**

**LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI PACITAN  
NOMOR : 9 TAHUN 2016  
TANGGAL : 5 - 4 - 2016**

**BAB I  
PENDAHULUAN**

**1.1 Latar Belakang**

Kemajuan teknologi komunikasi dan informasi yang pesat serta potensi pemanfaatannya secara luas, membuka peluang bagi pengaksesan, pengelolaan dan pendayagunaan informasi dalam volume yang besar secara cepat dan akurat. Pemanfaatan teknologi komunikasi dan informasi dalam proses pemerintahan (e-government) akan meningkatkan efisiensi, efektifitas, transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan.

Untuk menyelenggarakan pemerintahan yang baik (good governance) dan meningkatkan layanan publik yang efektif dan efisien diperlukan adanya kebijakan dan strategi pengembangan e-government. Dalam pelaksanaannya diperlukan kesamaan pemahaman, keserempakan tindak dan keterpaduan langkah dari seluruh unsur kelembagaan pemerintah.

Pengembangan informasi, komunikasi dan teknologi telah mernbah mekanisme pelayanan publik dan komersial diseluruh dunia. Penggunaan teknologi informasi tanpa dipungkiri telah berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi, meningkatkan kualitas dan transparansi pelayanan publik, meningkatkan daya saing dan kesejahteraan rakyat.

Menyadari akan pentingnya peranan sistem informasi dalam penyelenggaraan pemerintahan, dan didorong dengan teknologi informasi dalam era milenium ini, identifikasi dan evaluasi terhadap penerapan teknologi informasi sangat diperlukan untuk keperluan perencanaan kedepannya. Dengan dilakukannya indentifikasi, akan diketahui kondisi implementasi e-government di Kabupaten Pacitan.

Berdasarkan latar belakang tersebut maka bidang PDE Kabupaten Pacitan melaksanakan kegiatan penyusunan Masterplan Teknologi Informasi Pemerintah Kabupaten Pacitan.

## 1.2 E-Government

*E-Government* merupakan kependekan dari *Electronic Government*. *E-Government* biasa dikenal e-gov, adalah penyelenggaraan pemerintahan yang berbasis elektronik. Dalam Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2003 Tentang Kebijakan Dan Strategi Nasional dinyatakan bahwa Pengembangan *E-Government* merupakan upaya untuk mengembangkan penyelenggaraan pemerintahan yang berbasis elektronik dengan mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi.

*E-Government* merupakan sebuah implementasi manajemen dan teknologi informasi untuk membantu proses penyelenggaraan pemerintahan, mencakup manajemen internal setiap satuan kerja, pengambilan kebijakan, hingga pengelolaan saluran aspirasi masyarakat. Pelaksanaan *E-Government* melibatkan seluruh aparat penyelenggara pemerintahan, pengambil kebijakan, bisnis/industri, dan masyarakat. Pengembangan *E-Government* diarahkan pada pembentukan kekuatan ekonomi daerah berbasis informasi, yaitu :

- Pengembangan koneksi masyarakat ke Pemerintah,
- Pengembangan infrastruktur akses masyarakat baik kuantitas maupun penyebarannya,
- Pengembangan sumber daya manusia untuk melahirkan tenaga ahli dalam pengembangan infrastruktur dan kreasi content/layanan.
- Pengembangan content dan/atau aplikasi : pengembangan content yang relevan dengan kebutuhan dan kondisi lokal.

Penerapan *E-Government* sangat bermanfaat dan berdampak bagi masyarakat, pegawai, industri dan pemerintah antara lain :

- Meningkatkan transparansi, kontrol, dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka penerapan konsep *Good Corporate Governance*.
- Mengurangi secara signifikan total biaya administrasi, relasi, dan interaksi yang dikeluarkan pemerintah maupun stakeholdernya untuk keperluan aktivitas sehari-hari
- Memberikan peluang bagi pemerintah untuk mendapatkan sumber-sumber pendapatan baru melalui interaksinya dengan pihak-pihak yang berkepentingan.

- Menciptakan suatu lingkungan masyarakat baru yang dapat secara cepat dan tepat menjawab berbagai permasalahan yang dihadapi sejalan dengan berbagai perubahan global dan trend yang ada.
- Memberdayakan masyarakat dan pihak-pihak lain sebagai mitra pemerintah dalam proses pengambilan berbagai kebijakan publik secara merata dan demokratis.
- Menciptakan masyarakat berbasis komunitas informasi yang lebih berkualitas

### **1.3 Pemeringkatan e-Government Indonesia (PeGI)**

Pemeringkatan e-Government Indonesia (PeGI) merupakan salah satu kegiatan evaluasi dan pemetaan pengembangan dan pemanfaatan TIK di lingkungan pemerintah, baik propinsi, kabupaten/kota maupun departemen dan lembaga non departemen. PeGI diselenggarakan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika RI Cq. Direktorat e-Government.

Kegiatan PeGI bertujuan menyediakan acuan bagi pengembangan dan pemanfaatan TIK di lingkungan pemerintah, memberikan dorongan bagi peningkatan pemanfaatan TIK di lingkungan pemerintah melalui evaluasi yang obyektif, dan mendapatkan peta kondisi pemanfaatan TIK di lingkungan pemerintah secara nasional. Adapun penilaian PeGI meliputi dimensi kebijakan, kelembagaan, infrastruktur, aplikasi, dan perencanaan TIK.

### **1.4 Rumusan Masalah**

Dengan melihat pentingnya teknologi informasi dalam mendukung otonomi daerah yang telah digulirkan, maka Pemerintah Kabupaten Pacitan harus mengembangkan E-Government dengan memanfaatkan teknologi informasi terkini. Untuk pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi yang baik harus melihat semua unsur terkait dari semua sisi yaitu sisi kekuatan, kelemahan, tantangan dan ancamannya yang berarti harus melakukan evaluasi diri. Dari sini selanjutnya bisa disusun Rencana Induk Pengembangan yang menjadi panduan untuk pengembangan E-Government yang handal, terintegrasi, efisien dan efektif.

Untuk melakukan itu semua secara jelas dan nyata maka harus dilakukan survei pada setiap satuan kerja sehingga bisa disusun analisis SWOT (strengths, weaknesses, opportunities, threats) atau KEKEPAN (Kekuatan Kelemahan Kesempatan dan Ancaman) sebagai acuan untuk penyusunan Rencana Induk Pengembangan tersebut yang meliputi aspek SDM, infrastruktur teknis, sistem informasi serta organisasi.

### **1.5 Maksud dan Tujuan Pekerjaan**

Maksud dari penyusunan Masterplan E-Government Kabupaten Pacitan ini adalah tersedianya arahan/panduan standar pengembangan dan pentahapan bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten Pacitan dalam menyusun rencana pengembangan perangkat infrastruktur dan aplikasi e-Government di satuan kerjanya.

Sedangkan tujuan dari penyusunan Masterplan e-Government Kabupaten Pacitan ini adalah:

1. Tersedianya arahan untuk pengembangan komponen-komponen e-Government yang terencana, terpadu, efektif dan efisien yang dapat di monitor melalui sistem pengendalian indikator kinerja utama teknologi informasi;
2. Tersedianya arahan bagi upaya peningkatan kualitas layanan publik secara efektif dan efisien;
3. Tersedianya panduan untuk pengelolaan SDM aparatur pemerintahan untuk menggunakan dan mengelola e-Government;
4. Terdapatnya acuan bagi pengembangan aplikasi sistem informasi serta infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi yang efektif dan efisien;
5. Memberikan landasan berfikir bagi pengembangan infrastruktur e-government yang lebih efektif, efisien dan komprehensif.

## **1.6 Landasan Hukum**

Landasan hukum dari penyusunan dokumen ini adalah sebagai berikut :

1. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2001 tentang Pengembangan dan Pendayagunaan Telematika di Indonesia
2. Inpres No. 3 Tahun 2003, tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan E-Government.
3. Keputusan Menteri Komunikasi dan Informasi Nomor: 69A/m.Kominfo/10/2004 tentang Panduan Teknis Pembangunan Infrastruktur Jaringan Sistem Informasi Pemerintahan
4. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 41/PER/MEN.KOMINFO/11/2007 tentang Panduan Umum Tata Kelola Teknologi Informasi dan Komunikasi Nasional, Versi 1 2007.
5. Pembangunan Pusat Data Pemerintah, Direktorat E-Government, Direktorat Jenderal Aplikasi Telematika, Departemen Komunikasi dan Informatika, Jakarta 2008.
6. Rancangan Pusat Operasional Jaringan Pemerintah, Direktorat E-Government, Direktorat Jenderal Aplikasi Telematika, Departemen Komunikasi dan Informatika, Jakarta 2008.

## **1.7 Metode dan Tahapan Pelaksanaan**

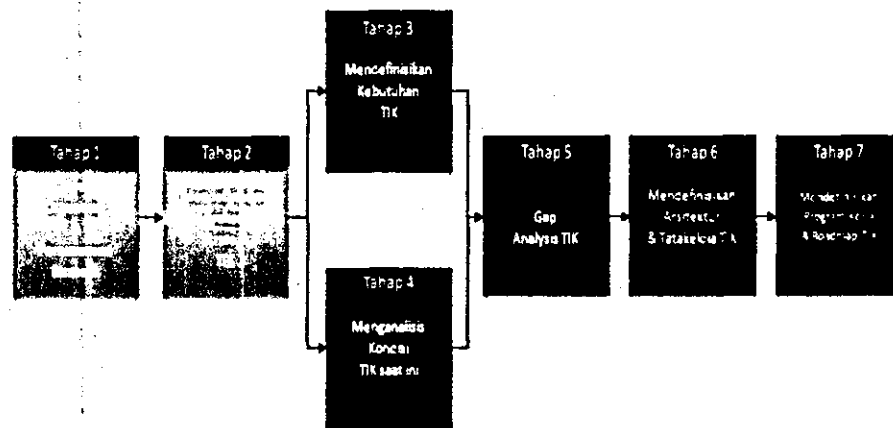
Berdasarkan informasi melalui studi dokumen ( *data primer dan data sekunder*), diskusi, konsultasi, koordinasi dengan berbagai pihak terkait serta memperhatikan visi dan misi Kabupaten Pacitan, dirancang form *survey* dengan merumuskan komponen pokok yang terkait implementasi E-Government. Himpunan pertanyaan tersebut akan digunakan sebagai alat dan panduan dalam proses *survey* ke seluruh jajaran satuan kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pacitan. Tujuan utama *survey* tersebut adalah untuk menggali potensi yang ada serta permasalahan-permasalahan dan keterkaitannya.

Hasil survey akan diolah dengan menggunakan pendekatan analisa SWOT dan kemudian disusun serangkaian kegiatan beserta rincian, arah serta keterkaitannya untuk memecahkan masalah yang ada. Selanjutnya berdasarkan rincian kegiatan yang dibuat, disusun diagram jaringan kegiatan untuk memperlihatkan urutan, keterkaitan dan arahnya.

Dengan menggunakan diagram tersebut dapat disusun urutan dan rangkaian kegiatan yang harus dikerjakan untuk mencapai suatu tujuan pengembangan komponen sistem sehingga akhirnya bisa terwujud *E-Government* yang dicita-citakan. Selain itu dapat diprediksi waktu yang digunakan untuk setiap kegiatan, sehingga untuk seluruh kegiatan ini bisa diprediksi waktu yang diperlukan dari awal sampai akhir. Untuk setiap kegiatan akan dikelompokkan sedemikian rupa sehingga dapat dikerjakan secara terpisah tanpa harus menunggu selesainya kegiatan yang lain.

Dengan demikian, nantinya akan dapat ditetapkan target yang ingin dicapai dari setiap kegiatan yang dilaksanakan. Demikian pula akan dapat disusun suatu rangkaian kegiatan secara bertahap sehingga pencapaian sebagian dari target dapat dipilih dengan menentukan kegiatan-kegiatan apa saja yang harus dilaksanakan.

Kemudian tahapan dalam penyusunan dokumen dapat digambarkan sebagai berikut:



Gambar 1 Tahapan Penyusunan Dokumen Masterplan

### Tahap 1- Studi Organisasi dan Perencanaan Strategik

Hal pertama yang akan dilakukan adalah mempelajari profil organisasi yang mencakup visi, misi, dan nilai yang dicanangkan organisasi, agar dapat diketahui ke arah mana dan apa yang menjadi target utama atau prioritas

organisasi di dalam melakukan kegiatannya sehari-hari serta proses bisnis organisasi. Agar visi dan misi yang telah dicanangkan dapat tercapai dan dimonitor tingkat pencapaiannya, tentunya memiliki obyektif dan indikator bisnis sebagai tolak ukur. Dalam posisi ini, paling tidak terlihat dua peranan teknologi informasi yang penting, yaitu sebagai pemicu (*driver*) organisasi agar dapat mencapai obyektif yang dicanangkan dan sebagai alat bantu untuk melihat kinerja organisasi melalui pengumpulan dan penyampaian informasi terkait dengan indikator tersebut.

#### **Tahap 2- Perencanaan Stategik TIK**

Proses selanjutnya dari hasil studi organisasi, dilakukan perencanaan strategik tujuan adalah melakukan kajian terhadap serta hubungan organisasi dengan seluruh stakeholdernya. Hasil atau output dari pengkajian ini pada dasarnya adalah definisi terhadap peranan teknologi informasi yang sesuai dengan kebutuhan operasional organisasi.

#### **Tahap 3 - Analisa Kondisi existing**

Proses selanjutnya adalah melakukan analisa kondisi existing dari hasil survey, studi, wawancara dan diskusi dengan pihak yang terkait. Untuk melihat kondisi existing ini dilakukan dengan assessment kondisi TIK di Pemerintah Kabupaten Pacitan.

Dari hasil assessment tersebut dapat disusun SWOT (*strengths, weakness, opportunities, threats*) atau KEKEPAN (Kekuatan Kelemahan Kesempatan dan Ancaman) untuk memetakan gambaran implementasi TIK secara keseluruhan sehingga bisa disusun strategi pengembangan TIK yang meliputi aspek SDM, infrastrnktur teknis, sistem informasi serta organisasi.

#### **Tahap 4 - Mendefinisikan Kebutuhan TIK, infrastruktur dan aplikasi**

Setelah mempelajari secara seksama seluk beluk lingkungan internal dan eksternal organisasi, langkah berikutnya adalah mendefinisikan kebutuhan pengembangan infrastuktur dan aplikasi.

#### **Tahap 5 - Gap Analys TIK**

Gap Analys TIK adalah tahapan untuk menganalisa hasil olahan data-data dari analisa hasil data survey, sistem yang sudah ada, dibandingkan dengan kebutuhan integrasi kedepannya, sehingga akan nampak gap yang

nantinya hal tersebut menjadi dasar untuk penentuan program kerja dan roadmap pengembangan TIK.

#### **Tahap 6 - Perumusan Arsitektur dan Tata Kelola Teknologi Informasi**

Perumusan arsitektur berdasarkan proses bisnis yang akan dikomputerisasi yang meliputi :

Desain arsitektur sistem informasi

Desain arsitektur Infrastruktur

Desain tata kelola TIK

Keluaran yang dihasilkan pada tahap ini akan sangat menentukan keberhasilan eksekusi dari rencana pengembangan teknologi informasi agar memberikan nilai sesuai dengan harapan organisasi.

#### **Tahap 7 - Mendefenisikan Program Kerja dan Roadmap**

Ibarat sebuah bangunan raksasa, arsitektur teknologi informasi yang digambarkan pada tahap sebelumnya akan dibangun tahap demi tahap, sesuai dengan prinsip rumah tumbuh. Masing-masing komponen atau modul teknologi itulah yang direncanakan akan dibangun secara bertahap, yaitu pada jangka waktu pendek, menengah, dan panjang.

Keseluruhan program kerja dipetakan pelaksanaannya sesuai dengan tata kala waktu tertentu (jangka pendek, menengah, dan panjang) menjadi sebuah perencanaan yang sesungguhnya. Output dari program kerja dan roadmap ini meliputi infrastruktur aplikasi, tatakelola TIK dan pengembangan roadmap/tahapan implementasi.

## **BAB II**

### **KONDISI E-GOVERNMENT**

#### **2.1 Kondisi Saat Ini**

Dalam menyusun analisa kondisi, dilakukan survey pada satuan kerja (Bagian, Dinas, Kantor, Lembaga, Kecamatan,) di lingkungan Pemerintah Pacitan , kecamatan. Daftar satuan di pemerintah Pacitan sebagai berikut :

- | <b>No</b> | <b>Nama SKPD</b>                                    |
|-----------|---|
| 1         | Dinas Kelautan dan Perikanan                        |
| 2         | Dinas Kehutanan dan Perkebunan                      |
| 3         | Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan        |
| 4         | Dinas Bina Marga dan Pengairan                      |
| 5         | Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga. |
| 6         | Dinas Pendidikan                                    |
| 7         | Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Kebersihan.       |
| 8         | Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika        |
| 9         | Dinas Sosnakertran                                  |
| 10        | DPPKA   |
| 11        | Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil.               |
| 12        | Dinas Pertambangan dan Energi                       |
| 13        | Dinas Tanaman Pangan dan Peternakan                 |
| 14        | Dinas Kesehatan                                     |
| 15        | Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa |
| 16        | Badan Penelitian Pengembangan dan Statistik         |
| 17        | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik                   |
| 18        | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah                |
| 19        | Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan |
| 20        | Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan       |
| 21        | BKD   |
| 22        | Sekretariat Dewan                                   |
| 23        | Satpol PP   |
| 24        | Inspektorat   |
| 25        | RSUD  |
| 26        | BPBD  |
| 27        | Kantor Perpustakaan Arsip dan Dokumentasi           |
| 28        | KLH   |
| 29        | Kantor Ketahanan Pangan                             |
| 30        | Kantor Diklat                                       |
| 31        | Bagian Kerjasama dan Perbatasan                     |
| 32        | Bagian Humas dan Protokol                           |
| 33        | Bagian Adm. SDA                                     |
| 34        | Bagian Hukum  |
| 35        | Bagian Keuangan                                     |
| 36        | Bagian Kesra  |
| 37        | Bagian PDE  |

- 38** Bagian Organisasi
- 39** Bagian Adm. Pemerintahan
- 40** Bagian Adm. Pembangunan
- 41** Bagian Umum
- 42** Bagian Ekonomi
- 43** Kecamatan Donorojo
- 44** Kecamatan Pringkuku
- 45** Kecamatan Punung
- 46** Kecamatan Pacitan
- 47** Kecamatan Kebonagung
- 48** Kecamatan Arjosari
- 49** Kecamatan Nawangan
- 50** Kecamatan Bandar
- 51** Kecamatan Tegalombo
- 52** Kecamatan Tulakan
- 53** Kecamatan Ngadirojo
- 54** Kecamatan Sudimoro

### **2.1.1 Kondisi Geografis**

Kabupaten Pacitan terletak di Pantai selatan Pulau Jawa dengan letak geografis berada antara 110°55' – 110° 25' Bujur timur dan 7° 55' – 8° 17' Lintang Selatan. Batas-batas administrasi : sebelah timur : kabupaten Trenggalek; sebelah selatan : Samudera Indonesia ; sebelah barat : Kabupaten Wonogiri ( Jawa Tengah ); dan sebelah utara : Kabupaten Ponorogo. Luas wilayah 1.389,87 Km<sup>2</sup>.

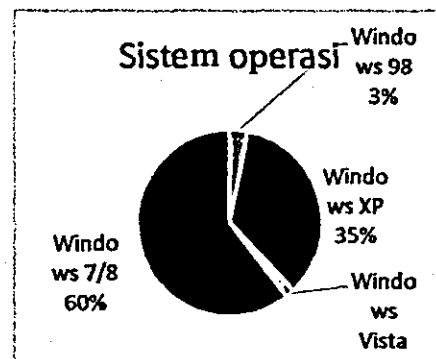
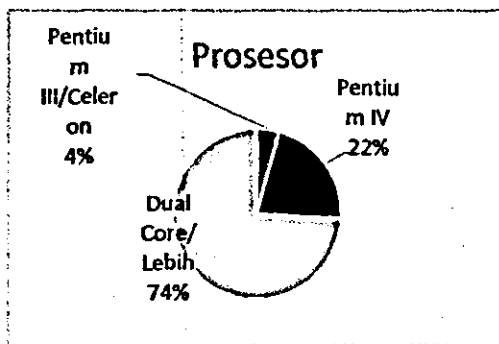
Dari aspek topografi menunjukkan bentang daratannya bervariasi dengan kemiringan sebagai berikut :

- a. Datar (kelas kelerengan 0-5%) dengan luas 55,59 Km<sup>2</sup> atau 4% dari luas wilayah Kabupaten Pacitan.
- b. Berombak (kelas kelerengan 6-10%) dengan luas 138,99 Km<sup>2</sup> atau 10% dari luas wilayah Kabupaten Pacitan.
- c. Bergeklombang (kelas kelerengan 11-30%) dengan luas 333,57 Km<sup>2</sup> 24% dari luas wilayah Kabupaten Pacitan.
- d. Berbukit (kelas kelerengan 31-50%) dengan luas 722,73 Km<sup>2</sup> atau 52% dari luas wilayah di Kabupaten Pacitan.
- e. Bergunung (kelas kelerengan > 52%) dengan luas 138,99 Km<sup>2</sup> atau 10% dari luas wilayah di Kabupaten Pacitan.

### 2.1.2 Kondisi Hardware /Perangkat Keras

Perangkat komputer merupakan salah satu sarana yang diperlukan dalam implementasi e-government. Dari hasil pengumpulan data, SKPD Pemerintah kabupaten Pacitan mempunyai perangkat komputer yang terdiri dari PC, laptop dan server.

Deskripsi	Jumlah (unit)
Komputer ( PC dan Laptopm aktif digunakan)	970
Komputer yang terhubung LAN dan Internet di masing-masing SKPD	719
Printer	563
Scanner	74



Untuk operasional kantor, sebagian besar komputer sudah menggunakan spesifikasi dual core atau lebih yaitu 74%, pentium IV 18 % dan sebagian kecil pentium III (2%). Sistem operasi yang banyak dipakai adalah windows 7 dan windows 8 diikuti windows XP.

Untuk pusat data atau datcenter, Pemerintah kabupaten Pacitan mempunyai ruangan server yang sederhana.

Deskripsi	Kondisi ruang data center
<b>Lokasi</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Lantai 1 Bidang TI gedung PDE</li> <li>▪ Ruang tertutup kaca</li> <li>▪ Kekuatan ruangan tidak diketahui</li> <li>▪ Lantai dari ubin, belum <i>Raised Floor</i></li> </ul>
<b>Sarana Penunjang</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Listrik PLN 1 sumber</li> <li>▪ Generator tidak ada</li> <li>▪ CCTV tidak ada</li> <li>▪ UPS manual on, penempatan jadi satu dengan server</li> <li>▪ Pendingin ruangan : ac split</li> <li>▪ Pengontrol suhu : tidak ada</li> <li>▪ Alat pemadam kebakaran : tidak ada</li> <li>▪ grounding : tidak diketahui tahanannya</li> <li>▪ Security access : menggunakan kunci</li> </ul>
<b>Komunikasi</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Tidak ada</li> </ul>
<b>Lain-lain</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Rack server 1 unit</li> </ul>
<b>DRC/BDC</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Belum ada</li> </ul>
<b>Control Room</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Belum ada</li> </ul>

### 2.1.3 Kondisi Jaringan dan Internet

Satuan kerja yang berada didalam kompleks kantor bupati belum terhubung dengan jaringan backbone. Beberapa satuan kerja sudah ada jaringan LAN antar ruangan.

Berikut data rekapitulasi kondisi infrastruktur Jaringan di Pemerintah Kabupaten Pacitan:

No.	Deskripsi	Jumlah SKPD
1	Jaringan yang terhubung ke PDE /Pengelola TI di kompleks kantor Bupati	1
2	Jaringan LAN dalam ruangan masing-masing SKPD	16
3	Koneksi titik koneksi langganan internet mandiri (WAN)	46

Untuk koneksi WAN ( wide area networ) sebagian besar SKPD melalui jalur koneksi internet dengan berlangganan secara mandiri.

Dengan konfigurasi WAN seperti ini maka pengendalian kegiatan TIK disetiap SKPD relatif sulit dilaksanakan karena setiap SKPD sangat independent untuk mengelola jaringannya sendiri.

Setiap unit langsung terhubung ke internet internasional. Jaringan yang ada sekarang adalah setiap SKPD bebas melakukan interaksi dengan internet sehingga tidak terjaga keamanan transaksi data dan informasinya, sangat rawan terhadap intrusi, karena setiap titik berada di area terbuka yang langsung berhadapan dengan publik.

Tabel dibawah merupakan kondisi jaringan dan internet yang ada di kabupaten Pacitan :

No	SKPD	LAN ke Bidang TI /Kantor Bupati	Lan antar ruangan	Kondisi LAN	Wifi	Internet	Sumber	Bandwidth
1	Badan KBPP	Tidak Ada	Tidak Ada	Baik	2	Ada		
2	Badan Kepegawaian Daerah	Tidak Ada	ada	baik	3	Ada	Telkom Speedy	3 Mbps
3	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Tidak Ada	Tidak Ada		ada	Ada		
4	Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa	Tidak Ada	Tidak Ada		1	Ada	Speedy	512 Mbps
5	Badan Penelitian, Pengembangan dan Statistik Kabupaten		Tidak ada	baik	ada	Ada	ISP (tidak diisi)	
6	Bagian Administrasi Kesra Setda	Tidak Ada	Tidak Ada	putus sambung	1	Ada		
7	Bagian Administrasi Pemerintahan Umum	Tidak Ada	Tidak Ada			Ada	Speedy	
8	Bagian Administrasi SDA	Tidak Ada	Tidak Ada	baik		Ada	Telkom Speedy	1 Mbps
9	Bagian Hukum	Tidak Ada	Tidak Ada	Baik		Ada	Speedy	1 Mbps
10	Bagian Humas dan Protokol Setda	Tidak Ada	Tidak Ada			Tidak Ada		
11	Bagian Kerjasama & Perbatasan	Tidak Ada	Tidak Ada	Baik		Ada	Speedy	
12	Bagian Organisasi Setda	Tidak Ada	Ada	Baik	2	Ada	ISP	1 Mbps
13	Bagian PDE	Ada	ada	Baik	ada	Ada	Astinet (PT Telkom)	2 Mbps
14	Bagian Umum Setda		Tidak Ada	putus sambung	1	Ada		
15	Bappeda	Tidak Ada	Tidak Ada		ada	Ada		1 Mbps
16	BPBD Kabupaten Pacitan			baik	2	Ada	Speedy	2 Mbps

17	BPM-PP	Tidak Ada	Ada	Baik	1	Ada	ISP	1 Mbps
18	Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Kebersihan	Tidak Ada	Tidak Ada	Baik	1	Ada		
19	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda Dan Olahraga	Tidak Ada	Ada	Baik	2	Ada	ISP	
20	Dinas Kehutanan dan Perkebunan	Tidak Ada	Tidak Ada		3	Ada	Speedy	1 Mbps
21	Dinas Kelautan dan Perikanan	Tidak Ada	Ada	Baik		Ada	ISP	
22	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Tidak Ada	Ada	putus sambung	Tidak Ada	Ada	ISP	13 Mbps
23	Dinas Kesehatan	Tidak Ada	Ada	Baik	3	Ada	ISP	2 Mbps
24	Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan	Tidak Ada	Tidak Ada		1	Ada	Telkom Speedy	
25	Dinas Pendidikan	Tidak Ada	Ada	Baik	4	Ada	Speedy dan Jardiknas	1 M, 512 K
26	Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	Tidak Ada	ada	baik	3	Ada	Telkom Speedy	2 Mbps
27	Dinas Pertambangan dan Energi	Tidak Ada	Ada	Baik	1	Ada	Speedy	1 Mbps
28	Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Tidak Ada			ada	ada	Speedy (2 account)	0.5 Mbps
29	Dinas Tanaman Pangan dan Peternakan		ada	baik	2	Ada	Telkom Speedy	1 Mbps
30	DPPKA	Tidak Ada	Ada	Baik	8	Ada	Astinet (PT Telkom)	1 Mbps, 512 Kbps
31	Inspektorat	Tidak Ada	Tidak Ada		2	Ada	Speedy	512 kbps x 2
32	Camat Bandar	Tidak Ada	Ada	Baik	1	Ada	Speedy	1 Mbps
33	Camat Tulakan	Tidak Ada	Tidak Ada	putus sambung	1	Ada		
34	Kecamatan Tegalombo	Tidak Ada	Tidak Ada			Ada	GSM	< 1 Mbps

35	Kecamatan Pacitan	Ada	Ada	Baik	1	Ada	ISP, dari jaringan PemKab	1 Mbps
36	Kecamatan Pringkuku	Tidak Ada	Tidak Ada	putus sambung	1	Ada	ISP	1 Mbps
37	Kecamatan Sudimoro	Tidak Ada	Tidak Ada	susah terhubung		Tidak Ada		
38	Kantor Ketahanan Pangan	Tidak Ada	Tidak Ada		Tidak Ada	Ada	Telkom Speedy	
39	Kantor Lingkungan Hidup	Tidak Ada			1	Ada	Speedy	1 Mbps
40	Kantor Pendidikan dan Pelatihan	Tidak Ada	Ada	putus sambung	1	Ada	Speedy	1 Mbps
41	Kantor Perpustakaan, Arsip & Dokumentasi	Tidak Ada	Tidak Ada		1	Ada	Telkom Speedy	512 Kbps
42	Kecamatan Donorojo	Tidak Ada	Tidak Ada			Ada	Telkom Speedy	
43	Kecamatan Kebonagung	Tidak Ada	Tidak Ada		1	Ada	Speedy	512 kbps
44	Kecamatan Nawangan	Tidak Ada	Tidak Ada			Tidak Ada		
45	Kecamatan Ngadirojo	Tidak Ada	Tidak Ada			Ada	Speedy	
46	Kecamatan Punung	Ada	Tidak Ada	putus sambung	1	Ada	Jaringan Pemkot	
47	RSUD Pacitan	Tidak Ada	Ada	Baik	3	Ada	Telkom Speedy	7 Mbps
48	Satuan Polisi Pamong Praja	Tidak Ada	Tidak Ada		1	Ada	ISP	
49	Sekretariat DPRD	Tidak Ada	Tidak Ada		3	Ada	ISP	512 Kbps

#### 2.1.4 Kondisi Sistem Informasi

Berdasar data yang diperoleh dari hasil kuisioner beberapa satuan kerja dan kecamatan sudah memiliki sistem informasi untuk membantu manajemen/pengelolaan data. Sistem informasi yang tersedia baru dapat memenuhi kebutuhan untuk tiap unit kerja tertentu sehingga unit kerja lain sulit untuk dapat ikut memanfaatkan data hasil pengolahan sistem informasi tersebut. Selain itu aplikasi juga banyak berasal dari pusat (kementrian/lembaga negara).

Dari beragam aplikasi yang digunakan SKPD, ada aplikasi yang digunakan oleh seluruh SKPD secara online.

<b>Nama Aplikasi</b>	<b>Deskripsi</b>	<b>Kepemilikan/Pengelola</b>	<b>Teknologi</b>
<b>SIPKAD (Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah)</b>	Pengelolaan Administrasi Keuangan Daerah	Ditjen Keuangan Daerah Kemendagri	Web (ASP/Oracle)
<b>SIMONEV</b>	Monitoring pelaksanaan kegiatan pembangunan dan mengevaluasi indikator perencanaan kegiatan pembangunan	Bappeda Kab. Pacitan	Web

Dari banyaknya yang ada tersebut, beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam penerapan dan pengelolaan aplikasi di Pemkab Pacitan adalah seb

1. Masih jarang pola manajemen data secara elektronik (dalam bentuk basis data), sehingga akan menyulitkan dalam proses pemasukan data
2. Belum adanya kebijakan birokrasi yang jelas tentang otoritas kepemilikan data dan akses oleh pihak lain
3. Kurangnya pemahaman akan prinsip-prinsip HAKI (Hak Atas Kekayaan Intelektual), sehingga beberapa satuan kerja menggunakan perangkat lunak bajakan (ilegal).

Daftar tabel aplikasi SKPD pengguna, deskripsi, kepemilikan/pengelola dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

<b>NO</b>	<b>SKPD PENGGUNA</b>	<b>NAMA APLIKASI</b>	<b>DESKRIPSI</b>	<b>KEPEMILIKAN/PENGELOLA</b>	<b>TEKNOLOGI</b>
<b>1</b>	<b>Kecamatan Kebonagung</b>	SIPKD	Aplikasi Pengelolaan Keuangan	Ditjen Keuangan Daerah Kemendagri	Web (ASP/Oracle)
		SIM Perizinan	Aplikasi untuk mengelola perizinan	Dinas Perizinan	Client Server
		Website SKPD Kecamatan Kebonagung	Website untuk menampilkan informasi SKPD terkait	Pengelola Data Elektronik	Joomla (PHP/Mysql)
		Simbada	Sistem pengelolaan barang milik daerah	Ditjen Pengelolaan Barang Milik Daerah Kemendagri	(PHP/Mysql)
		SIMONEP	Aplikasi untuk monitoring realisasi anggaran	Badan Pembangunan Daerah (Bapeda)	(PHP/Mysql)
		SIPPD	Aplikasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Badan Pembangunan Daerah (Bapeda)	(PHP/Mysql)
		Aplikasi E-KTP	Input data dan rekam KTP Elektronik	Dintjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Departemen Dalam Negeri	Client Server
		Aplikasi Perpajakan	Aplikasi Penghitungan dan Cetak Laporan Perpajakan Penghasilan	Dirtjen Perpajakan	(PHP/Mysql)
<b>2</b>	<b>Bagian Kerjasama &amp; Perbatasan</b>				
<b>3</b>	<b>Bagian Administrasi Pemerintahan Umum</b>	Website SKPD Babian Administrasi Pemerintahan Umum	Website untuk menampilkan informasi SKPD terkait	Bagian Administrasi Pemerintahan Umum	
<b>4</b>	<b>Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Kebersihan</b>	E-mon Kementrian PU	Pengelolaan air bersih dan sanitasi	Randal Jatim Cipta Karya Provinsi	Web
		Web Based Reporting System (WBRS)	Pelaporan kegiatan dak air bersih	Kementrian Keuangan	Web

		SIRUP (Rencana Umum Pengadaan)	Informasi Program Kegiatan SKPD	Bagian Administrasi Pembangunan Setda Kab. Pacitan	Web
		Website SKPD	Profil SKPD	Bagian PDE Kab. Pacitan	Web
		E-mon Kementrian PU	Pelaporan online kegiatan Satker PIP	Kementrian PU	Web
<b>5</b>	<b>Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil</b>	SIAK	Pelayanan Dokumen Kependudukan	Dinas Dukcapil	Web (ASP/Oracle)
<b>6</b>	<b>Kantor Pendidikan dan Pelatihan</b>	Sistem Pengelolaan Barang dan Aset Daerah	Mengolah, pelaporan data Aset Kantor Diklat	Kantor Diklat	ASP
		SIPKD (Sistem Informasi Pengelola Keuangan Daerah)	Mengolah data keuangan Kantor Diklat	Kantor Diklat	Program aplikasi SIPKD
		SIPPD (Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah)	Mengolah data renstra SKPD	Kantor Diklat	Program aplikasi SIPPD
		SE (Surat Elektronik)	Mengagendakan surat masuk dan surat keluar secara elektronik	Kantor Diklat	Website
		SIMONEP (Sistem Informasi Monitoring dan Evaluasi Pembangunan)	Mengolah data realisasi fisik keuangan SKPD	Kantor Diklat	Website
		SIRUP (Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan)	Untuk mengetahui anggaran SKPD	Kantor Diklat	Program Aplikasi SIRUP
		SBPP (Sistem Bendahara Pengeluaran Pembantu)	Mengelola laporan SPJ setiap kegiatan	Kantor Diklat	Program Aplikasi SBPP

<b>7</b>	<b>Kecamatan Pacitan</b>	Kecamatan Pacitan	Informasi kegiatan Kecamatan	Kecamatan Pacitan/ PDE	Client Server web
<b>8</b>	<b>Dinas Pendidikan</b>	Dapodikdas	Aplikasi pendataan data pokok pendidikan dasar	Sekolah lingkup pendidikan dasar, dinas pendidikan, kementerian pendidikan dan kebudayaan	webbase
		Dapodikmen	Aplikasi pendataan data pokok pendidikan menengah	Sekolah lingkup pendidikan menengah, dinas pendidikan, kementerian pendidikan dan kebudayaan	webbase
		Vervalisp	Aplikasi manajemen data satuan pendidikan	Dinas Pendidikan & Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	Web
		Vervalptk	Aplikasi manajemen data pendidik dan tenaga kependidikan	Dinas Pendidikan & Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	Web
		Vervalpd	Aplikasi manajemen data peserta didik	Dinas Pendidikan & Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	Web
		Login management dapodik	Aplikasi pemberdayaan data dapodiknas dan dapodikmen	Dinas Pendidikan & Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	Web
		Padamu			
		Simtun	Aplikasi manajemen tunjangan	Dinas Pendidikan & Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	Web
		Management Website Dindik	Website untuk menampilkan informasi Dinas Pendidikan terkait	Dinas Pendidikan	Joomla (PHP/MySQL)
		SIPKD	Aplikasi Pengelolaan Keuangan	Ditjen Keuangan Daerah Kemendagri	Web (ASP/Oracle)

<b>9</b>	<b>BPBD Kabupaten Pacitan</b>	SIPKD	Apliaksi Pengelolaan Keuangan	Ditjen Keuangan Daerah	Web (ASP/Oracle)
		Web SKPD Balitbang	Website untuk menampilkan informasi SKPD terkait	Badan Penelitian Pengembangan dan Statistik	Joomla (PHP/Mysql)
		SIPPD	Website untuk menampilkan informasi perencanaan pembangunan daerah	BAPPEDA	PHP/ MySsql
<b>10</b>	<b>Dinas Tanaman Pangan dan Peternakan</b>	SIPKD	Aplikasi pengolahan data keuangan	Ditjen Keuangan Daerah Kemendagri	Web (ASP/Oracle)
		Website SKPD	Website untuk menampilkan informasi SKPD terkait	Dinas Tanaman Pangan dan Peternakan	Joomla (PHP/Mysql)
		SAKPA	Sistem informasi akuntansi keuangan dan anggaran	KPKN	Web (ASP/Oracle)
		SIMAK BMN	Sistem informasi keuangan barang milik negara	KPPN	web (Oracle)
		Simonev	Sistem monitoring dan evaluasi	Dinas Tanaman Pangan dan Peternakan	Web (MySQL/PHP)
		SPP	Surat permintaan pembayaran	KPPN	web (Oracle)
		RKA-KL	Rencana Kebutuhan Anggaran Kementerian Lembaga	KPPN	web (Oracle)
		E-proposal	Informasi Pengajuan proposal kegiatan 5 tahun	Dinas Tanaman Pangan dan Peternakan	Web (PHP/MySQL)
		MPO,Cyber Extension, E-form Horti, AAP	Pengelolaan kegiatan dinas	Dinas Tanaman Pangan dan Peternakan	web (Oracle)
<b>11</b>	<b>Badan Penelitian, Pengembangan dan Statistik</b>				
<b>12</b>	<b>Bagian Administrasi SDA</b>	SIPKD	Alokasi pengelolaan	Ditjen Keuangan Daerah	Web

			keuangan		
<b>13</b>	<b>Badan Kepegawaian Daerah</b>	SIPKD	Aplikasi Pengelolaan Keuangan	Ditjen Keuangan Daerah Kemendagri	Web (ASP/Oracle)
		Website SIPKD BKD	Website untuk menampilkan informasi SKPD terkait	Badan Kepegawaian Daerah	Joomla (PHP/Mysql)
		SIMPEG	Aplikasi untuk pengelolaan kepegawaian	Badan Kepegawaian Daerah	Web basic (PHP/MySQL)
		Aplikasi Kuanagn SKPD	Aplikasi Pembuatan RKA dan DPA SKPD	Badan Kepegawaian Daerah	Web basic (PHP/MySQL)
		Aplikasi Arsip PNS	Aplikasi untuk digitasi arsip PNS dan Pengelolaan Arsip PNS	Badan Kepegawaian Daerah	Web basic (PHP/MySQL)
		Aplikasi SIMONEP	Laporan realisasi fisik dan keuangan	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Web basic (PHP/MySQL)
<b>14</b>	<b>Kecamatan Donorojo</b>	SIPKD	Aplikasi pengelolaan keuangan daerah	DPPKA Kab. Pacitan	Web
		SIPPD	Aplikasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Bappeda Kab. Pacitan	Web
		SIPBD	Aplikasi pengadaan barang daerah	Administrasi Pembangunan Kab. Pacitan	Web
		SIMBADA	Aplikasi laporan barang milik daerah	DPPKA Kab. Pacitan	Web
		Laporan Pajak	Aplikasi laporan pajak tahunan	KP2KP Kab. Pacitan	Web
		SIAK	Aplikasi administrasi kependudukan	Disdukpencahil Kab. Pacitan	Web
		e-KTP	Aplikasi perekaman data e-KTP	Kemendagri	Web
<b>15</b>	<b>Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika</b>	Sistem Informasi Uji Kendaraan (SIK)	Aplikasi pengelolaan uji kendaraan	Dinas Perhubungan	Web (PHP/MySQL)

		Sistem informasi izin trayek	Aplikasi pengelolaan trayek angkutan umum	Dinas Perhubungan	Web (PHP/MySQL)
		GIS Sarana Transportasi	Informasi berbasis geografi sarana transportasi	Dinas Perhubungan	Web (PHP/MySQL)
		Website SKPD Dinas Perhubungan	Website untuk menampilkan informasi SKPD terkait	Dinas Perhubungan	Web (PHP/MySQL)
<b>16</b>	<b>Kec. Tegalombo</b>	KK/SIAK	Aplikasi pembuatan KK	Dukcapil/kec.	Web
		Perekaman e-KTP	Pelayanan perekaman e-KTP	Dukcapil/kec.	Web
		Website SKPD Kec. Tegalombo	Informasi tentang kegiatan yang ada di Kec. Tegalombo	Kantor Kec. Tegalombo	PHP/MySQL
		SIKPD	Aplikasi pengelola keuangan	Ditjen Keuangan Daerah Kemendagri	Web
<b>17</b>	<b>Kecamatan Punung</b>	SIAK (Sistem Informasi Administrasi Kependudukan)	Mencetak KK dan KTP	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Pacitan	
		PATEN (Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan)	1. Pelayanan kepada masyarakat dalam bidang perijinan 2. Pelayanan surat-menyurat (pindah tempat, pindah datang dll) 3. Mengentri kegiatan Camat secara online	Bagian Pengolah Data Elektronik Kabupaten Pacitan	
		E-KTP	Pelayanan pemotretan kepada masyarakat yang akan mengurus KTP Elektronik	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Pacitan	
<b>18</b>	<b>DPPKA</b>	SIMPEG (Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian)	Mengetahui dan mengolah data/informasi tentang kepegawaian/PNS	BKD Kab Pacitan	Kerjasama dengan BKD

	SIPKD (Sistem Informasi Pengelola Keuangan Daerah)	Mengelola administrasi keuangan daerah (Penganggaran, penatausahaan)	DPPKA Kab Pacitan	Kerjasama dengan PT USADI
	RKA - DPA - APBD	Mengelola data RKA (Rencana Kerja Anggaran), DPA (Dokumen Pelaksanaan Anggaran) dan Pembuatan Buku APBD	DPPKA Kab Pacitan	Swakelola
	Sistem Informasi Pendapatan Daerah	Mengelola administrasi pendapatan daerah secara global	DPPKA Kab Pacitan	Swakelola
	Sistem Pengelolaan Barang Pakai Habis dan Inventaris	Mengelola administrasi aset-aset daerah	DPPKA Kab Pacitan	Swakelola
	Sistem Informasi Pajak dan Retribusi Daerah	Mengelola administrasi pajak dan retribusi daerah	DPPKA Kab Pacitan	Swakelola
	Sistem informasi pembayaran pajak dan retribusi daerah	Mengelola administrasi pembayaran pajak dan retribusi daerah	DPPKA Kab Pacitan	Swakelola
	SISMIOP (Sistem Manajemen Informasi Obyek Pajak)	Mengelola administrasi obyek pajak (PBB)	DPPKA Kab Pacitan	Swakelola
	SIG (Sistem Informasi Geographic)	Mengelola administrasi/pemetaan obyek pajak (PBB)	DPPKA Kab Pacitan	Swakelola
	SIM Gaji (Sistem Informasi Manajemen Gaji)	Mengelola administrasi gaji PNSD	DPPKA Kab Pacitan	Software dari PT Taspen
	Situs dppka.pacitankab.go.id	Web resmi DPPKA	DPPKA Kab Pacitan	Kerjasama dengan Bagian

		LDT (Laporan dana transfer)	Mengelola administrasi laporan DAK	DPPKA Kab Pacitan	Kerjasama dengan Kementerian Keuangan
<b>19</b>	<b>RSUD Pacitan</b>				
<b>20</b>	<b>Bappeda</b>	SIPPD (Sistem Informasi Perencanaan Pembahgunan Daerah)	Mengendalikan dan mengawasi proses perencanaan dari levl musrenbang kecamatan hingga KUA PPAS	Bappeda Kab. Pacitan	Web
		SIMONEP APBD	Monitoring pelaksanaan kegiatan pembangunan yang bersumber pada dana APBD dan APBN serta mengevaluasi indikator perencanaan kegiatan pembangunan	Bappeda Kab. Pacitan	Web
		SIM Persuratan	mengelola surat masuk dan keluar	Bappeda Kab. Pacitan	Access
		SIMPEG (Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian)	mengelola data pegawai	Bappeda Kab. Pacitan	PHP/MySQL
<b>21</b>	<b>Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda Dan Olahraga</b>	SIPPD	Aplikasi perencanaan program daerah	Bappeda	server online
		SIMONEV	Aplikasi sistem informasi dan monitoring dan evaluasi laporan bulanan	Bag pembangunan	server online
		SIPKD	Aplikasi pengelolaan keuangan	Ditjen Keuangan daerah	Web (ASP/Oracle)
		Website SKPD	informasi Dinas Budparpora	Dinas Budpora	Joomla (PHP/Mysql)

		Website Pacitan Paradise of Java	Informasi pariwisata, budaya, dan kuliner	Dinas Budpora	web
<b>22</b>	<b>BPM-PP</b>	SIM PTSP	- Database dan aplikasi pendaftaran, pemrosesan, cetak izin dan pelaporan - SMS Center	BPMPP	PHP/MySQL
		website BPMPP	Website untuk menampilkan SKPD	BPMPP	PHP
		SIPKD	Pengelolaan pembangunan	Sekretariat Daerah	
		Monev APBD	Laporan proyek bulanan	Bappeda	
<b>23</b>	<b>Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi</b>	SIPKD	Aplikasi pengelolaan keuangan	Ditjen Keuangan Daerah	
<b>24</b>	<b>Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan</b>	SIPKD	Aplikasi pengelolaan keuangan	DPPKA	web (USADI)
		SIMBADA	Aplikasi pengelolaan barang/jasa	DPPKA	
		website SKPD Dinas Koperindag	website untk menampilkan informasi skpd terkait	Dinas Koperindag	
		Simonep	Mencatat perkembangan pelaksanaan kegiatan pembangunan. Memantau proses dan kemajuan pelaksanaan kegiatan	Bappeda	
		SIPPD	Penyusun renja SKPD	Bappeda	
		Sisko ODS Online data sistem	Pelaporan data kegiatan koperasi	Diskop UKM Jatim	
<b>25</b>	<b>Dinas Pertambangan dan Energi</b>	SIPKD	Aplikasi pengelolaan keuangan	Ditjen Keuangan Daerah Kemendagri	Web (ASP/Oracle)
		Webite SKPD Dinas Pertambangan dan Energi	Website untuk menampilkan informasi SKPD terkait	PDE	Joomla (PHP/Mysql)

		Simbada	Aplikasi pengelolaan barang daerah	DPPKA	PHP/MySQL
		SIMONEP	Aplikasi monitoring evaluasi dan pelaporan kegiatan	Bappeda	PHP/MySQL
		RPJMD	Aplikasi monitoring evaluasi dan pelaporan kegiatan	Bappeda	PHP/MySQL
		SIPPD	Aplikasi Perencanaan kegiatan SKPD	Bappeda	PHP/MySQL
<b>26</b>	<b>Dinas Kehutanan dan Perkebunan</b>	SIPKAD (Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah)	Pengelolaan Administrasi Keuangan Daerah	Ditjen Keuangan Daerah Kemendagri	Web (ASP/Oracle)
		SIPPD (Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah)	Pengelolaan usulan perencanaan pembangunan daerah	Bappeda Kab. Pacitan	Web (ASP/Oracle)
		SIMONEV (Sistem Informasi Monitoring dan Evaluasi)	Monitoring Evaluasi Realisasi Fisik dan Keuangan SKPD	Bappeda Kab. Pacitan	Web (ASP/Oracle)
		E. Proposal (Proposal Electronic)	Pengajuan Proposal Keg. Lingkup Kementerian Pertanian	Kementerian Pertanian	Web (ASP/Oracle)
		MPO (Model Pelaporan On Line)	Pelaporan Kegiatan Tahun Berjalan	Kementerian Pertanian	Web (ASP/Oracle)
		Pacitan Media Online Pemerintah Kabupaten Pacitan	Meningkatkan Pelayanan Administrasi Perkantoran serta untuk memperlancar pemrosesan data dan laporan secara elektronik	PDE/Pemda Pacitan	Web (ASP/Oracle)
		PPDAK (Pelaporan Penggunaan Dana Alokasi Khusus Bidang Kehutanan)	Untuk melaporkan DAK Kehutanan	Kementerian kehutanan republik Indonesia	Web (ASP/Oracle)

		Sistem Informasi RKA-SKPD	Pengelolaan Penganggaran SKPD	DPPKA Kab. Pacitan	Aplikasi
<b>27</b>	<b>Kecamatan Nawangan</b>	SIPKD	Aplikasi pengelolaan keuangan	Dirjen Keuangan Kemendagri	Web (ASP/Oracle)
		SIAK	Aplikasi data kependudukan	Dinas Dukcapil	
		E-KTP	Aplikasi data kependudukan elektronik	Kemendagri	
		Website SKPD Kecamatan Nawangan	Website untuk menampilkan Kecamatan Nawangan	Bagian PDE Setda Kab. Pacitan	Joomla (PHP/Mysql)
<b>28</b>	<b>Dinas Kelautan dan Perikanan</b>	SIMPEG (Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian)	Mengetahui data informasi tentang kepegawaian/PNS	BKD Kab pacitan	Web (ASP/Oracle)
		SIPKAD (Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah)	Pengelolaan Administrasi Keuangan Daerah	DPPKA Kab. Pacitan	Web (ASP/Oracle)
		SIMONEP (Sistem Informasi Monitoring dan Evaluasi Pembangunan)	Mengetahui data informasi tentang pelaksanaan kegiatan APBD	Bappeda	Web (ASP/Oracle)
		SIPPD (Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah)	Mengetahui data informasi tentang perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah	Bappeda	Web (ASP/Oracle)
		SIRENDAK (Sistem Perencanaan Dana Alokasi Khusus)	Mengetahui data informasi tentang perencanaan dan pelaksanaan kegiatan DAK	Sekretaris Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan	Client Server

	LPSE LKPP (Layanan Pengadaan Secara Elektronik)	Mengetahui data informasi tentang perencanaan dan pelaksanaan pengadaan barang jasa	Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	Web (ASP/Oracle)
	SAKPA	Sistem Akuntansi Instansi dalam Pengelolaan Dana APBN	Dirjend Kelautan Pesisir dan Pulau-pulau Kecil, KPPN, Kementerian Keuangan	Client Server
	SIMAK-BMN	Sistem Informasi dan Akuntansi Pengelolaan Barang Milik Negara	Dirjend Kelautan Pesisir dan Pulau-pulau Kecil, KPPN, Kementerian Keuangan, KPKNL	Client Server
	Persediaan	Sistem pengelolaan BMN terutama barang habis pakai	Dirjend Kelautan Pesisir dan Pulau-pulau Kecil, KPPN, Kementerian Keuangan, KPKNL	client Server
	SPM	Sistem pengajuan dan pembayaran keuangan yang bersumber APBN	Dirjend Kelautan Pesisir dan Pulau-pulau Kecil, KPPN, Kementerian Keuangan, KPKNL	client Server
	DIPA/RKAKL	Sistem Aplikasi penyusunan anggaran	Direktorat Jendral Anggaran Kementerian Keuangan, Kementerian Kelautan dan Perikanan	Web (ASP/Oracle)
	SIMLUHKP (Sistem Penyuluh Kelautan dan Perikanan)	Mengetahui data penyuluh, kegiatan penyuluh serta lokasi pembinaan penyuluh	Badan Pengembangan SDM Kelautan dan Perikanan	Web (ASP/Oracle)
	Aplikasi PUPI (Pengembangan Usaha Penangkapan Ikan)	Mengetahui data jumlah kapal, jumlah nelayan	Direktorat Pengembangan Usaha Penangkapan Ikan Dirjen Perikanan Tangkap	Client Server

		SIDATIK (Sistem Data Statistik Kelautan dan Perikanan)	Mengetahui data penyuluh, kegiatan penyuluh serta lokasi pembinaan penyuluh.	Kementerian Kelautan dan Perikanan	Client Server
29	Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa	SIPKAD	Aplikasi Pengelolaan Keuangan	Ditjen Keuangan Daerah Kemendagri	Web (ASP/Oracle)
		Sim Penata Usahaan Aset	Aplikasi Pengelolaan	DPPKA Kab. Pacitan	Client Server
		Website SKPD Bapemas	Website untuk menampilkan informasi SKPD terkait	Bapemas dan Pemdes	Joomla (PHP/Mysql)
		Profil Desa/ Kelurahan	Pengisian data Profil Desa/ Kel	Ditjen PMD Kemendagri	WEB
30	Satuan Polisi Pamong Praja	SIMPADA Pengelolaan Barang (Aset)	Aplikasi Pengelolaan Barang (Aset)	Satpol PP Kab. Pacitan	Web (ASP/Oracle)
		SIPKD	Aplikasi Pengelolaan Keuangan	Ditjen Keuangan Daerah Kemendagri	Web (ASP/Oracle)
		Website SKPD Satpol PP	Website untuk menampilkan informasi SKPD terkait	Satpol PP Kab. Pacitan	Joomla (PHP/Mysql)
		Pelaporan	Melaporkan Kegiatan yang ada di masing-masing satuan	Satpol PP Prov. Jatim	Joomla (PHP/Mysql)
31	Kecamatan Ngadirojo	SIPKD	Aplikasi pengelolaan keuangan	Ditjen Keuangan Daerah Kemendagri	Web (ASP/Oracle)
32	Kantor Perpustakaan, Arsip & Dokumentasi	SIPKD	Aplikasi Pengelolaan Keuangan	Ditjen Keuangan Daerah Kemendagri	Web (ASP/Oracle)
		INLIS	Aplikasi pengelolaan operasional perpustakaan	Perpustakaan Nasional RI	Web
33	Kantor Camat Bandar	SIPKD	Aplikasi Pengelolaan Keuangan	Ditjen keuangan daerah	Web

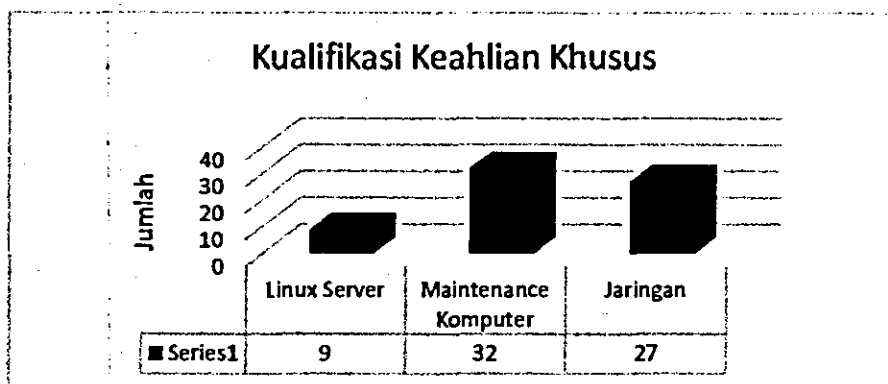
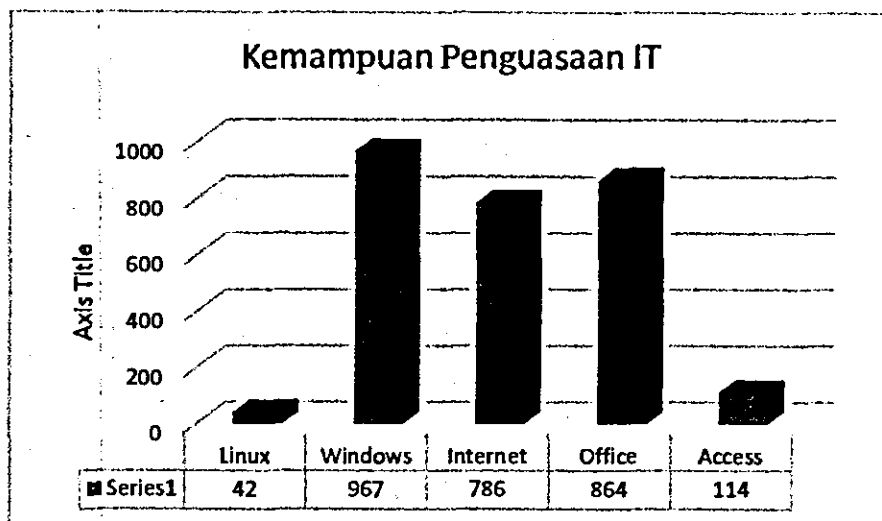
		SIM Perizinan	Aplikasi Pengelolaan perizinan	Dinas Perizinan	Client Server
		Simbada	Aplikasi barang daerah	DPPKA	Web
		SIAK	Aplikasi administrasi kependudukan	Dukcapil/kec.	Web
		SIPPD	Aplikasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Bappeda	Web
<b>34</b>	<b>Dinas Kesehatan</b>	Simpustronik	Aplikasi pelayanan di Puskesmas	Dinas Kesehatan	Ms. Access
		SIPKD	Aplikasi pengelolaan keuangan	Ditjen Keuangan Daerah Kemendagri	Web
		Komunikasi Data Gizi dan KIA terintegrasi	Aplikasi pemantauan capaian Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)	Kemenkes	Web
		Aplikasi Komunikasi data	Aplikasi pelaporan capaian program kesehatan	Kemenkes	Web
		Sistem Informasi Gizi (SI Gizi)	Palaporan capaian program gizi	Kemenkes	Web
		EWARS	Aplikasi pelaporan kewaspadaan dari Kejadian Luar Biasa	Kemenkes	Web
		STBM web	Aplikasi plaporan akses jamban	Kemenkes	Web
		Sistem Informasi Imunisasi	Aplikasi pelaporan imunisasi	Kemenkes	Web
<b>35</b>	<b>Camat Tulakan</b>	SIPKD	Aplikasi pengelolaan keuangan	Ditjen keuangan daerah	Web (ASP/Oracle)
<b>36</b>	<b>Inspektorat</b>	SIPKD	Aplikasi pengelolaan keuangan	Ditjen Keuangan Daerah Kemendagri	Web (ASP/Oracle)
		Website inspektorat	Menampilkan informasi SKPD	inspektorat	PHP

		SAKPA	Aplikasi pengelolaan, pelaporan administrasi barang milik negara dana APBN	Kementrian Keuangan	
		SIMAK-BMN	Aplikasi pengelolaan, pelaporan administrasi barang milik negara dana APBN	Kementrian Keuangan	
		SPM	Aplikasi pengelolaan administrasi keuangan dana APBN	Kementrian Keuangan	
<b>43</b>	<b>Kantor Kecamatan Pringkuku</b>	SIPKD	Aplikasi pengelolaan keuangan	Ditjen Keuangan Daerah Kemendagri	
<b>44</b>	<b>Kecamatan Sudimoro</b>				
<b>45</b>	<b>Badan Kesatuan Bangsa dan Politik</b>	SIPPD	Sistem Informasi perencanaan pembangunan daerah	Bappeda	web
		SIMONEP	Sistem informasi monitoring dan evaluasi pembangunan	Bappeda	web
		SIPKD	Sistem informasi pengelolaan keuangan daerah	DPPKA	web
		UKP-PPP	Unit kerja presiden bidang pengawasan dan pengendalian pembangunan	Bakesbang Prov. Jatim.	web
<b>46</b>	<b>Bagian Organisasi Setda</b>	Website SKPD bagian organisasi	Untuk menampilkan kegiatan di bagian organisasi	bagian organisasi	Joomla (PHP/MySQL)
		SIM Persuratan	mengelola surat masuk dan keluar	bagian organisasi	Client Server (Delphi)
<b>47</b>	<b>Bagian Umum Setda</b>	Surat Elektronik	Aplikasi pengelolaan persuratan (surat masuk	Bagian PDE	

			dan keluar)		
<b>48</b>	<b>Bagian Hukum</b>	jdi.h.jatimprov.gi.id/ka bpacitan	untk pengelolaan jaringan dokumentasi dan informasi hukum	Biru hUkum Prov. Jatim	web

### 2.1.5 Kondisi Sumber Daya Manusia

Sesuai hasil data dari SKPD yang survey, jumlah pegawai ada 1614 orang. Dari jumlah tersebut kompetensi dibidang teknologi informasi terutama aplikasi komputer cukup beragam.



Sekitar 60% atau 967 pegawai sudah mampu menggunakan komputer berbasis windows, dan 53 % mampu menggunakan aplikasi office untuk menunjang pekerjaan di kantor.

Untuk kemampuan berdasarkan kualifikasi khusus, seperti linux server, maintenance komputer dan jaringan jumlahnya masih sedikit, sehingga kedepannya masih perlu ada peningkatan kualitas SDM dengan pelatihan-pelatihan di bidang teknologi informasi.

### 2.2 Kondisi Ideal

Penerapan teknologi informasi di pemerintahan adalah merupakan upaya untuk mengembangkan penyelenggaraan pemerintahan yang berbasis elektronik dalam rangka meningkatkan transparansi dan kualitas pelayanan publik secara efektif dan efisien.

Analisa kondisi ideal ini dimaksudkan untuk melihat sejauh mana kondisi yang diharapkan dari penerapan teknologi informasi dalam mendukung kinerja pemerintahan daerah . Analisa kondisi ideal ini

berdasarkan peraturan yang berlaku dan trend teknologi informasi saat ini dan yang akan datang.

Sesuai dengan yang telah tertuang dalam Inpres No. 3 tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan E-Government dalam paragraf Tujuan Pengembangan e-Government yang diarahkan untuk mencapai 4 tujuan utama, yaitu :

1. Pembentukan jaringan informasi dan transaksi pelayanan publik yang memiliki kualitas dan lingkup yang dapat memuaskan masyarakat luas serta dapat terjangkau di seluruh wilayah Indonesia pada setiap saat tidak dibatasi oleh sekat waktu dan dengan biaya yang terjangkau oleh masyarakat.
2. Pembentukan hubungan interaktif dengan dunia usaha untuk meningkatkan perkembangan perekonomian nasional dan memperkuat kemampuan menghadapi perubahan dan persaingan perdagangan internasional.
3. Pembentukan mekanisme dan saluran komunikasi dengan lembaga-lembaga negara serta penyediaan fasilitas dialog publik bagi masyarakat agar dapat berpartisipasi dalam perumusan kebijakan negara.
4. Pembentukan sistem manajemen dan proses kerja yang transparan dan efisien serta memperlancar transaksi dan layanan antar lembaga pemerintah dan pemerintah daerah otonom.

Dalam kerangka ini fungsi teknologi informasi tidak sekedar sebagai penunjang manajemen pemerintahan yang ada, tetapi justru merupakan driver of change atau sebagai hal yang justru menawarkan terjadinya perubahan-perubahan mendasar sehubungan dengan proses penyelenggaraan pemerintahan. Pencapaian keseluruhan tujuan tersebut diatas adalah merupakan perwujudan dari kondisi ideal dimana pemerintah dengan dukungan teknologi informasi mampu memberikan pelayanan yang responsif dan berkualitas pada masyarakat umum, kalangan dunia usaha ataupun pelayanan antar lembaga pemerintahan.

Beberapa aspek yang dituntut dalam penerapan teknologi informasi guna mencapai tujuan diatas adalah sebagai berikut :

### **2.2.1 Kelembagaan**

Model kelembagaan yang ideal dalam pengelolaan penerapan teknologi informasi di pemerintah daerah adalah dengan menggunakan perpaduan model sentralisasi dan desentralisasi.

Sentralisasi kewenangan diperlukan guna mengontrol pelaksanaan penerapan teknologi informasi di masing-masing unit terkait, sehingga tercipta

suatu sistem yang terintegrasi satu sama lain dengan interoperabilitas yang tinggi, sentralisasi juga dibutuhkan untuk dapat mengatur penggunaan standarisasi dalam sarana ataupun prasarana yang dibutuhkan guna memaksimalkan investasi.

Sentralisasi ini diwujudkan dalam satu unit yang bertanggung jawab langsung pada pimpinan daerah dan mempunyai tingkat kewenangan yang setara dengan dengan badan atau dinas, sehingga memungkinkan untuk melakukan koordinasi secara horizontal.

Tugas dan tanggung jawab unit ini diantaranya adalah :

- a. Melakukan koordinasi dan perencanaan secara menyeluruh dalam memaksimalkan penggunaan teknologi informasi di pemerintahan daerah.
- b. Melakukan standarisasi arsitektur sistem, standarisasi data dan informasi yang dibutuhkan guna menjamin interoperabilitas sistem yang akan diterapkan.
- c. Mengelola portal informasi pemerintah daerah dan gateway sistem informasi manajemen pemerintahan daerah yang menghubungkan sistem ini dan jaringan internet.
- d. Membantu perencanaan pengembangan sistem informasi dibutuhkan di masing-masing unit.
- e. Mengelola prasarana dan sarana yang dibutuhkan secara bersama-sama dalam pengoperasian sistem informasi manajemen pemerintahan daerah seperti jaringan utama (backbone), berbagai server mail, DNS dan berbagai basis data.

Desentralisasi dibutuhkan untuk menjamin fleksibilitas sistem, dan untuk meningkatkandaya respon sistem terhadap perubahan-perubahan yang diperlukan. Desentralisasi ini diwujudkan dengan memberikan kewenangan-kewenangan kepada masing-masing unit untuk mengelola secara mandiri penggunaan teknologi informasi di unit masing-masing guna menghindari duplikasi yang tidak diperlukan, serta menjamin interoperabilitas antar sistem maka perencanaan dan pengembangan teknologi informasi di masing-masing unit haruslah di koordinasikan secara penuh dengan sentral unit pengelola teknologi informasi. Hal ini juga dibutuhkan guna lebih mengefektifkan dana investasi yang dikeluarkan.

### **2.2.2 Sumber Daya Manusia**

Dalam kondisi ideal setiap pegawai pemerintah daerah diharapkan memiliki kemampuan yang dibutuhkan dalam penggunaan teknologi informasi untuk menunjang tugas dan kewajiban kerjanya. Jenis dan

kemampuan yang dituntut sangat beragam tergantung pada posisi dan tugasnya. Diantara keahlian yang dibutuhkan adalah :

a. Teknisi Komputer/Jaringan/Telekomunikasi

Personil yang bertugas untuk melakukan perawatan atau perbaikan terhadap perangkat keras yang dalam hal ini dapat berupa komputer dan jaringannya, ataupun peralatan telekomunikasi lainnya.

b. Programmer

Personil yang bertugas untuk melakukan pembuatan program-program komputer berdasarkan petunjuk rancangan Sistem Analis, juga bertugas untuk mendeteksi serta memperbaiki kesalahan-kesalahan pemrograman pada aplikasi yang ada.

c. Administrator Web

Personil yang bertugas untuk mengelola web server pemerintah daerah, serta bertanggung jawab secara teknis untuk mengkoordinir penyediaan data yang akan ditampilkan di web site pemerintahan daerah.

d. Sistem Analis

Personil yang bertugas untuk merancang pembangunan aplikasi sistem informasi yang dibutuhkan sesuai dengan kaidah-kaidah standard yang dibutuhkan dalam pengembangan sistem informasi, serta mampu untuk melakukan dokumentasi hasil analisa dan rancangan sistem secara baik sehingga memudahkan dalam perawatan sistem ataupun kelanjutan pembangunannya.

e. Administrator Sistem

Personil yang bertugas untuk mengelola sistem informasi yang tersedia di masing-masing instansi pemerintahan daerah, serta mengatur pendaftaran user dan memberikan hak akses dan kewenangannya pada setiap user.

f. Administrator Jaringan

Personil yang bertugas untuk mengelola jaringan komputer

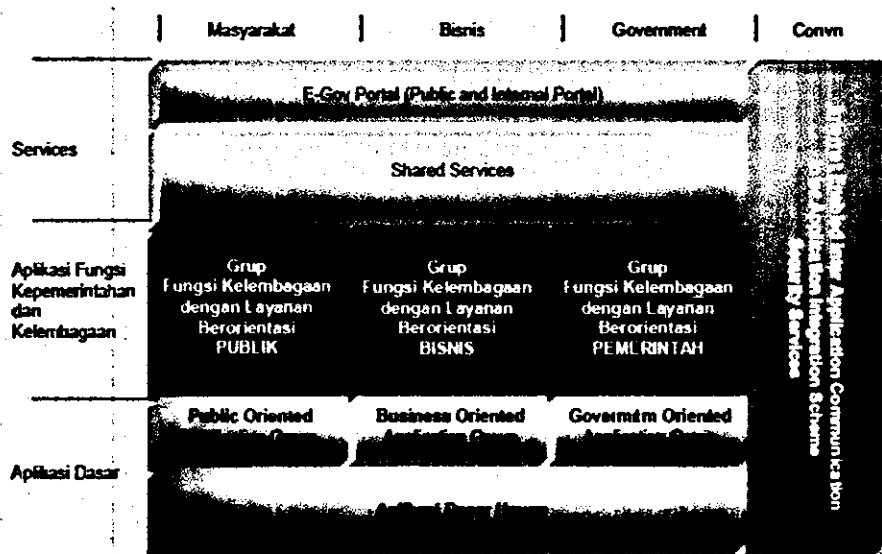
Peningkatan kemampuan sumber daya manusia dibutuhkan dan disesuaikan dengan tugas dan kewajiban dari personil yang bersangkutan. Peningkatan kemampuan personil dapat dilakukan melalui pelatihan-pelatihan maupun studi tingkat lanjut. Seseorang yang mempunyai tanggung jawab terhadap sistem ini semakin lama akan semakin ahli pada bidangnya dan akan semakin bermanfaat jika ia tetap pada pekerjaannya . Dengan demikian diperlukan mekanisme apresiasi yang berbeda bagi mereka. Jalur fungsional pranata komputer yang tugasnya adalah merencanakan, menganalisis

,merancang, mengimplementasikan, mengembangkan dan atau mengoperasikan sistem informasi berbasis komputer

### 2.2.3 Infrastruktur Sistem Informasi /Aplikasi

Desain Arsitekur Aplikasi ideal di dasarkan pada Blueprint Sistem Aplikasi E-Government yang dikeluarkan Kementerian Komunikasi dan Informasi tahun 2004. Dokumen tersebut dikeluarkan untuk dapat menjadi panduan bagi pemerintah daerah dalam mengembangkan aplikasi e-Government yang selaras dengan kebijakan Pemerintah Pusat untuk waktu yang cukup panjang. Diharapkan sistem e-Government yang dikembangkan mengikuti panduan tersebut dapat memenuhi harapan yang diinginkan dan dapat saling bersinergi antara satu dengan yang lainnya.

Blueprint Sistem Aplikasi e-Government sendiri disusun berdasarkan pendekatan fungsional layanan dari sistem pemerintahan yang harus diberikan oleh suatu Pemerintah Daerah kepada masyarakatnya, dan urusan administrasi serta fungsi lain yang berhubungan dengan kelembagaan Pemerintah Daerah, yang diperlukan guna terselenggaranya sistem pemerintahan daerah. Sistem pemerintahan daerah yang diacu dalam dokumen tersebut juga selaras dengan UU No 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.



Jenis layanan dari sistem informasi yang teridentifikasi dapat dikategorikan ke dalam 2 (dua) kategori yaitu:

1. **Front Office**

Kategori sistem informasi yang orientasi fungsinya langsung memberikan pelayanan kepada penggunanya baik itu masyarakat maupun dari kalangan bisnis.

2. **Back Office**

Kategori sistem informasi yang orientasi fungsinya lebih banyak ditujukan untuk memberikan bantuan pekerjaan yang bersifat administrasi pemerintahan, serta fungsi-fungsi kedinasan dan kelembagaan.

Berdasarkan kategori pengguna yang dilayani, masing-masing sistem informasi dapat dibagi kedalam tiga kategori yaitu:

**1. G2C (Government to Citizen)**

Kategori sistem informasi yang melayani kebutuhan dan kepentingan masyarakat.

**2. G2B (Government to Business)**

Kategori sistem informasi yang melayani kebutuhan dan kepentingan kalangan bisnis.

**3. G2G (Government to Government)**

Kategori sistem informasi yang melayani kebutuhan internal lembaga pemerintahan, atau kebutuhan pemerintah daerah lainnya.

Untuk pengembangan dan penyediaan aplikasi-aplikasi tersebut diatas dilakukan melalui 4 tahapan yaitu :

**Penyajian informasi**

Pada tahapan awal ini, pemerintah daerah diharapkan dapat memanfaatkan internet dengan melalui web site resmi pemerintah daerah untuk menampilkan informasi sebanyak mungkin, khususnya informasi-informasi yang dibutuhkan oleh masyarakat umum ataupun dunia usaha. Dalam tahapan penyajian ini, pemerintah daerah juga berkewajiban untuk mengadakan pembenahan-pembenahan internal dalam hal penerapan teknologi informasi di sistem pemerintahan sebagai langkah awal untuk menjamin tingkat kesuksesan pada langkah-langkah berikutnya.

**Interaksi**

Jika pada tahap pertama informasi yang disajikan masih bersifat statis, maka pada tahap kedua pemerintah daerah diharapkan telah dapat menyediakan informasi-informasi yang bersifat dinamis dan interaktif. Dinamis dimaksudkan agar data-data yang ditampilkan pada masyarakat dapat diperoleh secara dinamis melalui berbagai database yang tersedia di pemerintah daerah, sehingga informasi yang diperoleh masyarakat adalah merupakan informasi terkini. Untuk itu pemerintah daerah berkewajiban untuk menyediakan sistem informasi yang handal sebagai back office untuk mendukung terwujudnya hal ini.

**Transaksi**

Tahapan ketiga adalah penyediaan fasilitas untuk dapat melakukan transaksi secam on-line, seperti misalnya e-procurement, pembayaran pajak, surat ijin usaha, dan lain-lain.

Transaksi lain yang terkait dengan pemerintahan. Pada tahapan ini pemerintah daerah berkewajiban untuk menyediakan hukum dan perundangan-undangan yang mendukung, serta juga harus lebih memperkuat sistem kemanan data sehingga memungkinkan penyediaan fasilitas on-line tersebut diatas. Transaksi secara on-line ini juga harus dapat disediakan untuk kebutuhan tukar-menukar data dan informasi antar instansi pemerintahan baik secara horisontal ataupun vertikal.

#### **Interkoneksi antar sistem**

Tahapan terakhir adalah integrasi, dimana pemerintah dituntut untuk dapat mengintegrasikan sistem pemerintahan sebagai satu entiti untuk kemudian diintegrasikan pula dengan sistem-sistem lain yang terhubung.

#### **2.2.4 Infrastruktur Jaringan dan Pendukung Lainnya**

Perwujudan kondisi ideal sangat bergantung pada tersedianya jaringan komputer antar SKPD ataupun ketersediaan yang dapat menghubungkan antara SKPD dengan masyarakat umum. Teknologi jaringan yang dipergunakan adalah dengan menggunakan basis TCP/IP, sedangkan topologinya disesuaikan dengan kondisi masing-masing instansi. Pada dasarnya setiap instansi diharapkan memiliki jaringan internal/lokal instansi untuk mendukung penggunaan aplikasi di masing-masing instansi tersebut. Antar jaringan lokal harus dapat berkomunikasi satu sama lain sehingga dapat membentuk satu kesatuan yang utuh, begitu pula dengan jaringan di kota nantinya. Akses masuk dan keluar informasi dalam jaringan pemerintahan sedapat mungkin dikontrol melalui satu pintu yang dikelola oleh sentral unit pengelola teknologi informasi. Dengan demikian tingkat keamanan data dan jaringan dapat dikelola dengan baik. Dalam pembuatannya, jaringan dapat menggunakan media kabel maupun wireless sesuai dengan kebutuhan.

Kemudian untuk infrastruktur penunjang lain untuk mendukung terwujudnya kondisi ideal dalam penerapan teknologi informasi di pemerintahan adalah tersedianya suplai listrik dan jaringan telekomunikasi yang memadai.

### **BAB III**

#### **ANALISA KONDISI E-GOVERNMENT**

Untuk melakukan evaluasi implementasi TIK perlu digali dan dikaji unsur-unsur yang mempengaruhi pengembangan E-Government. Ada 6 komponen pokok yang digali, yaitu:

##### **1. Perangkat Keras**

Perangkat keras ini meliputi komputer, piranti telekomunikasi, dan peripheral-peripheral, serta piranti lainnya yang diperlukan untuk kelancaran bekerjanya E-Government. Perlu diadakan perangkat keras sesuai dengan fungsinya pada masing-masing bagian seperti misalnya server, workstation, komponen jaringan, peripheral yang diperlukan.

##### **2. Jaringan dan Internet**

Agar didalam proses komunikasi internal maupun external maka jaringan internet sangat diperlukan untuk melengkapi E-Government. Komunikasi internal baik vertikal maupun horizontal disarankan menggunakan sistem jaringan intranet atau LAN.

##### **3. Perangkat Lunak**

Perangkat lunak merupakan komponen utama dalam sistem komputer maupun sistem jaringan (internet, intranet, extranet, dan LAN). Terdapat dua kelompok perangkat keras yaitu perangkat lunak sistem dan perangkat lunak aplikasi. Pemilihan perangkat lunak sistem harus disesuaikan penggunaannya dan sistem yang dibangun serta pula aplikasi-aplikasi apa yang akan digunakan. Pemilihan software aplikasi disesuaikan dengan kebutuhan dan fungsi masing-masing bagian di SKPD (misalnya Aplikasi pemrosesan KTP, aplikasi pemrosesan IMB, aplikasi pemrosesan ijin usaha, dll). Terdapat beberapa cara untuk mendapatkannya yaitu dengan membuat sendiri, paket program atau outsourcing.

##### **4. Data**

Data merupakan bahan utama untuk dijadikan informasi, oleh karena itu validitas dan kekinian data sangat diutamakan oleh karena itu perlu pengelolaan yang betul-betul serius. Untuk keperluan itu data haruslah dikelola sebaik mungkin.

Sumber data dapat dari dalam atau internal yaitu data yang dikumpulkan oleh semua instansi didalam lingkungan Pemerintah Kabupaten Pacitan maupun hasil transaksi didalam layanan kepada masyarakat (penduduk baru, bangunan baru dll). Selain data internal

terdapat juga data eksternal yang dikumpulkan baik dari masyarakat maupun dari petugas yang ditugasi oleh instansi yang terkait atau bahkan dari warehouse.

#### 5. Sumber Daya Manusia (SDM)

Sumber daya manusia yang merupakan tulang punggung pelaksana/pengelola E-Government harus bekerja secara profesional dalam melaksanakan tugasnya. SDM terdiri dari sistem analis, administrator jaringan, administrator database, CIO (Chief of Information Officer), dan operator. Mereka harus ditempatkan pada posisi, sesuai dengan profesinya masing-masing dan sesuai dengan kebutuhan sehingga lebih efisien dan efektif. Dalam perkembangannya SDM harus selalu meningkatkan kemampuannya menyesuaikan perkembangan teknologi informasi.

#### 6. Organisasi Tata Kelola TI

Suatu organisasi yang memanfaatkan TI akan menyesuaikan dengan kemampuan TI. Dengan adanya E-Government dalam pengelolaan pemerintahan, organisasi harus disesuaikan dengan kebutuhan.

Ke-6 komponen pokok tersebut sampai dengan saat ini harus dianalisis letak Kekuatan, Kelemahan, Peluang, dan Ancaman/tantangan yang kita singkat dengan analisis KEKEPAN. Analisis KEKEPAN ini dituliskan berdasarkan hasil survey yang telah dilakukan terhadap sejumlah instansi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pacitan, dan dokumen pendukung yang tersedia di Pemerintah Kabupaten Pacitan. Analisis KEKEPAN dipakai sebagai dasar penentuan rencana kerja seterusnya. Dengan analisis KEKEPAN maka dapat dilakukan evaluasi diri untuk membenahi diri membangun sistem E-Government yang handal dengan akuntabilitas yang tinggi.

### 3.1 Analisa SWOT ( KEKEPAN)

KOMPONEN	KEKUKUHAN	KELEMAHAN	PELIANG	ANCAMAN
Perangkat Keras	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Komputer tersedia sampai di unit kecamatan</li> <li>2. Spesifikasi komputer secara umum sudah cukup layak</li> <li>3. Hampir semua hardware sudah dioperasikan</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Belum dimanfaatkan secara optimal</li> <li>2. Perawatan kurang diperhatikan</li> <li>3. Kebanyakan tidak punya penanggungjawab</li> <li>4. Kebanyakan hanya dipakai untuk administasi</li> <li>5. Ada sebagian komputer masih teknologi lama</li> <li>6. Jaringan intranet/LAN masih terbatas</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Harga hardware relatif semakin murah</li> <li>2. Hardware mudah diupgrade</li> <li>3. Komputer sudah dianggap sebagai kebutuhan standar</li> <li>4. Kemampuan dan dayaguna hardware semakin canggih dan lengkap</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Perkembangan hardware sangat pesat sehingga hardware yang ada cepat ketinggalan jaman</li> <li>2. Kemajuan software menuntut hardware yang canggih</li> <li>3. Kecanggihan suatu hardware menuntut kecanggihan hardware yang lain</li> </ol>

KOMPONEN	KEKUKUHAN	KELEMAHAN	PELIANG	ANCAMAN
Jaringan/ Intemet	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Lingkungan kantor sebagian besar terletak di kompleks kantor bupati</li> <li>1. Ada sistem jaringan terpadu ke DPPA untuk keperluan SIPKD</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kesadaran untuk mengintegrasikan data lewat jaringan masih rendah.</li> <li>2. Belum ada jaringan lokal/Intranet antar SKPD</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Teknologi jaringan sudah murah dan mudah didapat di pasaran</li> <li>2. Pengembangan aplikasi jaringan sudah lebih mudah dan cepat</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Investor lebih tertarik pada pemerintahan yang memanfaatkan TI</li> <li>2. Tuntutan pertukaran informasi yang cepat</li> <li>3. Perkembangan masyarakat dalam menggunakan Internet, lebih banyak informasi di dapatkan dari Web</li> </ol>

KOMPONEN	KELEBIHAN	KELEBIHAN	KELEBIHAN	KELEBIHAN
Perangkat Lunak	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Software aplikasi perkantoran sudah tersedia</li> <li>2. Software aplikasi keuangan sudah tersedia</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Belum dimanfaatkan secara optimal</li> <li>2. Yang banyak digunakan hanya untuk administrasi</li> <li>3. Paket program pengolah data jarang yang dimanfaatkan</li> <li>4. Software aplikasi relatif masih sedikit</li> <li>5. Software aplikasi masih parsial belum terintegrasi</li> <li>6. Belum ada sistem yang terpadu</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Software semakin mudah dipelajari (user friendly)</li> <li>2. Kemampuan software semakin canggih</li> <li>3. Ketersediaan software semakin lengkap</li> <li>4. Banyak penyedia jasa programmer</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Perkembangan software sangat cepat</li> <li>2. Software mutakhir selalu menuntut hardware yang canggih</li> <li>3. Kurangnya kepedulian akan pembajakan perangkat lunak</li> </ol>

KOMPONEN	KELEBIHAN	KELEBIHAN	KELEBIHAN	KELEBIHAN
Data	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Data mudah diperoleh di setiap unit satuan kerja</li> <li>2. Cukup tersedianya tenaga operator di setiap satuan kerja</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Belum ada manajemen data secara digital/elektronis (database)</li> <li>2. Belum ada kejelasan otoritas penggunaan/pemanfaatan data</li> <li>3. Belum ada kesadaran akan UU HAKI.</li> <li>4. Belum ada standarisasi format data.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Adanya keinginan dari setiap person untuk memanfaatkan TI dalam pekerjaannya</li> <li>2. Adanya political will yang bagus dari atas</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kurangnya keterbukaan tiap satuan kerja akan akses data.</li> </ol>

KOMPONEN	KEGUNAAN	KELEBIHAN	KEKURANGAN	ALTERNATIF
SDM	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Banyak pegawai yang sudah menguasai komputer dasar</li> <li>2. Punya keinginan untuk maju</li> <li>3. Jumlah cukup memadai</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. SDM yang memiliki kemampuan komputer rata-rata masih setingkat operator.</li> <li>2. Kurang literate terhadap teknologi</li> <li>3. Belum ada pakar analisis dan desain sistem.</li> <li>4. Penguasaan teknologi informasi masih kurang.</li> <li>5. Kurangnya tenaga analisis di setiap satuan kerja.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. SDM yang ada bisa ditingkatkan kemampuannya dengan diadakan pelatihan</li> <li>2. Banyak sumber/narasumber pembelajaran</li> <li>3. Teknologi Informasi semakin siap pakai dan berdayaguna</li> <li>4. Komputer/Perangkat lunak semakin mudah dipelajari (user friendly)</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Persaingan makin tajam</li> <li>2. Perkembangan Teknologi Informasi sangat pesat</li> <li>3. Kurangnya Penguasaan/pemanfaatan Teknologi Informasi akan tertinggal</li> <li>4. Kebergantungan SDM akan produk-produk bajakan</li> </ol>

KOMPONEN	KEGUNAAN	KELEBIHAN	KEKURANGAN	ALTERNATIF
Organisasi dan Tatakelola	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Adanya kesadaran pentingnya komunikasi</li> <li>2. Adanya kesadaran pentingnya keterpaduan pelayanan</li> <li>3. Lokasi satuan kerja relatif dekat dengan kompleks kantor bupati</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Komunikasi antar bidang kurang terbuka</li> <li>2. Program Kerja kurang terkoordinir (terkesan jalan sendiri-sendiri)</li> <li>3. Kepakaran dalam bidang TI antar bidang tidak merata</li> <li>4. political will dari pimpinan daerah untuk menyelenggarakan E-Government masih kurang</li> <li>5. Dualisme SKPD pengelola TI</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kemajuan Teknologi Informasi yang canggih dan berdayaguna</li> <li>2. Banyak pakar mengembangkan E-Government</li> <li>3. Sudah banyak contoh E-Government yang terimplementasi</li> <li>4. Otonomi Daerah</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tuntutan kecepatan pelayanan untuk masyarakat</li> <li>2. Masyarakat semakin kritis</li> <li>3. Penyediaan Data/Informasi yang tidak akurat, tidak konsisten, dan tidak tepat waktu akan menurunkan wibawa pemerintahan</li> </ol>

## 3.2 Identifikasi Kebutuhan

### 3.2.1 Infrastruktur

Infrastruktur jaringan di kompleks Kantor Bupati Pemerintah Kabupaten Pacitan secara umum belum saling terhubung. Untuk komunikasi data (WAN) masih menggunakan media internet.

Untuk mendukung infrastruktur kebutuhan pengembangannya adalah :

- Jaringan intranet terintegrasi antar SKPD.
- Pusat data/datacenter komputer yang dilengkapi dengan fasilitas sesuai dengan spesifikasi datacenter.
- Network Operation Center (NOC) sebagai pusat pengelolaan internet.

- d. Peningkatan kehandalan jaringan backbone/utama di kompleks kantor bupati dengan penggunaan media fiber optik.
- e. Peningkatan kapasitas server untuk memfasilitasi sistem yang akan diintegrasikan. Beberapa satuan kerja sudah memiliki komputer yang cukup, dan digunakan untuk pengolahan data yang penting, tetapi tidak mempunyai server khusus untuk penyimpanan data tersebut.
- f. Upgrade komputer dan penggunaan sistem operasi yang legal.

### 3.2.2 Sistem Informasi

Berdasar hasil analisis KEKEPAN/SWOT, dalam aspek sistem informasi, maka dapat dilakukan analisa akan kebutuhan dalam implementasi E-Government pada Kabupaten Pacitan. Analisis kebutuhan tersebut dapat diuraikan dalam poin-poin sebagai berikut:

- a. Kebutuhan berkaitan dengan sistem informasi.
- b. Kebutuhan akan aplikasi-aplikasi sistem informasi manajemen *backoffice* pemerintahan.
- c. Kebutuhan akan aplikasi-aplikasi sistem informasi untuk pelayanan publik.
- d. Kebutuhan akan sistem pengaduan via peralatan komunikasi mobile, seperti SMS, *mobile apps* dan lain-lain.
- e. Kebutuhan akan aplikasi web, yang berfungsi sebagai portal informasi dan sekaligus sarana promosi potensi daerah.
- f. Kebutuhan akan sistem penanganan keamanan (*security*) pada sentra-sentra pengolahan/penyimpanan data.
- g. Kebutuhan akan aplikasi untuk monitoring, administrasi dan *backup* data.
- h. Kebutuhan berkaitan dengan data.
- i. Kebutuhan akan definisi dan batasan teknologi untuk pertukaran data antar sistem.
- j. Kebutuhan akan data referensi/acuan, yang digunakan dalam berbagai sistem/aplikasi.
- k. Kebutuhan akan integrasi database.

Dari hasil survey, beberapa SKPD juga menginformasikan kebutuhan aplikasi komputer untuk menunjang kegiatan operasional. Daftar kebutuhan aplikasi sebagai berikut :

Ko.	SKPD	Kebutuhan Penunjang Kegiatan Operasional
1	Badan Kepegawaian Daerah	1. Pengembangan website SKPD untuk menampilkan informasi kepegawaian 2. Aplikasi surat-menyurat untuk menerima administrasi surat-menyurat.
2	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Kebutuhan aplikasi web untuk informasi terkait penanaman kebangsaan dan keamanan masyarakat
3	Badan Penelitian, Pengembangan dan Statistik Kabupaten	1. Kebutuhan aplikasi database penelitian dan pengkajian 2. Aplikasi surat elektronik
4	Bagian Administrasi Kesra Setda	Kebutuhan aplikasi komputer untuk mengelola persuratan
5	Bagian Hukum	Website yang dikelola mandiri
6	Bappeda	1. Bank data perencanaan pembangunan terpusat 2. Aplikasi untuk mendelegasi tugas 3. Referensi bank data yang diinginkan, seperti yang diimplementasikan di Bappeda Malang
7	BPBD Kabupaten Pacitan	1. Kebutuhan aplikasi data base penelitian dan pengkajian (Kelitbangan) 2. Aplikasi surat elektronik
8	BPM-PP	1. webserve dan hosting web 2. E- Arsip 3. SI penanaman modal
9	Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Kebersihan	Sistem informasi tata ruang
10	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda Dan Olahraga	1.aplikasi persuratan 2. Aplikasi mobile pariwisata 3. Sistem approval aplikasi perizinan usaha wisata
11	Dinas Kelautan dan Perikanan	Website untuk pengelolaan dan menampilkan data potensi daerah kelautan dan perikanan
12	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Aplikasi untuk mengelola persuratan dan disposisi
13	Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan	1. Kebutuhan aplikasi web untuk pengelolaan dan penampilan data potensi daerah 2. Kebutuhan aplikasi komputer untuk pengelolaan persuratan dan disposisi 3. Kebutuhan aplikasi untuk informasi industri, kuliner, dan budaya

14	Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Aplikasi e-Ticketing berbasis web</li> <li>2. Aplikasi GIS jalur transportasi</li> <li>3. Aplikasi pengelolaan informasi publik</li> </ol>
15	Dinas Pertambangan dan Energi	Potensi air tanah/pengolahan jarak jauh, sistem informasi sumber daya alam, one men policy
16	Dinas Tanaman Pangan dan Peternakan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Aplikasi untuk kepegawaian</li> <li>2. Aplikasi data potensi daerah</li> <li>3. Aplikasi pemetaan bidang pertanian</li> </ol>
17	DPPKA	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kebutuhan aplikasi untuk pengelolaan data pajak daerah dan retribusi daerah</li> <li>2. Aplikasi management surat masuk dan surat keluar</li> <li>3. Aplikasi pengelolaan sumber daya manusia</li> </ol>
18	Inspektorat	<ul style="list-style-type: none"> <li>- kebutuhan aplikasi untuk memantau hasil tindak lanjut LHP</li> <li>- Aplikasi untuk surat-menyurat dan disposisi</li> </ul>
19	Kantor Kec. Tegalombo	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Aplikasi web</li> <li>2. Aplikasi administrasi perkantoran</li> </ol>
20	Kantor Kecamatan Pacitan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Aplikasi web (link) kecamatan dengan desa untuk informasi data dan surat menyurat</li> <li>2. Aplikasi kecamatan dengan kabupaten terkait surat menyurat dan kepegawaian</li> </ol>
21	Kantor Ketahanan Pangan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kebutuhan aplikasi komputer untuk mengelola persuratan , kepegawaian</li> <li>2. kebutuhan aplikasi/mobile untuk informasi ketersediaan dan akses pangan sampai tingkat desa</li> </ol>
22	Kantor Lingkungan Hidup	aplikasi komputer untuk mengelola keuangan, pengelolaan laboratorium/TPA, pengelolaan arsip kepegawaian.
23	Kantor Pendidikan dan Pelatihan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Aplikasi akuntansi</li> <li>2. Aplikasi barang dan aset</li> <li>3. Aplikasi perencanaan dan monev</li> <li>4. Aplikasi persuratan</li> </ol>
24	Kecamatan Donorojo	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pelayanan persuratan melalui email ke desa se-Kecamatan Donorojo</li> <li>2. Kebutuhan aplikasi web tiap desa untuk menampilkan potensi dan pembangunan di desa</li> <li>3. Kebutuhan aplikasi komputer</li> </ol>

		untuk pelayanan administrasi yang terintegrasi dengan data SIAK
25	Kecamatan Kebonagung	1. Kebutuhan aplikasi web untuk pengelolaan dan menampilkan data potensi daerah 2. Kebutuhan aplikasi komputer untuk mengelola persuratan dan disposisi 3. Kebutuhan aplikasi mobile untuk informasi wisata, kuliner dan budaya
26	Kecamatan Nawangan	1. Aplikasi tata naskah dinas 2. Aplikasi kepegawaian 3. Aplikasi gaji 4. Aplikasi Renja SKPD 5. Aplikasi Musrenbang Kecamatan 6. Aplikasi pemerintahan dan potensi desa
27	Kecamatan Ngadirojo	1. Kebutuhan aplikasi sistem informasi terkoneksi dengan desa-desa se Kecamatan 2. Kebutuhan aplikasi administrasi perkantoran
28	Kecamatan Punung	Aplikasi pengelolaan surat masuk dan keluar untuk mempermudah pengarsipan
29	Satuan Polisi Pamong Praja	1. Kebutuhan Aplikasi Web untuk pelaporan trantibmas 2. Kebutuhan aplikasi pengelolaan persuratan 3. Sistem Informasi Kepegawaian

### 3.2.3 Organisasi dan Sumber Daya Manusia

Untuk mendukung pengembangan teknologi informasi di Pemerintah Kabupaten Pacitan maka diperlukan sumber daya manusia yang memadai, baik dari kemampuan(skill) maupun penghargaan organisasi terhadapSDM-nya. Beberapa hal yang perlu diperhatikan agar PemerintahKabupaten Pacitan menjadi organisasi yang solid, efektif dan efisien dalam pengelolaan TIK, antara lain:

1. Organisasi Pengelola TIterpadu yang solid.
2. Lingkungan kerja yang kondusif,
3. Pelatihan dan pengembangan *skill*, spesialisasi pekerjaan, jenjang karir, dan sistem reward.
4. Kebijakan TIK

## **BAB IV VISI MISI DAN STRATEGI**

### **4.1 Visi Dan Misi TIK**

Penentuan visi misi teknologi informasi dan komunikasi atau disebut sebagai **VISI MISI TIK** dilakukan berlandaskan **VISI dan MISI** dari Kabupaten Pacitan.

#### **Visi Kabupaten Pacitan :**

Terwujudnya Masyarakat Pacitan yang Sejahtera

#### **Misi:**

- Profesional birokrasi dalam rangka meningkatkan pelayanan prima dan mewujudkan tata pemerintahan yang baik.
- Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat
- Meningkatkan akses dan kualitas pendidikan masyarakat.
- Meningkatkan pertumbuhan dan pemerataan ekonomi yang bertumpu pada potensi unggulan.
- Pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar
- Mengembangkan tatanan kehidupan masyarakat yang berbudaya, berkepribadian dan memiliki keimanan serta memantapkan kerukunan umat beragama

Berdasarkan Visi Misi tersebut penjabaran **VISI MISI TIK** Kabupaten Pacitan adalah “

“Penerapan teknologi informasi terintegrasi yang handal guna mendukung tata kelola pemerintahan yang baik menuju masyarakat Pacitan yang sejahtera”

Maka dengan demikian, visi tersebut akan menjadi dasar dan tolok ukur seluruh pengembangan TIK di wilayah Kabupaten Pacitan. Untuk mencapai kondisi tersebut, maka perlu dirumuskan misi TIK yang tidak terlepas dari visi TIK tersebut. Misi TIK Kabupaten Pacitan sebagai berikut:

1. Mewujudkan Implementasi TIK sebagai pendorong terwujudnya tata pemerintahan yang baik .
2. Mewujudkan Implementasi teknologi informasi secara terpadu dan berkelanjutan untuk meningkatkan pelayanan kesehatan dan pendidikan yang lebih baik

3. Mewujudkan Implementasi TIK guna mendukung pertumbuhan ekonomi masyarakat .

## 2.2 Strategi Pengembangan TIK

Menuju ke penguasaan terhadap teknologi informasi, bukanlah hal yang sederhana. Hal ini disebabkan karena lingkup penerapan yang luas, kecepatan perkembangan teknologi informasi, dan aspek manusia sebagai pengguna teknologi. Dengan memperhatikan hal-hal tersebut, maka perlu adanya sebuah strategi yang tepat dalam mengembangkan teknologi informasi . Strategi yang diusulkan adalah sebagai berikut:

### Umum :

1. Mengembangkan sistem pelayanan yang andal, terpercaya serta terjangkau masyarakat luas. Sasarannya antara lain, perluasan dan peningkatan kualitas jaringan komunikasi ke seluruh wilayah negara dengan tarif terjangkau. Sasaran lain adalah pembentukan portal informasi dan pelayanan publik yang dapat mengintegrasikan sistem manajemen dan proses kerja satuan kerja Pemerintah.
2. Menata sistem dan proses kerja Pemerintah Daerah otonom secara holistik. Dengan strategi ini, Pemerintah berupaya menata sistem manajemen dan prosedur kerja agar dapat mengadopsi kemajuan teknologi informasi secara cepat.
3. Memanfaatkan teknologi informasi secara optimal. Sasaran yang ingin dicapai adalah standardisasi yang berkaitan dengan interoperabilitas pertukaran dan transaksi informasi antarportal Pemerintah. Standardisasi dan prosedur yang berkaitan dengan manajemen dokumen dan informasi elektronik. Pengembangan aplikasi dasar seperti *e-billing*, *e-procurement*, *e-reporting* yang dapat dimanfaatkan setiap situs Pemerintah untuk menjamin keamanan transaksi informasi dan pelayanan publik. Sasaran lain adalah pengembangan jaringan intra Pemerintah.
4. Meningkatkan peran serta dunia usaha dalam pengembangan industri telekomunikasi dan teknologi informasi. Sasaran yang ingin dicapai adalah adanya partisipasi dunia usaha dalam mempercepat pencapaian tujuan strategis E-Government. Itu berarti, pengembangan pelayanan publik tidak perlu sepenuhnya dilayani oleh Pemerintah.
5. Mengembangkan kapasitas dan kualitas sumber daya manusia di lingkup Pemerintah Kabupaten disertai dengan meningkatkan *e-literacy* masyarakat.

6. Melaksanakan pengembangan secara sistematis melalui tahapan yang realistis dan terukur dalam pengembangan E-Government, yaitu persiapan, pematangan, pemantapan dan pemanfaatan.

**Khusus :**

1. Menempatkan penerapan E-Government sebagai salah satu aspek strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan. Hal ini membawa konsekuensi perlunya kemauan politis dari para pengambil kebijakan.
2. Perlu adanya kebijakan yang bersifat menyeluruh dan lintas sektoral tentang penerapan E-Government di lingkungan Pemerintah. Kebijakan ini seharusnya masuk dalam rencana strategis (renstra) yang menjadi pedoman bagi tiap aktivitas penerapan E-Government.
3. Melihat kenyataan bahwa saat ini masalah dana adalah a utama dalam pembangunan nasional dan daerah, maka rencana strategis yang disusun harus memungkinkan diberlakukannya skala prioritas. Dengan kata lain, penerapan E-Government dapat dilakukan secara bertahap sesuai dengan urgensinya.
4. Otonomi daerah mengisyaratkan kemandirian. Dalam konteks ini, kemandirian juga mencakup pengelolaan informasi. Apalagi kecenderungan yang ada adalah bahwa teknologi informasi semakin merasuk ke berbagai aspek kehidupan manusia. *Self-empowerment* hanya dapat dilakukan bila didukung oleh SDM yang tangguh. Penyiapan SDM yang kompeten menjadi hal yang mutlak harus dilakukan.
5. Pemilihan teknologi dan sistem informasi tepat guna dan sesuai dengan kebutuhan dan kondisi daerah.
6. Kerjasama jangka panjang dengan berbagai pihak (vendor dan perguruan tinggi).

## **4.2 Prioritas Pengembangan TIK**

Dengan menerjemahkan Visi Misi Teknologi Informasi dan Komunikasi, mempertimbangkan aspirasi dari pihak eksekutif dan masing-masing unit kerja, serta dari hasil analisa kondisi saat ini, berikut prioritas pengembangan TIK yang perlu dilakukan :

1. Dimensi Kelembagaan dan sumber daya manusa (SDM)
  - a. Prioritas pertama adalah memperkuat struktur kinerja pengelola TIK
  - b. Prioritas selanjutnya adalah peningkatan kapasitas dan kemampuan SDM yang akan menjalankan TIK melalui proses penambahan, pelatihan maupun sertifikasi.
  - c. Prioritas selanjutnya adalah melakukan proses monitoring, evaluasi dan audit terhadap penyelenggaraan TIK.
2. Dimensi Sistem Informasi
  - a. Prioritas pertama pengembangan aplikasi akan diprioritaskan pada aplikasi-aplikasi internal di masing-masing SKPD, kemudian aplikasi yang akan digunakan oleh pimpinan dan aplikasi yang akan dapat diakses oleh masyarakat.
  - b. Prioritas selanjutnya adalah pengembangan aplikasi-aplikasi yang melibatkan kolaborasi dan integrasi kinerja antar SKPD
  - c. Prioritas ketiga adalah pengembangan aplikasi-aplikasi yang akan menjadi tulang punggung peningkatan potensi daerah dan minat investasi ke kabupaten Pacitan.
3. Dimensi Infrastruktur
  - a. pengembangan infrastruktur akan diprioritaskan terlebih dahulu pada pemenuhan perangkat kerja terlebih dahulu.
  - b. Penguatan jaringan dan internet di komplek kantor Bupati dan jaringan antar SKPD
  - c. Pengembangan data center sesuai standar data center
  - d. Pembuatan pusat pemulihan data (*data recovery center*)

## **4.4 Faktor Kunci Keberhasilan**

Untuk melaksanakan program pengembangan Teknologi Informasi di Kabupaten Pacitan perlu dirumuskan beberapa faktor penentu yang mendukung keberhasilan dan memecahkan berbagai masalah yang

menghambat pelaksanaan E-Government Kabupaten Pacitan secara umum, antara lain:

**1. Kepemimpinan**

Dalam pelaksanaan E-Government sangat dibutuhkan adanya dorongan maupun komitmen dari pimpinan dalam memotivasi dan memberikan contoh pelaksanaannya.

**2. Kebijakan**

Dibutuhkan kebijakan yang sifatnya lintas sektoral dan nuansa kesepakatan dari kalangan Pemerintah dan *stakeholder*-nya untuk saling membagi dan tukar menukar informasi dalam kegiatan sehari-hari.

**3. Infrastruktur**

Dalam level implementasi, perangkat keras seperti komputer, jaringan dan infrastruktur akan menjadi faktor teramat sangat penting dalam penerapan E-Government. Secara ideal memang harus tersedia infrastruktur yang dapat menunjang target atau prioritas pengembangan E-Government yang telah disepakati. Namun secara pragmatis, harus pula dipertimbangkan potensi dan kemampuan atau status pengembangan infrastruktur telekomunikasi di lokasi terkait.

**4. Tingkat Konektivitas dan Penggunaan TI**

Tingkat konektivitas dan penggunaan Teknologi Informasi yang tinggi dalam kehidupan sehari-hari menggambarkan kesiapan Pemerintah dan masyarakat dalam menerima E-Government.

**5. Sumber Daya Manusia**

Diperlukan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi dan keahlian dalam teknologi informasi untuk menunjang pelaksanaan E-Government. Semakin tinggi tingkat kompetensi dan keahlian SDM di Pemerintah, semakin siap dalam menerapkan konsep E-Government.

**6. Ketersediaan Dana dan Anggaran**

Program E-Government harus didukung dengan sumber daya finansial yang mencukupi, untuk investasi, biaya operasional, biaya pemeliharaan dan pengembangannya.

## 7. Perangkat Hukum

Konsep E-Government sangat terkait erat dengan usaha penciptaan dan pendistribusian data/informasi dari satu pihak ke pihak lain, masalah keamanan data/informasi dan hak cipta intelektual merupakan hal yang perlu dilindungi oleh undang-undang atau peraturan hukum yang berlaku.

## 8. Perubahan Paradigma

Pada hakekatnya, penerapan E-Government adalah merupakan suatu program perubahan manajemen (*change management*) yang membutuhkan adanya keinginan untuk merubah paradigma dan cara berfikir. Perubahan paradigma dibutuhkan kesadaran dan keinginan untuk merubah cara kerja, bersikap, perilaku dan kebiasaan sehari-hari.

## BAB V GAP ANALYSIS

*Gap analysis* merupakan salah satu alat bantu yang dapat digunakan untuk mengevaluasi kinerja pemerintah daerah, khususnya dalam upaya penyediaan pelayanan publik yang prima. Hasil analisis tersebut dapat menjadi input yang berguna bagi perencanaan dan penentuan prioritas anggaran di masa yang akan datang dalam rangka mewujudkan good government. Selain itu, *gap analysis* atau analisis kesenjangan juga merupakan salah satu langkah yang sangat penting dalam tahapan perencanaan maupun tahapan evaluasi. Metode ini merupakan salah satu metode yang umum digunakan dalam pengelolaan manajemen internal suatu lembaga. Secara harafiah kata "gap" mengindikasikan adanya suatu perbedaan (*disparity*) antara satu hal dengan hal lainnya. Berikut 3 domain yang dalam kajian ini coba untuk diidentifikasi.

### 5.1 Sistem Informasi

No	Aspek	Kondisi Saat Ini	Kondisi Mendatang
1	Fitur	<ul style="list-style-type: none"><li>• Pengembangan beberapa aplikasi "draping system" dari pusat</li><li>• Aplikasi draping</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Penyesuaian fitur sesuai dengan kebutuhan user dan stakeholder internal pemda</li><li>• Aplikasi yang dikembangkan secara mandiri dengan data</li></ul>

		<p>masih perlu dilakukan <i>tricky</i> untuk bisa mendapatkan output yang dibutuhkan internal</p>	<p>mandiri sesuai dengan kebutuhan internal, dengan masih mempertimbangkan kebutuhan pusat dan bisa terintegrasi dengan data pusat</p>
2	Implementasi	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pendampingan dan fungsi <i>helpdesk</i> belum memadai</li> <li>• Belum ada support berkelanjutan dari internal terhadap implemetasi</li> <li>• Belum ada dukungan anggaran yang berkelanjutan untuk sistem informasi yang sudah dikembangkan</li> </ul>	<p>Fungsi pendampingan bisa meningkat, dengan mengalokasikan personil dan staff khusus. Baik secara online maupun mekanisme bimtek offline</p>
3	integasi	<p>Aplikasi existing masih tersebar secara parsial, dan masih minim keterpaduan data</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Membangun peta data primer dan kewenangan di masing-masing data primer, sehingga setiap unit kerja sudah terpetakan data primernya</li> <li>• Minimnya redundansi data bahkan hilang</li> </ul>

4	Standarisasi	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Standar pengembangan aplikasi masih belum cukup masih diterapkan di SKPD</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Taat regulasi dan standar pengembangan aplikasi yang umum diterapkan dalam literatur</li> <li>• Delivery sistem dari vendor pengembang yang tertib dan terdokumentasi dengan baik</li> <li>• Pengetahuan vendor bisa didapatkan seutuhnya, sehingga kendala operasional pasca kontrak berakhir tidak berdampak buruk</li> </ul>
---	--------------	--	--

## 5.2 Infrastruktur

No	Infrastruktur	Kondisi Saat Ini	Kondisi Mendatang
1	Jaringan Intranet	LAN di di SKPD belum terpasang secara merata	Pengadaan jaringan terintegrasi menggunakan kabel maupun wireless
2	Jaringan Intranet fiber optik	Belum ada	Perlu penambahan jaringan intranet fiber optik di lingkungan kantor bupati dan SKPD sekitarnya
3	Koneksi Internet	Koneksi internet belum merata	Perlu penambahan koneksi dan utilisasi bandwidth internet
4	Perangkat Komputer	Masih belum memenuhi seluruh kebutuhan	Perlu dilakukan penambahan sesuai dengan permtukan kebutuhan
5	Data Center	Sudah ada	Perlu pembenahan rnang data center sesuai standar datacenter Perlu pemusatan pengelolaan data center
6	DRC	Belum ada	Perlu dibuat DRC

7	Jaringan LAN di SKPD	Jaringan tidak terstandar	Perlu standarisasi instalasi jaringan
---	----------------------	---------------------------	---------------------------------------

### 5.3 Sumber Daya Manusia

No	Aspek	Kondisi Saat Ini	Kondisi Mendatang
1	Penyiapan SDM	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sudah ada tetapi tingkat kemampuan belum merata</li> <li>• Masih terbatasnya lulusan komputer yang mau berkarir di pemerintahan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Perbaiki dalam mekanisme penyiapan SDM</li> <li>• Perbaiki mekanisme penempatan SDM sesuai dengan latar belakang pendidikan dan keahlian</li> </ul>
3	Pelatihan	Minimnya pelatihan SDM dan atau bimtek di bidang TIK yang berkelanjutan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Peningkatan volume anggaran dan kuota untuk bimtek TIK untuk seluruh SKPD</li> <li>• Mengundang narasumber yang berkompeten dibidangnya</li> </ul>
4	Pengelolaan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengelolaannya masih parsial di masing-masing SKPD</li> <li>• Belum terpadu dan terintegrasi di SKPD yang berwenang mengelola SDM</li> </ul>	Sistem pengelolaan SDM yang terpadu dan terintegrasi

## **BAB 6**

### **ARISTEKTUR DAN PENGEMBANGAN TIK**

#### **6.1 INFRASTRUKTUR E-GOVERNMENT**

Konsep pengembangan infrastruktur diarahkan kepada pemanfaatan semaksimal mungkin sumberdaya informasi yang telah ada sebagai modal utama dalam mengembangkan E-Government. Pengembangan E-Government pada setiap lembaga, selain akan meningkatkan pemanfaatan sistem informasi yang dimiliki, juga diharapkan meningkatkan layanan publik dan operasional pengelolaan pemerintahan secara lebih efektif dan efisien.

Infrastruktur jaringan komunikasi data (jaringan komputer) dalam pembentukan E-Government sangat dibutuhkan dan menjadi salah satu prioritas. Dengan menggunakan jaringan komputer pertukaran data dan informasi menjadi lebih cepat dan biaya yang jauh lebih rendah dibandingkan proses pertukaran data dan informasi secara manual. Fungsi jaringan komputer yang dapat diterapkan untuk mendukung E-Government:

##### **1. Data sharing**

Data yang terdapat pada satu komputer dapat digunakan atau diproses juga oleh komputer yang lainnya. Dengan sistem jaringan, maka dapat dengan mudah komputer yang satu saling bertukar data dengan komputer lainnya.

##### **2. Software resource**

Program yang terdapat pada satu komputer dapat digunakan juga oleh komputer lainnya. Dengan *software sharing*, memungkinkan semua komputer terhubung dalam satu program.

##### **3. Resource sharing**

Penggunaan perangkat keras secara bersama-sama sehingga tidak memerlukan pemasangan setiap perangkat keras ke setiap unit komputer. Contohnya penggunaan printer, ataupun scanner.

##### **4. Koneksi antar dinas**

Koneksi antar dinas dapat mempermudah komunikasi dan penggunaan sistem informasi secara bersama-sama. Jenis komunikasi dapat berbasis suara (*voice*), teks, atau *video conference*. Dengan menggunakan fasilitas ini dapat mengurangi biaya penggunaan telepon ataupun biaya lainnya.

## 5. Koneksi internet.

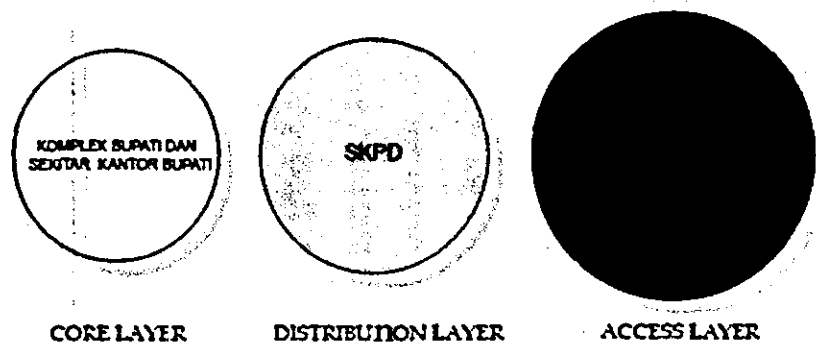
Dengan adanya jaringan komputer dan terhubung dengan internet, memungkinkan pegawai memperoleh atau bertukar informasi melalui internet, dan dapat mempercepat kegiatan dinas yang dilakukan dinas lain diluar daerah. Hubungan dengan kantor-kantor dinas yang jauh dapat dipersingkat melalui internet, tidak perlu harus datang dan mengirim surat secara manual.

## 6.2 ARSITEKTUR INFRASTRUKTUR

### 6.2.1 Infrastruktur Jaringan

Sebagai daerah yang memiliki wilayah yang luas dan beragam konturnya, konsep arsitektur jaringan untuk wilayah pemerintah menggunakan *Hierarchical Internet Working Model*. Model ini mempermudah membangun antar jaringan secara handal, mudah di-upgrade serta dengan biaya yang lebih terjangkau karena tidak fokus pada konstruksi paket tetapi fokus pada tiga fungsional area atau lapisan jaringan, yaitu:

- *Core layer* (lapisan inti)
- *Distribution layer* (lapisan distribusi)
- *Access layer* (lapisan akses)



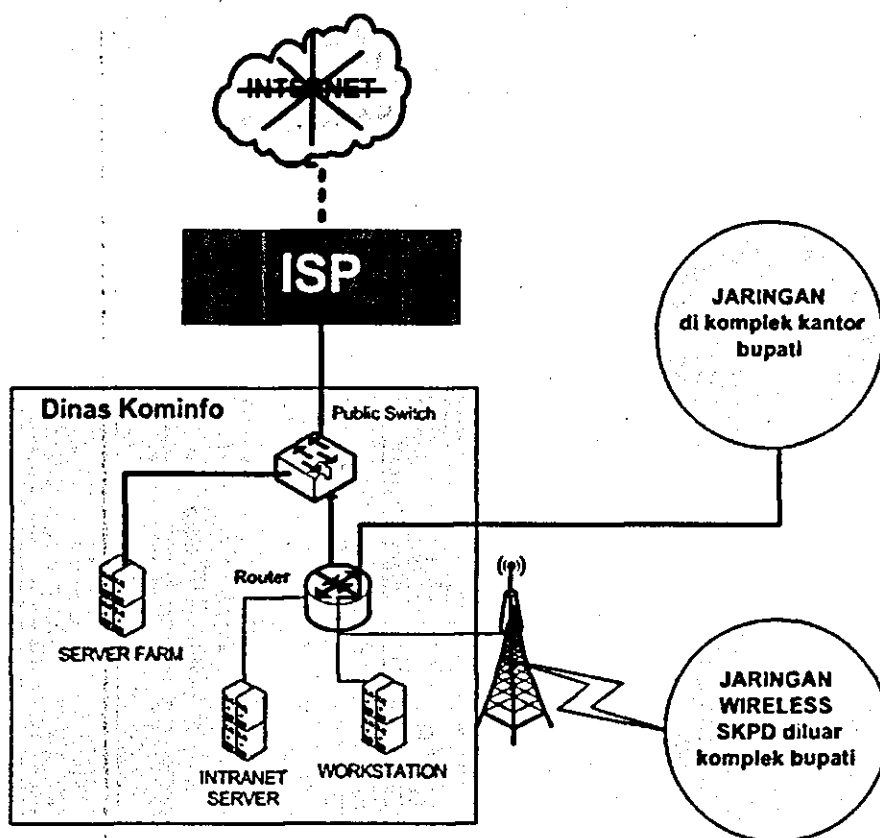
Gambar Model Pengembangan Jaringan

*Core layer*, dikembangkan untuk dinas-dinas yang membutuhkan akses data yang tinggi. Untuk jaringan *backbone* di *core layer* ini bisa menggunakan jaringan fiber optik, utp dan *wireless*

- Inti (*Core layer*) adalah jaringan komunikasi yang mencakup kantor instansi pemerintah yang memiliki proses komunikasi yang sangat tinggi/ penting, seperti kantor bupati, SKDP yang ada dikomplek kantor bupati.

- **Distribusi (Distribution layer)** adalah untuk kantor instansi teknis/SKPD
- **Akses (Access Layer)** adalah untuk kantor pemerintah dan kantor-kantor lain yang berhubungan dengan kepentingan pemerintah seperti rumah sakit, puskesmas, sekolah dan lain-lain

Saat ini gedung yang ada di kompleks Kabupaten belum terhubung jaringan intranet. Untuk menjaga kehandalan jaringan dan kebutuhan komunikasi data yang akan bertambah besar, maka kedepannya jaringan antar gedung di kompleks kantor bupati perlu dipasang jaringan intranet menggunakan fiber optik.



Gambar Model Pengembangan Jaringan di Pemda

Gambar diatas menunjukkan pengembangan infrastruktur jaringan komunikasi data di Pemda . Teknologi yang dipakai dalam pengembangan jaringan tersebut dibagi :

1. **Fiberoptik:** Menghubungkan dinas-dinas yang memerlukan akses data yang berada di kompleks Pemda dan SKPD yang ada di area kompleks kantor Bupati dan satuan kerja disekitarnya. Untuk

pengembangan fiber optik dapat dilakukan secara bertahap dengan pembangunan berdasarkan *backbone*

2. Wireless LAN : Menghubungkan Satuan kerja, dan institusi lain diluar kompleks Bupati
3. LAN cable utp: Menghubungkan komputer-komputer yang ada dalam satu gedung/ruangan.

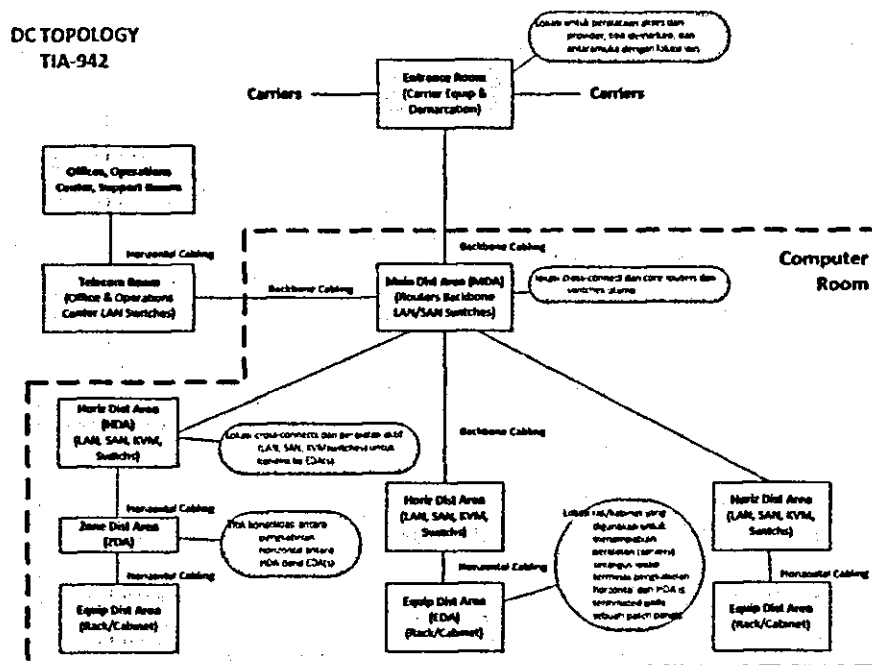
### 6.2.2 Data Center

Data center yang handal diperlukan untuk mendukung implementasi e-Government. Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika yang nantinya akan menjadi pusat *leading sector* pengelolaan teknologi informasi, selayaknya perlu dibangun data center yang handal untuk menampung semua server dari semua dinas dan lembaga yang ada di Pemda Pacitan.

Dengan *data center* terpusat yang terpusat mempunyai keuntungan :

1. Dinas-dinas atau lembaga pemerintahan dapat lebih fokus pada tugas utamanya dan meminimalkan kompleksitas IT
2. Dinas tidak lagi dipusingkan dengan masalah *server crash*, pemutakhiran teknologi ataupun *hardware, cabling, connection*, dan proses pemeliharannya.

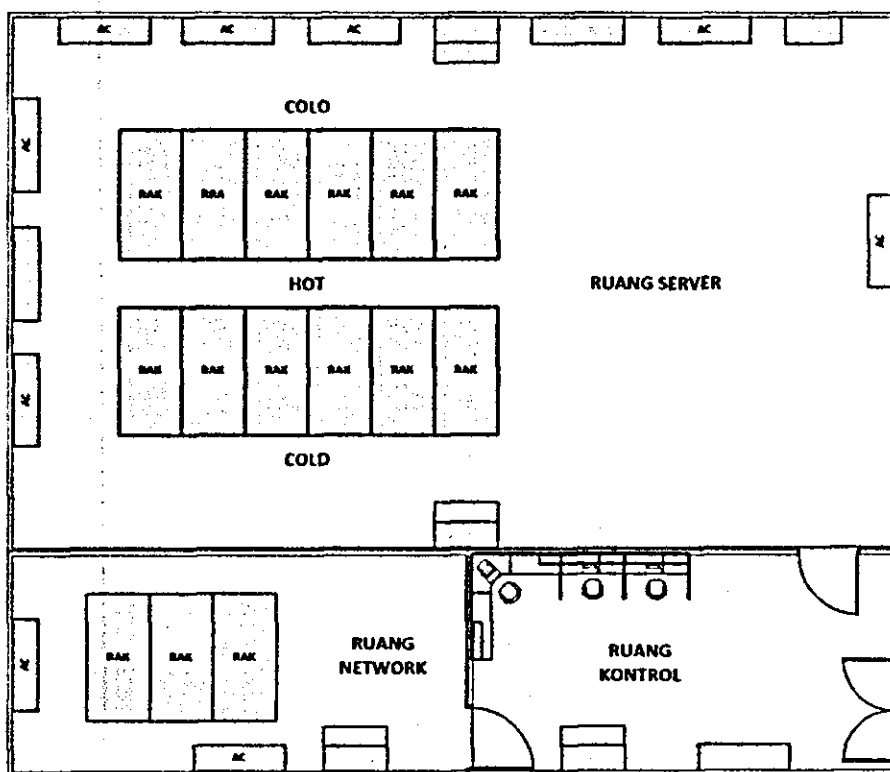
Topologi *datacenter* sesuai TIA-942 (*Telecommunication Industry Association*) adalah sebagai berikut :



Gambar 2 Topologi Data Center TIA-942

1. **Entrance Room (ER)**, lokasi untuk peralatan akses dari *provider*, titik demarkasi, dan antaramuka dengan lokasi lain.
2. **Main Distribution Area (MDA)**, lokasi *cross-connect* dan *core routers* dan *switches* utama.
3. **Horizontal Distribution Area (HDA)**, lokasi *cross-connects* dan peralatan aktif (LAN, SAN, KVM switches) untuk koneksi ke *Equipment Distribution Area (EDA)*.
4. **Zone Distribution Area (ZDA)**, titik konsolidasi antara pengkabelan horizontal antara HDA dan EDA.
5. **Equipment Distribution Area (EDA)**, lokasi rak/kabinet yang digunakan untuk menempatkan peralatan (*servers*) sekaligus lokasi terminal pengabelan horizontal dari HDA yang diberakhir di *patch panels*.

Untuk pengembangan *data center* , perlu ada pemisahan dalam ruang *data center* sesuai dengan fungsinya. Sekat ruangan untuk membagi ruangan bisa dibuat permanen atau tidak yang penting bisa menutup rapat ruangan dari ruang komputer. Hal ini agar sistem pendingin ruangan dapat bekerja maksimal.



Gambar Ruangan Data Center

1. **Electrical Room (Ruang Listrik)**, Ruang Panel Listrik dan UPS, sebaiknya terpisah dari ruang server untuk menghindari interferensi elektromagnetik.
2. **Network & Communication Room**, pusat dari semua *structured cabling* berakhir.
3. **Loading Dock**, area tempat menerima semua peralatan yang baru datang untuk *Data Center*.
4. **Staging Area**, area untuk *System Administrator* dan *Network Engineer* melakukan *setup* dan konfigurasi peralatan yang akan digunakan di *Data Center*.
5. **Storage Room**, area untuk menyimpan peralatan *Data Center* dalam jangka waktu yang lama seperti suku cadang.
6. **Operation Command Center/Control Room**, area untuk semua *System Engineer* dan *Network Engineer* melakukan pengawasan terhadap operasional *Data Center*.
7. **Backup Room**, ruang kerja bagi personel tambahan, seperti *vendor* yang melakukan *Backup* dan *Monitoring Server* dan peralatan-peralatan terkait di *Data Center*.
8. **Vendor Service Area**, ruang khusus untuk semua *vendor* dalam melakukan pekerjaan yang cukup signifikan di dalam *Data Center*, untuk menghindari terlalu lamanya mereka berada di dalam *Data Center*.

### 6.2.3 Teknologi Keamanan Data Dan Jaringan

#### 6.2.3.1 Firewall dan Demilitarized Zone

Penggunaan *firewall* merupakan sebuah keharusan pada pengamanan jaringan Pemerintah Kabupaten Pacitan. *Firewall* merupakan pengamanan yang memisahkan jaringan internal Pemerintah Kabupaten Pacitan dengan jaringan eksternal (*internet*).

Arsitektur *firewall* yang direkomendasikan adalah menggunakan *dualfirewall* untuk membuat suatu zona yang disebut *demilitarized zone (DMZ)*. *Demilitarized zone (DMZ)* atau biasa disebut juga *perimeter network* adalah wilayah jaringan (*subnetwork*) yang berada di antara jaringan internal dan jaringan eksternal (biasanya *internet*). Konfigurasi dari *firewall* yang pertama (*front-end firewall*) dikonfigurasi mengizinkan koneksi atau akses yang berasal dari jaringan internal dan eksternal. Sedangkan *firewall* kedua (*back-end firewall*), dikonfigurasi sehingga hanya koneksi atau akses yang berasal dari DMZ yang menuju ke jaringan internal yang diijinkan. *Firewall* pertama harus

dapat mengatasi jumlah trafik yang lebih besar dari dibandingkan *firewall* yang kedua. Sebaiknya *firewall* pertama dan kedua merupakan produk dari *vendor* yang berbeda sehingga jika terdapat penyusup (*hacker*) yang berusaha menjebol *firewall* yang pertama, maka penyusup tersebut akan membutuhkan waktu yang lebih banyak untuk menjebol *firewall* kedua karena perbedaannya.

*Server-server* yang perlu diakses dari jaringan eksterual, seperti *email*, *web* dan *DNS server* biasanya ditempatkan pada DMZ. Koneksi dari jaringan eksterual yang hendak mengakses DMZ biasanya dikontrol dengan menggunakan *port address translation* (PAT).

#### **6.2.3.1 Intrusion Detection/Prevention System (IDS/IPS)**

Selain *Firewall* direkomendasikan juga penggunaan *Intrusion Detection System* (IDS)/ IDS mendeteksi adanya *intrusion* (tamu yang tidak diundang). IDS mirip dengan sistem alarm, yang memberi tanda setelah *intruder* masuk. Untuk itu perlu dipersiapkan *Standard Operation Procedure* (SOP) langkah lanjut penanganan insiden ini.

Ada dua jenis IDS, yaitu *network-based* IDS dan *host-based* IDS. *Network-based* IDS mengamati trafik pada jaringan untuk mendeteksi adanya kelainan (anomali). Sebagai contoh, *network flooding* atau *port scanning*, usaha pengiriman virus melalui email akan terdeteksi oleh IDS ini. Sementara *host-based* IDS dipasang pada host untuk mendeteksi kelainan pada host tersebut (misalnya ada proses yang semestinya tidak jalan akan tetapi sekarang sedang jalan, adanya virus di *workstation*).

*Intrusion Prevention System* (IPS) adalah *software* atau *hardware* yang merupakan pengembangan dari dari IDS dan dapat memonitor aktifitas yang tidak diinginkan dan dapat langsung bereaksi untuk mencegah aktivitas tersebut tanpa memerlukan intervensi dari pengguna. Sebagai pengembangan dari teknologi *firewall*, IPS melakukan kontrol dari suatu sistem berdasarkan aplikasi konten, tidak hanya berdasarkan *port* atau alamat IP seperti *firewall* umumnya.

#### **6.2.3.2 Anti-Virus, Anti-Spam, dan Anti-Malware**

Untuk menyediakan perlindungan pada segenap infrastruktur SI/TI dari virus, *spam*, dan *malware*, maka diperlukan kombinasi instalasi terhadap anti-virus, anti-*spam*& anti-*malware* baik di level perimeter organisasi (*gatewayserver*), pada *server* sendiri, maupun pada setiap *client* di jaringan.

Disarankan Untuk menggunakan *anti-virus* yang bersifat *client/server* atau *servermanagable*, sehingga *workstation* hanya perlu meng-*update* melalui *server*, tidak perlu melalui *internet*. Selain itu, instalasi *anti-virus* yang bersifat *client/server* lebih memudahkan *administrator* jaringan untuk menginstalasi maupun mengelolanya secara *remote*.

### 6.2.3.3 Network Management System

Penggunaan jaringan membutuhkan perangkat pengelolaan. Istilah yang sering digunakan adalah *Network Management System*. Pengelola dapat memantau penggunaan jaringan untuk mendeteksi adanya masalah (jaringan tidak bekerja, lambat, trafik yang seharusnya tidak terjadi dan seterusnya).

Implementasi dari *network management system* dapat bervariasi. Standar yang sering digunakan saat ini adalah SNMP (*Simple Network Management Protocol*). Pengelola jaringan Pemerintah Kabupaten Pacitan harus memiliki *network management* yang mendukung standar SNMP ini.

### 6.2.4 Pusat Pemulihan Data (*Data Recovery Center*)

Dalam mengimplementasikan E-Government, maka keberadaan Pusat Data sangatlah penting. Agar Pusat Data ini mampu memberikan layanan secara optimal dan berkesinambungan termasuk dalam kondisi ada bencana maka perlu dibangun Pusat Pemulihan Data (*Data Recovery Center*).

Pusat Pemulihan Data adalah suatu mekanisme pemulihan data dan sistem layanan e-Government pada saat terjadi bencana dengan waktu pemulihan yang seminimal mungkin sehingga layanan E-Government dapat tetap digunakan oleh semua pihak dengan resiko yang minimal.

Dalam membangun suatu *data recovery*, ada dua kunci sukses kritis (*Critical Success Factor/CSF*) : RTO (*Recovery Time Objective*) dan RPO (*Recovery Point Objective*). RTO adalah waktu yang dibutuhkan untuk melakukan pemulihan secara keseluruhan hingga sistem berjalan lagi. RPO adalah jumlah data yang boleh hilang akibat bencana yang terjadi. Pembahasan lebih detail mengenai RTO dan RPO akan dimuat dalam kajian mengenai BIA (*Business Impact Analysis*).

Untuk mengembangkan suatu Pusat Pemulihan Data diperlukan pemahaman pengertian mengenai prinsip dasar pengembangan Pemulihan Data. Berikut ini adalah beberapa prinsip yang harus disadari pemilik sistem informasi pada saat memutuskan untuk mengembangkan suatu pemulihan data :

- Dukungan semua pihak terutama pihak manajemen adalah mutlak
- Perlu waktu yang cukup lama untuk mendapatkan suatu analisa resiko
- Kebijakan dan prosedur yang dikembangkan harus mendukung kebutuhan utama (visi dan misi) organisasi
- Tidak melupakan pendokumentasian yang lengkap, baik dan benar
- Harus ada mekanisme yang mengatur alur, akses dan kendali terhadap komunitas sebelumnya, saat dan sesudah bencana
- Penyebaran kebijakan informasi dan prosedur agar mencapai semua pihak yang terlibat
- Perlu pengujian dan pelatihan yang berkala
- Adanya mekanisme perencanaan dan pemeliharaan terhadap dokumen-dokumen Pemulihan Data

## **6.2.5 Standar Infrastruktur Jaringan Dan Server**

### **6.2.5.1 Teknologi Server**

Untuk pengembangan Data Center Pemerintah Kabupaten Pacitan, dimasa yang akan datang pengadaan server-server baru direkomendasikan menggunakan teknologi Blade. Blade Server adalah komputer server dengan desain modular dioptimalkan untuk meminimalkan penggunaan ruang fisik.

*Enclosure Chassis* adalah komponen utama infrastruktur Blade yang berfungsi sebagai "rumah" bagi komponen-komponen lain, menyediakan layanan seperti daya, pendinginan, jaringan. Bay server adalah istilah bagi server di infrastruktur Blade. Tidak ada standar baku untuk ukuran dimensi dan kapasitas *Enclosure Chassis*. Salah satu produk yang direkomendasikan ukuran 10U dan kapasitas maksimal 16 bay slot.

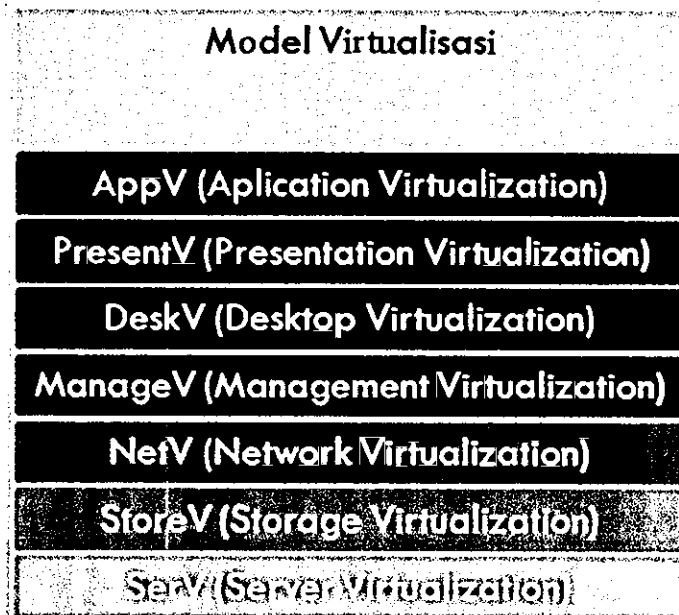
### **6.2.5.2 Teknologi Virtualisasi**

Untuk menekan biaya pengadaan server maupun biaya operasional server, dilakukan *virtualisasi server*. Jika biasanya suatu aplikasi menggunakan satu *Operating System* dan menggunakan satu hardware tertentu, virtualisasi server memungkinkan suatu hardware digunakan bersama-sama lebih dari satu *Operating System* dan lebih dari satu aplikasi. Beberapa alasan menggunakan teknik virtualisasi:

- Konsolidasi server. Beberapa server fisik dijadikan ke dalam sistem virtualisasi di atas satu server fisik saja.

- Dukungan terhadap aplikasi. Upgrade aplikasi dan sistem operasi ke server baru tanpa masalah driver hardware.
- Hemat biaya. Jumlah server menjadi lebih sedikit.
- Hemat Energi. Semakin sedikit server yang digunakan, semakin sedikit energi yang digunakan untuk menghidupkan server.
- Meningkatkan Fleksibilitas. Aplikasi-aplikasi yang dibuat bisa dijalankan pada hardware yang berbeda-beda.

Beberapa model virtualisasi seperti gambar berikut:



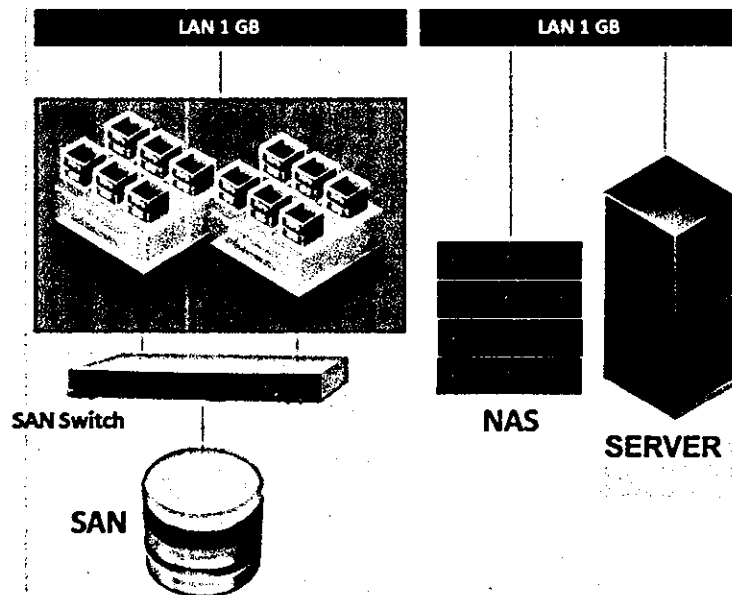
Gambar Model Virtualisasi Server

Untuk pengembangan aplikasi dalam beberapa tahun yang akan datang, digunakan teknologi virtualisasi model *Server Virtualization*. Untuk menjaga *High Availability* dari aplikasi, akan dilakukan *clustering* terhadap server-server yang ada menggunakan kemampuan aplikasi virtualisasi server.

#### 6.2.5.3 Kapasitas Penyimpanan

Teknologi untuk media penyimpanan (*storage*) antara lain *Network Attached Storage (NAS)* serta *Storage Area Network (SAN)*. NAS seperti layaknya

server yang mempunyai sistem operasi dan terdiri atas beberapa hard disk. NAS terhubung dengan jaringan LAN sehingga bisa diakses oleh semua pengguna. SAN terdiri dari server dan storage untuk media penyimpanan dengan kecepatan sangat tinggi dan mampu menangani trafik data dalam jumlah besar tanpa mengurangi bandwidth di LAN. SAN menggunakan koneksi *Fiber Channel*



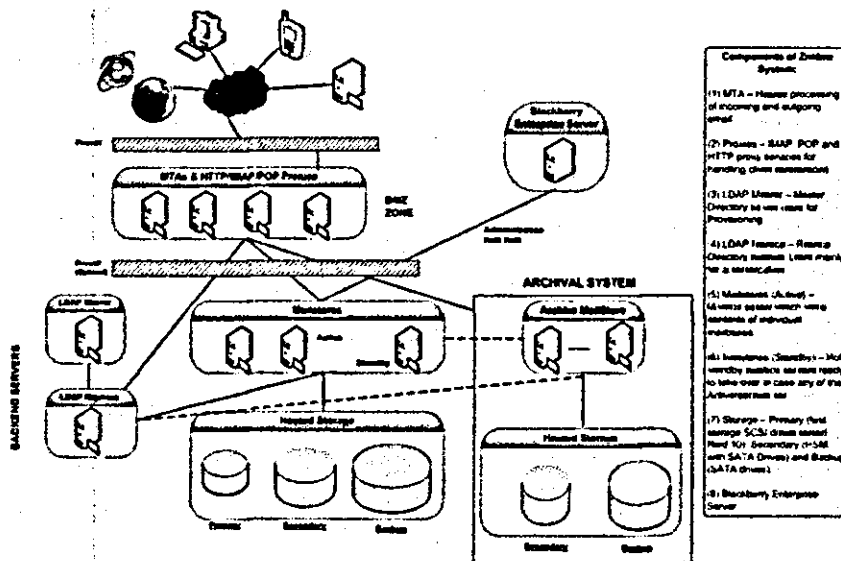
Gambar Model Media Penyimpanan

NAS akan digunakan untuk menyimpan file-file, backup aplikasi, serta database dan berkas lainnya. Adapun SAN akan digunakan untuk *storage mailbox* e-mail, storage aplikasi yang menggunakan virtualisasi. Perlu adanya mekanisme agar proses backup aplikasi dan database bisa dilakukan secara otomatis.

#### 6.2.5.4 Email Server

Layanan e-mail dimasa mendatang akan digunakan oleh semua pegawai Kabupaten Pacitan. Untuk itu diperlukan sistem yang tangguh, sudah teruji dan mempunyai dokumentasi dan support yang bagus. Mail server yang akan dibangun menggunakan aplikasi *Zimbra Collaboration Suite* (Zimbra CS). Karena mail server ini akan diakses oleh semua pegawai Kabupaten Pacitan, arsitekturnya menggunakan *multi-server* serta media penyimpanan *mailbox* menggunakan teknologi SAN (*Storage Area Network*) dengan kecepatan tinggi. Berikut ini adalah gambar arsitektur mail server *Zimbra CS* dengan metode *multi-server*.

## Multi-Server Architecture



Gambar Model Arsitektur Mail Server

### 6.2.5.5 Jaringan Infrastruktur

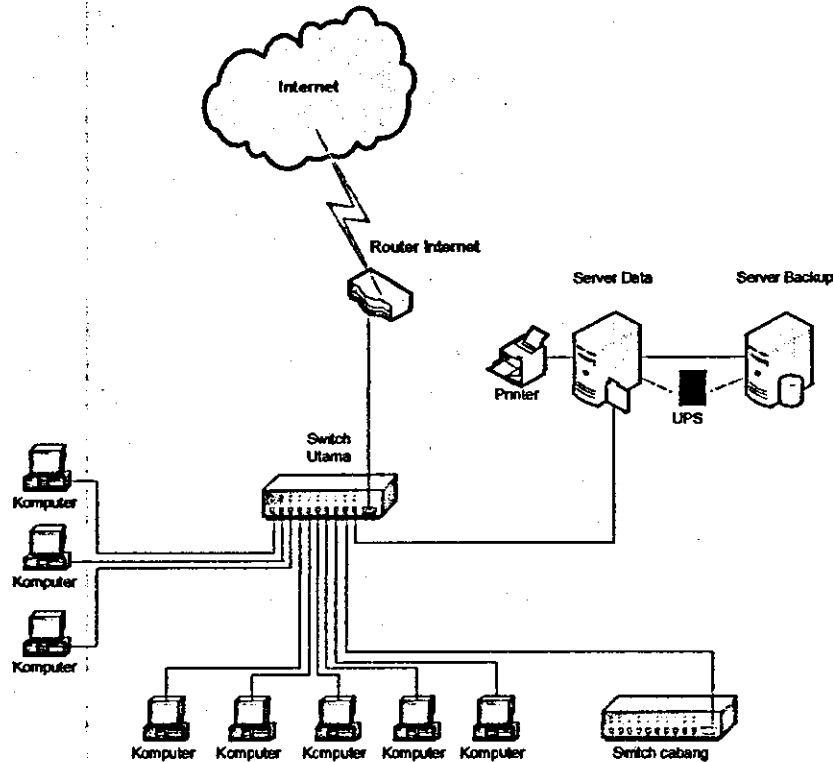
Seperti yang dibahas arsitektur infrastruktur jaringan, pengembangan jaringan *backbone* menggunakan 2 media yaitu : Fiber optik dan jaringan *wireless*.

Beberapa hal yang perlu diperhatikan:

- Instalasi Fiber Optik
  - Jarak antar instansi cukup jauh sehingga menggunakan kabel fiber optik single mode
  - Pemilihan jenis fiber optik disesuaikan dengan kebutuhan pengembangan dimasa depan. Jumlah core utama yang menghubungkan antar distribusi minimal 96 core.
  - Pengamanan fiber optik perlu diperhatikan sesuai dengan standar instalasi
- Instalasi jaringan wireless
  - Menggunakan *accesspoint outdoor* dengan power yang yang tidak melampui batas yang ditetapkan Peraturan Pemerintah.
  - Menggunakan channel yang berbeda untuk Access Point yang bersebelahan
  - Menggunakan mode infrastruktur
  - Instalasi jaringan wireless
- Instalasi jaringan kabel LAN

Topologi jaringan dasar beserta perangkat yang harus dipenuhi sebagai berikut

:



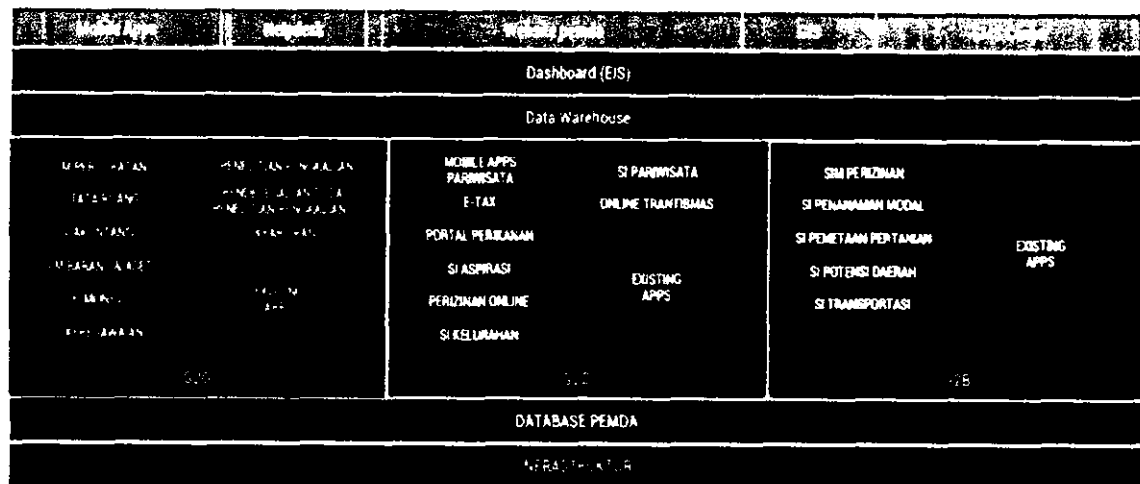
Gambar Infrastruktur Jaringan Internet

Untuk instalasi jaringan, pengkabelan menggunakan standar internasional untuk urutannya yaitu TIA 568A /TIA 568B. Selain hal tersebut yang perlu diperhatikan adalah :

- Kabel jaringan dilewatkan pada jalur aman yang tidak bisa diakses publik
- Menempatkan posisi switch yang mudah ketika pemeliharaan
- Merapikan penamaan komputer dan IP Address
- Hotspot yang dihubungkan dengan *captive portal*

### 6.3 Arsitektur Sistem Informasi

Desain arsitektur sistem informasi mengacu pada bab Kondisi Ideal Sistem Informasi di Pemerintah Daerah, dikategorikan menjadi sistem informasi untuk G2G, G2C dan G2B. Berdasarkan analisa hasil survey berkenaan dengan aplikasi yang diharapkan dan dibutuhkan dikembangkan dilingkungan Pemerintah Daerah kabupaten Pacitan dapat digambarkan dalam bagan sebagai berikut:



Gambar Model Arsitektur Sistem Informasi

Secara vertikal bagan di atas menjelaskan mengenai tingkatan-tingkatan (layering) E-Government yang akan dikembangkan secara bertahap dan terpadu dalam 5 tahun kedepan. Layer yang paling mendasar adalah layer infrastruktur. Pengembangan di layer infrastruktur telah dijelaskan pada bab rencana arsitektur infrastruktur. Diatas layer infrastruktur akan ada layer database yang akan menjadi pondasi “data teknis” dari seluruh aplikasi. Pada layer database ini pengembangannya mengacu pada pengembangan aplikasi.

Selanjutnya diatas layer database terdapat layer aplikasi yang dikelompokkan menjadi 3 blok yaitu : G2G, G2C dan G2B. Selain pengembangan aplikasi-aplikasi baru dan upgrading dari aplikasi-aplikasi yang saat ini telah berjalan, terutama dalam kerangka pembangunan kanal integrasi menjadi salah satu prioritas yang perlu dipertimbangkan. Pengembangan aplikasi pada layer ini akan mengacu pada bab prioritasisasi pengembangan yang telah dibahas pada bab sebelumnya dan penjabarannya lebih rinci mengenai roadmap pengembangan aplikasi akan dibahas pada bab roadmap. Kemudian diatas layer aplikasi akan terdapat layer data *warehouse* yang berisi sekumpulan *services* data master dari keseluruhan aplikasi internal yang berjalan di Pemda.

Layer selanjutnya adalah aplikasi dashboard yang akan mengambil data dari *warehouse* dan memprosesnya menjadi informasi yang komprehensif bagi para pimpinan/eksekutif di lingkungan pemda. Selanjutnya layer terakhir adalah layer aplikasi-aplikasi yang nantinya akan dimaksudkan untuk memberikan informasi ke public/masyarakat. Sumber datanya dapat berasal dari *warehouse*, dimana tentu saja pada data-data yang memang pas untuk ditampilkan ke publik.

Deskripsi mengenai masing-masing aplikasi tersebut akan diuraikan dalam penjelasan berikut ini:

### **6.3.1 Aplikasi G2G (*Government To Government*)**

Kelompok aplikasi G2G berisikan aplikasi-aplikasi yang digunakan untuk melakukan pengelolaan backoffice atau administrasi di dalam lingkungan pemerintah kabupaten, ataupun sinergi antar lembaga atau satuan kerja baik di dalam maupun luar lingkungan pemerintah kabupaten . Beberapa di antara aplikasi yang diusulkan merupakan aplikasi yang harus segera diimplementasikan. Termasuk dalam kelompok aplikasi ini adalah sebagai berikut :

<b>NO</b>	<b>NAMA APLIKASI</b>	<b>DESKRIPSI</b>	<b>FUNGSI</b>	<b>JENIS LAYANAN</b>	<b>SATUAN KERJA PENGAMPU</b>	<b>INTEGRASI</b>
1	SIMPEG	Aplikasi yang digunakan untuk mengelola database kepegawaian yang dapat memberi kemudahan memantau status kepangkatan pegawai	Data induk pegawai, mutasi, riwayat, presensi, dan laporan analisa kepegawaian	BackOffice dan FrontOffice	BKPP	All SKPD
2	SIM Barang dan Aset	Aplikasi yang digunakan untuk mendata, memproses, dan menyajikan laporan pengelolaan aset daerah mulai dari pengadaan, utilisasi sampai penghapusan	Data pokok gedung, ruang dan aset inventaris didalamnya Data spasial gedung dan aset diluar ruangan Utilisasi aset	BackOffice dan FrontOffice	DPPKAD	All SKPD
3	SI KEARSIPAN/ PERSURATA	Aplikasi yang digunakan untuk pengelolaan arsip perkantoran, khususnya di kantor arsip.	Data pokok arsip daerah, data katalog dan lokasi arsip	BackOffice	Kantor Arsip	Perpustakaan Daerah
4	E-OFFICE	Aplikasi yang digunakan untuk berinteraksi, kolaborasi serta berbagi informasi dalam aktivitas perkantoran, khususnya pengelolaan surat masuk dan keluar antar instansi, serta delegasi	Data pokok surat menyurat, berkas dan arsip surat instansi	BackOffice	Kantor Sekda	All SKPD
5	SI KEPEGAWAIN	Aplikasi yang digunakan untuk penyusunan sasaran kinerja pegawai, di	Data Sasaran, Data Kinerja, Data Prestasi, dan data	BackOffice dan FrontOffice	All SKPD	BKPP

		lingkungan pemerintah daerah	Penilaian Perilaku Kerja			
6	SI PENELITIAN DAN PENGKAJIAN	Aplikasi yang digunakan untuk pencatatan penelitian dan pengkajain	Data peneliti, penitian	BackOffice	All SKPD	BPBD

### 6.3.2 Aplikasi G2C (Government To Customer)

Kelompok aplikasi G2C berisikan aplikasi-aplikasi yang digunakan untuk melakukan pengelolaan layanan kepada masyarakat. Berikut beberapa aplikasi yang diusulkan untuk dikembangkan dan diimplementasikan dalam periode 5 tahun ke depan:

No	Nama Aplikasi	Deskripsi	Fungsi	Jenis Layanan	Satuan Kerja Pengampu	Integrasi
1	SIM PERIZINAN ONLINE	Aplikasi yang digunakan untuk perizinan secara online	Data perizinan	BackOffice dan Front Office	BPMPP	All SKPD
2	SI PERPUSTAKAAN	Aplikasi yang digunakan untuk pengelolaan perpustakaan, mulai dari peminjaman, keanggotaan dan digital katalog	Data Koleksi Buku, majalah, data anggota dan data peminjaman koleksi	BackOffice dan FrontOffice	Perpustakaan Daerah	-
3	SI ASPIRASI	Aplikasi yang digunakan untuk mengelola aspirasi dari masyarakat yang terkategori berdasarkan issue-issue umum di pemerintahan	Data aspirasi	BackOffice dan FrontOffice	Kantor Sekda	-

4	SI KELURAHAN	Aplikasi yang digunakan untuk pengelolaan administrasi di kantor kelurahan	Data administrasi keluarahan, surat menyurat di administrasi kelurahan	BackOffice	Kelurahan	-
5	SI PARIWISATA	Aplikasi yang digunakan untuk memfasilitasi masyarakat dan publikasi pariwisata daerah	Data objek wisata, hotel, restoran, kuliner, handicraft dan fasilitas umum	BackOffice dan FrontOffice	Dinas Pariwisata	-
6	PORTAL PERIKANAN	Aplikasi yang digunakan untuk informasi dan komoditas perikanan	Data penangkapan ikan, informasi tentang perikanan	BackOffice dan FrontOffice	Dinas Perikanan	-

### 6.3.3 Aplikasi G2B (Government To Bussiness)

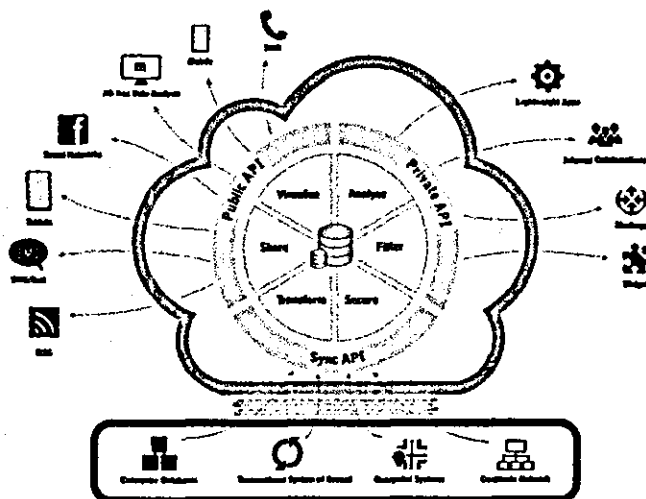
Kelompok aplikasi G2B berisikan aplikasi-aplikasi yang digunakan untuk pengelolaan layanan kepada komunitas bisnis sehingga laya pada ekosistem bisnis di daerah dapat ditingkatkan. Berikut beberapa aplikasi yang diusulkan untuk dikembangkan dan diimplementas dalam periode 5 tahun ke depan:

No	Nama Aplikasi	Deskripsi	Fungsi	Jenis Layanan	Satuan Kerja Pengampu	Integrasi
1	SI PERIJINAN	Aplikasi yang digunakan untuk mengelola data permohonan ijin dari masyarakat dan pemilik usaha	Data Permohonan Ijin, data pemohon, data pemilik ijin	BackOffice dan FrontOffice	BPMPP	SKPD terkait perizinan
2	SI PENANAMAN MODAL	Aplikasi yang digunakan untuk mengelola data investasi daerah	Data investasi daerah, data investor	BackOffice dan FrontOffice	BPMPP	-
4	SI POTENSI DAERAH	Aplikasi yang digunakan untuk mengelola data potensi daerah (secara ekonomi, sosial, pariwisata, pertanian dll)	Data potensi daerah	BackOffice dan FrontOffice	BPMPP	Dinas Pariwisata, Dinas Pertanian, Dinas Sosial
5	SI TRANSPORTASI	Aplikasi yang digunakan untuk mengelola sarana dan monitoring transportasi	Data sarana dan prasarana transportasi	BackOffice dan FrontOffice	Dinas Perhubungan, Informasi dan Komunikasi	

### 6.3.4 Interoperabilitas Dalam Pertukaran Data

Dari banyaknya sistem informasi yang akan dikembangkan di Kabupaten Pacitan, perlu direncanakan bagaimana skema integrasi yang akan dilakukan untuk mempermudah penyajian data untuk internal pemerintah, publik, antar instansi pemerintah, dan pebisnis. Selain itu perlu dibuat master data agar tidak terjadi duplikasi data di setiap sistem yang dikembangkan. Beberapa master data yang perlu didefinisikan sebagai berikut :

1. Data Penduduk sesuai dengan KTP untuk dapat dishare dengan aplikasi yang memerlukan data dasar kependudukan, seperti untuk mengajukan perizinan, mengurus surat-surat sipil, melakukan pemeriksaan kesehatan, dan aplikasi lainnya yang memerlukan.
2. Data Pegawai pemerintah, digunakan membuat *single identity* pegawai untuk mempermudah manajemen privileges dan autentikasi aplikasi yang digunakan di lingkup internal pemerintah Kabupaten Pacitan, seperti aplikasi mail, *e-office*, sistem informasi kepegawaian, *paperless office*, dan aplikasi internal lainnya



Gambar Arsitektur Alur Informasi

Gambar diatas menunjukkan alur informasi berdasarkan teknologi yang digunakan dan siapa saja yang dapat mengakses informasi tersebut. Untuk dapat melakukan kolaborasi sistem informasi yang ada di Pemerintah Kabupaten Pacitan perlu didefinisikan secara jelas siapa penanggung jawab masing-masing informasi yang akan disajikan, siapa yang boleh melakukan update informasi, siapa yang boleh mengakses informasi. Untuk mengakses informasi dan database diperlukan pengaturan data primer dan penanggungjawabnya. Hal ini supaya tidak terjadi tumpang tindih dan duplikasi data

No	Basis Data	Data Primer	Penanggungjawab
1	Eksektufi/Dashboard	Data warehouse	PDE
2	Perdagangan	Produk Pemakaian tenaga kerja Produk Kegiatan Ekspor/Impor Kontribusi terhadap daerah	Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan
3	Pariwisata	Obyek dan daya tarik wisata Sarana dan prasarana pariwisata (hotel, perhubungan dll) Data kunjungan wisatawan	Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olahraga
4	Perhubungan Dan Telekomunikasi	Data Transportasi Data Terminal & Pelabuhan Data Jalan & Jembatan Data Telekomunikasi	Dishubkominfo
5	Perkantoran	Surat Masuk-Keluar Surat Elektronik Dokumen Elektronik Kearsipan Kolaborasi & koordinasi	SETDA
6	Pendapatan Daerah	Klarifikasi penerimaan Penerimaan asli daerah (PAD) Pajak daerah Retribusi daerah Bagian laba BUMD Penerimaan dari unit-unit kerja Penerimaan lain-lain Target dan realisasi penerimaan	DPPKAD
7	Pengawasan	Obyek pemeriksaan/unit kerja Bidang pemeriksaan Hasil temuan Laporan hasil pemeriksaan	Inspektorat
8	Kependudukan	Data penduduk Catatan Sipil Rekap data dari seluruh penduduk Data orang asing Data demografi	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
9	Pendidikan	Data lembaga pendidikan (sekolah, perguruan tinggi) Jenis dan lokasi sekolah Rangking sekolah Jumlah dan penyebaran sekolah/perguruan tinggi Jumlah dan tingkatan umur siswa Biodata pengajar (guru, dosen) Mutasi, penempatan dan	Dinas Pendidikan

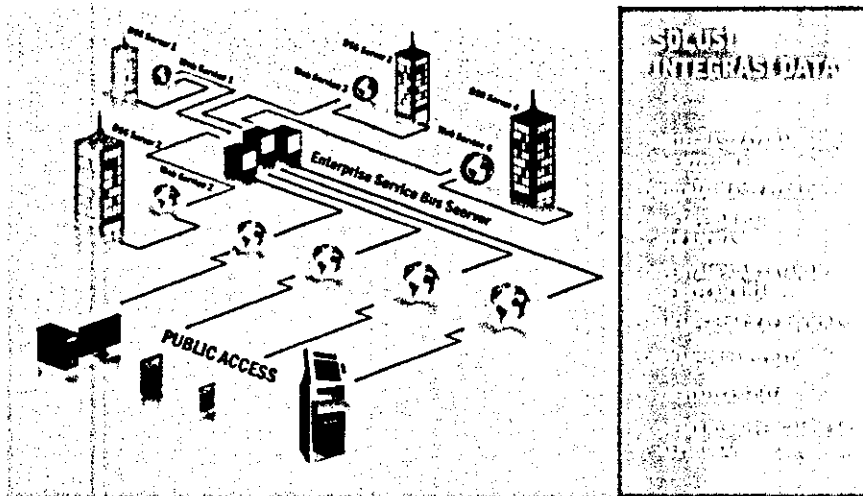
		promosi Kepangkatan Pemberhentian/ pensiun Angka kredit	
10	Geografis	Kondisi jalan Data Demografi Pemetaan hutan, lahan pertanian, pertambangan, perikanan dll Rancangan Umum dan Tata ruang / RUTR (penataan dan peruntukan)	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda)
11	Perizinan	Daitar perizinan Kriteria perizinan	Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan
12	Perpustakaan	Jenis koleksi perpustakaan dan arsip Pengelolaan koleksi Sirkulasi koleksi	Kantor Perpustakaan dan Kearsipan
13	Keuangan	Realisasi APBD Gaji pegawai, tunjangan dan potongan Akuntansi Daerah Surat Anggaran Buku kas daerah	DPPKAD
14	Kepegawaian	Jenis Kepegawaian ( PNS, tenaga bantuan) Data pribadi pegawai Penempatan, mutasi dan promosi Kepangkatan Pemberhentian/pensiun Diklat yang diikuti Absensi	Badan Kepegawaian Daerah
15	Pertanian dan perikanan	Klasifikasi produk pertanian dan perikanan Prasarana dan sarana Produk pertanian Produk perikanan	Dinas Kelautan dan Perikanan Dinas Tanaman Pangan dan Peternakan
16	Kesehatan	Klasifikasi penyakit Frekwensi kejadian Epidemiologi Pencegahan dan penanganan	Dinas Kesehatan

### 2.2.1 Integrasi Sistem Informasi

Untuk sistem existing yang sudah terpasang tetapi belum terintegrasi, salah satu pendekatan solusi yang bisa yang perlu dilakukan menggunakan teknologi *web service*. *Web Service* sendiri adalah sekumpulan *application logic* beserta *object-object* dan *method-method* yang dimilikinya yang terletak di suatu server yang terhubung ke internet sehingga dapat diakses menggunakan *protocol HTTP* dan *SOAP (Simple Object Access Protocol)*.

Kelebihan penggunaan *web service* adalah format yang digunakan standar yaitu menggunakan format XML (*Extensible Markup Language*),

sehingga dapat dipergunakan untuk mengintegrasikan berbagai system yang berbeda-beda platform maupun arsitektur. Disamping itu web service mempunyai kelebihan lain yaitu kemudahannya dalam pengiriman data, karena secara umum web service menggunakan protocol TCP/IP dan HTTP sebagai sarana komunikasinya.



Gambar Arsitektur Integrasi Data

Dengan menggunakan teknologi *webservices*, aplikasi-aplikasi yang tersebar di beberapa satuan kerja dapat diintegrasikan. Apabila sistem nantinya dapat terintegrasikan dengan baik akan memudahkan kolaborasi antar unit, transparansi data dan dapat menampilkan informasi bagi pimpinan dalam mendukung pengambilan keputusan (*Decision Support System*).

### 2.2.2 Standarisasi Pengembangan Aplikasi

Guna menjamin kesinambungan implementasi e-Government di Kabupaten Pacitan diperlukan sebuah standar pengembangan aplikasi agar didalam proses pengembangan aplikasi-aplikasi selanjutnya di kemudian hari tetap memiliki *compliance* dan relevansi dengan aplikasi aplikasi yang telah dikembangkan sebelumnya. Berikut standarisasi pengembangan aplikasi yang diuraikan dari berbagai perspektif:

#### 1. Technical

##### a. Platform

- Web Base untuk aplikasi yang bersifat *Back Office* dan *Reporting*
- Web/Desktop Base untuk aplikasi yang bersifat pelayanan di *Front Office*
- Aplikasi harus dilengkapi dengan versi mobile untuk aplikasi di akses secara keseharian oleh Masyarakat.
- Platform yang digunakan (*Framework, Programming Language* dan *Database*) mengacu pada standar ditentukan oleh Unit Kerja Pengelola TIK

### b. Teknologi

- Aplikasi yang dibangun harus berbasis open source untuk menghindari *vendor locking* yang akan dapat menimbulkan kerumitan pada saat pengembangan lebih lanjut.
- Aplikasi yang dibangun / framework yang digunakan harus berbasis MVC untuk mempermudah proses pengembangan lebih lanjut.
- Aplikasi yang dibangun / framework yang digunakan harus berbasis OOP mempermudah proses pengembangan lebih lanjut.

### c. Compatibility

- Aplikasi yang dibangun harus kompatibel (tampil dan berjalan dengan baik) pada beberapa browser utama yang populer. Standar browser ditentukan oleh Unit Kerja Pengelola TIK.
- Aplikasi yang dibangun harus tampil baik pada berbagai ukuran layar (*Reponsive UI*)
- Aplikasi yang dibangun harus tampil dan berjalan dengan baik pada beberapa Sistem Operasi Utama yang populer. Standar Sistem Operasi ditentukan oleh Unit Kerja Pengelola TIK

### d. Feature

- Aplikasi yang dibangun perlu menerapkan user level access management
- Aplikasi yang dibangun perlu secara *default* menyediakan fitur laporan/rekap/*summary*.
- Nilai tambah jika aplikasi yang dibangun sudah memiliki fitur "*log activity*" dari pengguna.
- Penyimpanan *password* pengguna di *database* harus dalam format terenkripsi.

## 2. Implementation

- Pengembangan aplikasi harus menyertakan dokumen-dokumen pengembangan (SRS, DBDD).
- Pengembang aplikasi harus memberikan garansi jika terjadi *error* setidaknya selama 1 tahun.
- Pengembang aplikasi harus memberikan pelatihan penggunaan aplikasi.
- Pengembang aplikasi harus memberikan user manual aplikasi untuk tiap aktor pengguna.

### 3. Integration

- Aplikasi yang dibangun harus memungkinkan untuk di integrasikan dengan aplikasi-aplikasi lain dalam lingkup pemda.
- Aplikasi menyediakan dokumentasi mekanisme pertukaran data.

### 4. License

- Pada pengembangan aplikasi Kode Sumber aplikasi haruslah milik pemerintah Daerah.

### 5. Regulasi

- Pengembangan aplikasi oleh tiap SKPD perlu dikoordinasikan dengan Unit Kerja Pengelola TIK.
- Direkomendasikan untuk melibatkan Unit Kerja Pengelola TIK sebagai nara sumber, tim teknis ataupun tim penyusun KAK dalam pengembangan aplikasi.

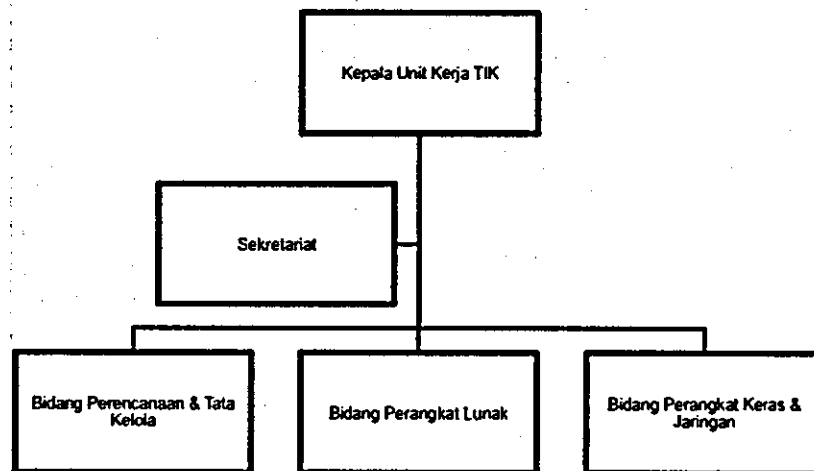
## 6.4 Tatakelola TIK

### 6.4.1 Struktur Organisasi & Sdm TIK

Untuk mendukung implementasi dan pengembangan TIK di lingkungan pemerintah daerah, diperlukan sumber daya manusia yang memadai baik dari sisi jumlah, kemampuan (skill) maupun tata kelola organisasi ke-sdm-an nya. Beberapa hal perlu diperhatikan agar organisasi TIK di pemda menjadi organisasi yang solid, efektif dan efisien dalam menjalankan tupoksi nya yakni:

- a. Organisasi dipertahankan tetap ramping agar mampu bergerak cepat dan memiliki fleksibilitas yang baik saat terjadi perubahan.
- b. Lingkungan kerja yang dibuat kondusif, untuk mempertahankan ritme kerja dimana biasanya Unit TIK akan memiliki tekanan beban kerja yang konsisten berat sepanjang tahun.
- c. Pelatihan dan pengembangan skill yang berkelanjutan, untuk memastikan tim IT ter-update dengan teknologi terkini.
- d. Spesialisasi pekerjaan
- e. Penyediaan jenjang karir
- f. Sistem punishment dan reward.

Berdasarkan kondisi yang ada saat ini, maka struktur organisasi yang perlu dipersiapkan kurang lebih adalah seperti yang ditunjukkan dalam bagan berikut:



Gambar Struktur Organisasi Unit Kerja Pengelola TIK

- **Kepala Organisasi TIK**

Keberadaan fungsi layanan TIK dalam wadah Dinas yang independen merupakan langkah yang cukup strategik karena aktivitas dan program-program kerja TIK dapat langsung berpengaruh bagi langkah-langkah strategik keseluruhan organisasi.

- **Kepala Bidang Perencanaan dan Tatakelola**

Posisi ini bertanggung jawab atas hal-hal yang berkaitan dengan pengelolaan kebijakan dan SOP TIK. Di dalam bidang ini perlu ada staf dengan keahlian manajemen TIK.

- **Kepala Bidang Perangkat Lunak**

Posisi ini bertanggung jawab atas seluruh pengelolaan perangkat lunak sistem informasi dan lisensi aplikasi umum di seluruh satuan kerja. Di dalam bidang ini perlu ada staf dengan keahlian sistem informasi dan database.

- **Kepala Bidang Perangkat Keras dan Infrastruktur**

Posisi ini bertanggung jawab atas seluruh pengelolaan perangkat keras dan infrastruktur TIK kepada seluruh satuan kerja. Di dalam bidang ini perlu ada staf dengan keahlian perangkat keras, administrator server, jaringan dan keamanan.

- **Sekretariat**

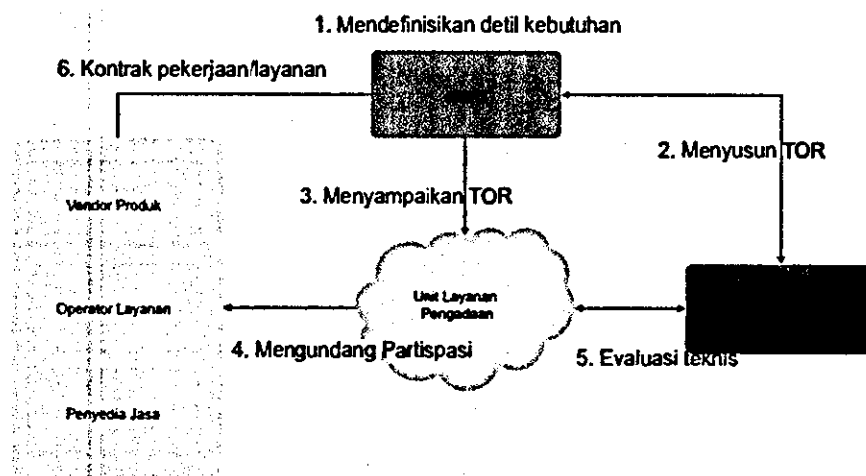
Posisi ini bertanggung jawab atas hal-hal yang bersifat administrasi dan kesekretariatan internal dalam organisasi TIK.

#### 6.4.2 Alur Koordinasi Pengelolaan TIK

Implementasi TIK tidak dapat dilakukan hanya dengan menggelar infrastruktur, mengembangkan sistem informasi dan membagi deskripsi pekerjaan diantara masing-masing personel. Dibutuhkan suatu pedoman dan

acuan yang mengatur bagaimana masing-masing pihak terkait dalam pengembangan dan pengelolaan TIK harus bertindak.

Berikut adalah gambaran umum alur proses pengadaan perangkat dan sistem TIK serta alur proses penyelenggaraan layanan penggunaan perangkat dan sistem TIK dengan struktur organisasi yang dijelaskan sebelumnya di atas.



Gambar Alur Proses Pengadaan Perangkat TIK

#### 6.4.3 Kebijakan Dan Sop TIK

Selain dokumen masterplan e-Government yang merupakan salah satu pedoman pengembangan dan implementasi TIK, terdapat beberapa pedoman lain yang perlu disusun oleh Pemda yaitu berupa Kebijakan dan Prosedur Standar Operasi layanan TIK.

Beberapa contoh Kebijakan yang perlu disusun diantaranya :

- Kebijakan penggunaan teknologi proprietary atau Open Source.
- Kebijakan penggunaan Sistem Operasi baik untuk komputer Server maupun komputer User.
- Kebijakan penggunaan aplikasi perkantoran.
- Kebijakan penggunaan email.
- Kebijakan penggunaan akses internet.
- Kebijakan mengenai standar kualifikasi SDM pengelola layanan TIK.

Dari Kebijakan-kebijakan yang ada tersebut nantinya dapat diturunkan menjadi Prosedur Standar Operasi seperti :

- SOP keamanan Jaringan Komputer.
- SOP penggunaan aplikasi.
- SOP pengelolaan email.
- SOP penambahan user baru.
- Dan lain-lain.

#### **6.4.4 Pengembangan Sumber Daya Manusia**

Berpijak pada hasil survey di lapangan, berikut ini diusulkan beberapa kualifikasi SDM yang perlu ditingkatkan kuantitas dan kualitasnya :

##### **1. Sistem administrator**

Saat ini sudah ada pengelola/sistem administrator. Untuk keperluan peningkatan kapasitas kemampuan SDM perlu dilakukan pelatihan-pelatihan senagai berikut :

- Pelatihan linux server
- Pelatihan mikrotik
- Pelatihan keamanan jaringan

##### **2. Penambahan tenaga teknis untuk maintenance infrastrukur jaringan.**

Dengan luasnya area pemeliharaan jaringan di pemda , maka sebaiknya pengelolaan tersebut bisa menggunakan jasa pihak ketiga/*outsourcing* . Pertimbangannya :

- Pengelola bisa fokus untuk penanganan sistem data center dan pelayanan internet
- Pemenuhan kebutuhan SDM teknisi jaringanakan menjadi tanggungjawab pihak ketiga.

##### **3. Software/Hardware support ( IT support) di SKPD**

IT support bertanggungjawab untuk memastikan perangkat keras dan perangkat lunak standar dapat berjalan dengan baik. Selain itu dapat menangani permasalahan jaringan lokal di masing-masing unit kerja.

Untuk meningkatkan kapasitas tersebut perlu dilakukan pelatihan-pelatihan mengenai :

- Pelatihan troubleshooting komputer
- Pelatihan pengelolaan jaringan komputer

## 6.5 Roadmap Pengembangan

2016	2017	2018	2019-2020
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Penguatan Lembaga Pengelola TIK</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Penyusunan SOP Tata Kelola TIK</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Audit TIK</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Audit TIK (2020)</li> <li>▪ Penyusunan Matriks TIK Lanjutan</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Pengembangan SMS Center</li> <li>▪ Upgrade Website Pemda</li> <li>▪ Mobile Apps Pariwisata</li> <li>▪ Perizinan Online</li> <li>▪ Dashboard</li> <li>▪ Pengembangan SI Pariwisata</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Pengembangan E-Tax</li> <li>▪ Pengembangan Portal Kelautan dan Perikanan</li> <li>▪ Pengembangan SI Aspirasi</li> <li>▪ Pengembangan SI Kelurahan</li> <li>▪ Online Trantibmas</li> <li>▪ Pengembangan SI Persuratan</li> <li>▪ Pengembangan SIM Barang &amp; Asset</li> <li>▪ Pengembangan E-Monev</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Pengembangan SI Kepegawaian</li> <li>▪ Pengembangan SI Tata Ruang</li> <li>▪ Pengembangan SI Akuntansi</li> <li>▪ Pengembangan SI Penelitian &amp; Pengkajian</li> <li>▪ Pengembangan SI Pendelegasian Tugas</li> <li>▪ Pengembangan SI Kearsipan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ SI Penanaman Modal</li> <li>▪ SI Potensi Daerah</li> <li>▪ SI Transportasi</li> <li>▪ SIPemetaan Pertanian</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Pengembangan jaringan terpadu di kompleks kantor bupati</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Pengembangan Data Center</li> <li>▪ Pengembangan jaringan antar dan inter SKPD</li> <li>▪ Penambahan/Ugrade Perangkat Kerja</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Peningkatan Kapasitas Bandwidth</li> <li>▪ Pengembangan Data Center</li> <li>▪ Penambahan/Upgrade Perangkat Kerja</li> <li>▪ Pengembangan jaringan antar dan inter SKPD (lanjutan)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Peningkatan Kapasitas Bandwith</li> <li>▪ Penguatan Data Center</li> <li>▪ Penambahan /upgrade Perangkat Kerja</li> <li>▪ Pengembangan DRC</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Penyelenggaraan Training : Networking</li> <li>▪ Penyelenggaraan Training : Basic Programming</li> <li>▪ Penyelenggaraan Training : RDBMS</li> <li>▪ Penyelenggaraan Training : Server maintenance</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Penyelenggaraan Training : Networking</li> <li>▪ Penyelenggaraan Training : Basic Programming</li> <li>▪ Penyelenggsraan Training : RDBMS</li> <li>▪ Penyelenggaraan Training : Server maintenance</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Penyelenggaraan Trainwig : Networking</li> <li>▪ Penyelenggaraan Training : Basic Programming</li> <li>▪ Penyelenggaraan Training : RDBMS</li> <li>▪ Penyelenggaraan Training : Server maintenance</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Penyelenggaraan Training : Networking</li> <li>▪ Penyelenggaraan Training : Basic Programming</li> <li>▪ Penyelenggaraan Training : RDBMS</li> <li>▪ Penyelenggaraan Training : Server maintenance</li> </ul>

## LAMPIRAN

### DATA HASIL SURVEY INFRASTRUKTUR TIK KABUPATEN PACITAN

#### a. Komputer

No	BKPD	Jumlah yang aktif	Desktop	Notebook	Terhubung Jaringan & Internet	Printer			Scanner
						Laser Jet	Inkjet	Dotmatrik	
1	Ketamatan Kabonagung	12	9	3	9		5		1
2	Bagian Krjasama & Perikatan	3	3		3		2		1
3	Bagian Administrasi Pemerintahan Umum	9	3	6	6	1	6		3
4	Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Kebersihan	24	13	11	11		23		
5	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	32	17	15	14		21	14	
6	Kantor Pendidikan dan Pelatikan	8	3	5	7	1	3		1
7	Kantor Kecamatan Pacitan	12	7	4	8	print (1D)			2
8	Dinas Pendidikan	77	60	17	65				
9	BPKD Kabupaten Pacitan	7	1	6	7		5		5
10	Dinas Tanaman Pangan dan Peternakan	18	7	11	13		24		1
11	Badan Penelitian, Pengembangan dan Statistik Kabupaten	15	6	9	11	2	7		1
12	Bagian Admanistrasi SDA	5	2	3	4		2		1
13	Badan Kepegawaian Daerah	30	8	22	15	4	22	3	2
14	Kecamatan Donorojo	3	3	2	2		3	1	1
15	Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	30	25	5	30	3	14	1	6
16	Kantor Kec. Tegalombo	8	6	2	2	1	4		1
17	Kecamatan Punsung	6	4	2	2		3		2
18	OPPKA	120	91	29	103	29	40	5	17
19	RSUD Pacitan	104	75	79	104	32	3	10	3
20	Bappeda	59	29	30	57	8	25		5
21	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda Dan Olahraga	27	16	11	4		18		
22	BPMPP	25	19	9	18	3	13	1	2
23	Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi	10		10			7		
24	Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan	10	10	6	10		3	1	
25	Dinas Pertambangan dan Energi	23	14	9	19		15		1
26	Dinas Kehutanan dan Perkebunan	30	16	14	16	3	14	1	
27	Kecamatan Nawangan	10	8	2	3		7		1
28	Dinas Kelautan dan Perikanan	9	7	2	9		9		1
29	Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa	22			22		11		3
30	Satuan Polisi Pamong Praja	12	5	7	9		9		1
31	Kecamatan Ngadirojo	7	5	2	4	5			
32	Kantor Perpustakaan, Arsip & Dokumentasi	10	5	5		3	6		1
33	Kantor Camat Bandar	9	7	2	7	2	2		2
34	Dinas Kesehatan	6	6						
35	Kantor Camat Tilikan	3	1			1	1		

No	SKPD	Jumlah yang aktif	Desktop	Notebook	Terhubung Jaringan & Internet	Printer			Scanner
						Laser Jet	Inkjet	Dotmatrik	
36	Inspektorat	24	4	20	18	5	3		
37	Sekretariat DPRD	10	5	5	5				1
38	Bagian Humas dan Promosi Setda	9	9	0	1		4		1
39	Badan KBPP	43	27	21	48		21		
40	Bagian Administrasi Kesra Setda	9	4	5	7		8		
41	Kantor Lingkungan Hidup	14	3	11	13	1	11		
47	Kantor Ketahanan Pangan	12	6	6	5	6	6		3
43	Kantor Kecamatan Pringlulu	4	2	2	1		1		
44	Kantor Kecamatan Sudimoro	6	5	1			5		1
45	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	10	5	5	5		6		
46	Bagian Organisasi Setda	8	3	5	8	3	1		2
47	Bagian Litum Setda	7	6	1	4		4		1
44	Bagian Hukum	11		11	10	2	8		
	Jumlah	970	570	383	719	114	414	35	74

## b. Server

NO	SKPD	Jumlah Server	Merit	Prosesor	RAM	Harddisk	Penggunaan	Ruang Server Khusus
1	Kecamatan Kebonagung	1	Hp	Intel Xeon X5670 2 93 Ghz	2 Ghz	1200 GB	Server KTP Elektronik	Tidak Ada
2	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	1	IBM	Intel Xcom	4 GB	2x146 GB	Pelayanan SIAK	Ada
3	Kantor Pendidikan dan Pelatihan	1	Intel	Core i5	2 GB	500 GB	Server Seluruh Databased	Tidak Ada
4	Kantor Kecamatan Pacitan		HP	Xeon	4	600 GB	Operator	Tidak Ada
5	Dinas Pendidikan	1	IBM	Xeon 2 66	1024	250 GB	sms gateway	Tidak Ada
6	BPBD Kabupaten Pacitan		HP Proliant ML 350C gen 8	1 Xeon E2407	4 GB	500GB	Web Server	ada
7	Badan Kepegawaian Daerah	2	1. Acer 2. Ralner	Dual Core Xeon 1,9 GB	1 GB 8 GB	320 GB 1 TB	Server SIMPEG Local Server SIMPEG Online	Tidak Ada
8	Kecamatan Donorojo	1	HP				Server e-KTP	Tidak Ada
9	Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	2	1. IBM 2. Ralner	3.5 Mhz 3.3 Mhz	4 GB 4 GB	1 TB 300GB	Server portal dishub.padtankab.go.id Hosting website desa	Tidak Ada
10	Kantor Kec. Tegalombo							
11	Kecamatan Punung	1	Intel	Core	4 GB	500 GB		
12	DPPKA	3	IBM, HP, Dell					Ada
13	RSUD Pacitan	4	IBM	1	8	1 TB	Server Billing System	
			IBM	1	16	250 GB	Server Database	
				1	4	500 GB	Server INALBE	
			I	1	256	160 GB	Server RSUD Pacitankab.go.id	
14	Bappeda							
15	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda							
16	BPM-PP	1	HP	Intel Core i3	4 GB	1 TB		
17	Kecamatan Nawangan	1	IBM	INTELCOM 2 DVD	1 GB	560 GB	Entry data E-KTP	Ada
18	Dinas Kelautan dan Perikanan							
19	Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa							Tidak Ada
20	Satuan Polisi Pamong Praja							
21	Kecamatan Ngadirojo							
22	Kantor Perpustakaan, Arsip & Dokumentasi							Tidak ada
23	Kantor Camat Bandar	1		3.30 Ghz	2.0 GB	32 GB	Aplikasi sistem perizinan	
24	Bagian Administrasi Kesra Setda							
25	Kantor Lingkungan Hidup	1	HP	Intel Xeon	2 GB	150 GB	Internet data	Tidak Ada
26	Kantor Ketahanan Pangan							
27	Kantor Kecamatan Pringkuku	1	HP	Intel	4 GB	350 GB	E-KTP	Tidak Ada
28	Kantor Kecamatan Sudimoro	1	Lenovo	Intel Core i3	4 GB			

**c. Spesifikasi Komputer dan Sistem Operasi**

No	SKPD	SPESIFIKASI KOMPUTER YANG AKTIF DIGUNAKAN			SISTEM OPERASI						SOFTWARE LEGAL/RESMI			
		Pentium III/Celeron	Pentium IV	Dual Core/ Lebih	Windows 98	Windows XP	Windows Vista	Windows 7/8	Unix	Mac IOS	Windows XP	Windows 7	Windows 8	Microsoft Office
1	Kecamatan Kebonagung			12				12				12		
2	Bagian Kerjasama & Perbatasan	3						3						
3	Bagian Administrasi Pemerintahan Umum		3	6		4		5						
4	Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Kebersihan	13	6	5		13		11			13	11		24
5	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil		36	9		36		9			1			
6	Kantor Pendidikan dan Pelatihan		1	7		2		6				2		1
7	Kantor Kecamatan Pacitan	5	3	4		5		7						
8	Dinas Pendidikan			77				76			1			
9	BPBD Kabupaten Pacitan		15	2				15						
10	Dinas Tanaman Pangan dan Peternakan	0	3	15				15						
11	Badan Penelitian, Pengembangan dan Statistik Kabupaten		15	2				15						
12	Bagian Administrasi SDA		2	3		2		3			2	2	1	
13	Badan Kepegawaian Daerah		4	26		2		28						
14	Kecamatan Donorojo	1	2		1	2								
15	Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	1	6	23		11		17	2			6		6
16	Kantor Kec. Tegalombo		3	3		2		4			2	4		6
17	Kecamatan Punung		1	5		1		5			1	5		6
18	DPPKA			120		68		52						
19	RSUD Pacitan		5	71		34		70						
20	Bappeda	2	14	43		17		42						
21	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda Dan				27									27
22	BPM-PP		2	26		9		19	1					
23	Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi			10			7	3						
24	Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan			10		10					10			10
25	Dinas Pertambangan dan Energi		3	20		14		9						
26	Dinas Kehutanan dan Perkebunan			30		3		27				1		30
27	Kecamatan Nawangan	1	5	4				10						

No	SKPD	SPESIFIKASI KOMPUTER YANG AKTIF DIGUNAKAN			SISTEM OPERASI						SOFTWARE LEGAL/RESMI			
		Pentium III/Celeron	Pentium IV	Dual Core/ Lebih	Windows 98	Windows XP	Windows Vista	Windows 7/8	Unix	Mac IOS	Windows XP	Windows 7	Windows 8	Microsoft Office
31	Kecamatan Ngadirojo	1	2	4	2	5								
32	Kantor Perpustakaan, Arsip & Dokumentasi		3	7		4		6						
33	Kantor Camat Bandar			9				9				9		9
34	Dinas Kesehatan			6				6						
35	Kantor Camat Tulakan					3					3			3
36	Inspektorat		1	5		4		20					4	
37	Sekretariat DPRD		3	5		3		5						8
38	Bagian Humas dan Protokol Setda			9				9				8	1	8
39	Badan KBPP	3	3			48					2			
40	Bagian Administrasi Kesra Setda		9					9				7	2	
41	Kantor Lingkungan Hidup	4		10		6		8						
42	Kantor Ketahanan Pangan		12			12					12			12
43	Kantor Kecamatan Pringkuku		2	2		2		2			2	1	1	4
44	Kantor Kecamatan Sudimoro							6				8		6
45	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik			10		2		8			2	8		10
46	Bagian Organisasi Setda			9		1		8						
47	Bagian Umum Setda		6	1		4		3			4		2	
48	Bagian Hukum		1	10		3		8					1	1
Jumlah		86	181	827	90	549	18	396	9	0	55	81	13	180

#### d. Perangkat Lain

No	SKPD	Video Camera	Kamera Digital	IP/Network CCTV System	Finger Print Presensi	Layar Monitor/ TV	Generator
1	Kecamatan Kebonagung						
2	Bagian Kerjasama & Perbatasan		1			1	
3	Bagian Administrasi Pemerintahan Umum						
4	Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Kebersihan	3	5			2	
5	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil		1				7 KVA
6	Kantor Pendidikan dan Pelatihan		1				
7	Kantor Kecamatan Pacitan		4			1	5000 KVA
8	Dinas Pendidikan						
9	BPBD Kabupaten Pacitan	1	4			1	ada
10	Dinas Tanaman Pangan dan Peternakan		3				
11	Badan Penelitian, Pengembangan dan Statistik Kabupaten		1			1	
12	Bagian Administrasi SDA		2				
13	Badan Kepegawaian Daerah		4		1		
14	Kecamatan Donorojo		2			2	
15	Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	1	2			1	
16	Kantor Kec. Tegalombo		1				
17	Kecamatan Punung					1	1
18	DPPKA		6				
19	RSUD Pacitan						
20	Bappeda						
21	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda Dan Olahraga	2	2			1	
22	BPM-PP		1			1	
23	Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi		2			4	
24	Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan						
25	Dinas Pertambangan dan Energi						
26	Dinas Kehutanan dan Perkebunan						
27	Kecamatan Nawangan		5				
28	Dinas Kelautan dan Perikanan		1				
29	Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa						
30	Satuan Polisi Pamong Praja	2	1				
31	Kecamatan Ngadirojo						
32	Kantor Perpustakaan, Arsip & Dokumentasi						
33	Kantor Camat Bandar					1	1
34	Dinas Kesehatan		1				
35	Kantor Camat Tulakan		1		2		
36	Inspektorat		3				
37	Sekretariat DPRD	1	5			6	
38	Bagian Humas dan Protokol Setda	2	4				
39	Badan KBPP						
40	Bagian Administrasi Kesra Setda		2			1	
41	Kantor Lingkungan Hidup	2	3				1
42	Kantor Ketahanan Pangan		3				
43	Kantor Kecamatan Pringkuku		2			1	
44	Kantor Kecamatan Sudimoro						
45	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik						
46	Bagian Organisasi Setda						
47	Bagian Umum Setda						
48	Bagian Hukum						

### e. Sumber Daya Manusia

No	SKPD	Sumber Daya Manusia	Pendidikan					Basis Disiplin		
		Jumlah	SD/SMP	SMA	D1/ D2/ D3	S1	S2	D3	S1	S2
1	Kecamatan Kebonagung	38	2	6		7	3			
2	Bagian Kerjasama A Pembatasan	6				5	1			
3	Bagian Administrasi Pemerintahan Umum	12				12				
4	Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Kebersihan	124		51	4	16	6	1		
5	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	29		12	3	9	5	1	2	
6	Kantor Pendidikan dan Pelatihan	12		7	1	2	2			
7	Kantor Kecamatan Pacitan	37		19		16	2			
8	Dinas Pendidikan	96		33	6	39	17			
9	BPPD Kabupaten Pacitan	24		6	1	14	3			
10	Dinas Tanaman Pangan dan Peternakan	119		35	13	62	9	1		
11	Badan Penelitian, Pengembangan dan Statistik Kabupaten	28		5	1	14	3			
12	Bagian Administrasi SDA	5				2	2			
13	Badan Kepegangan Daerah	40		16	4	14	6	2	2	2
14	Kecamatan Doromaji	19		6	2	10	1			
15	Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	55	2	31	5	13	2	1		
16	Kantor Kec. Tegalombo	17	4			13				
17	Kecamatan Purung	19		7		11	1			
18	DPPKA	64			5	42	17	1	1	
19	RSUD Pacitan									
20	Bappeda	47		2	4	31	10	1		
21	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda Dan Olahraga	66		26	2	17	14			
22	BPM-PP	30		13	2	12	3	1	1	
23	Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi	46		17		21	4			
24	Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan	46		18	1	23	4			
25	Dinas Pertambangan dan Energi	33	1	10	3	16	3	1		
26	Dinas Kehutanan dan Perkebunan	103	3	28	2	54	16		1	
27	Kecamatan Nawangan	16		4		8	4			
28	Dinas Kelautan dan Perikanan	48		11	4	19	4			
29	Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa	36	1	11		16	8			
30	Satuan Polisi Pamong Praja	55		27		15	3			
31	Kecamatan Ngadirojo	17		6	1	8	2			
32	Kantor Perpustakaan, Arsip & Dokumentasi	20		11	3	6				
33	Kantor Camat Bandar	15		2	1	8	4			
34	Dinas Kesehatan									
35	Kantor Camat Tulakan	21		5		16				
36	Inspekturat	36		8	1	19	8	1		
37	Sekretariat DPRD	37		21	1	7	7			
38	Bagian Humas dan Protokol Setda	16		5	1	8	2			
39	Badan KBPP	76		23	5	38	9		1	
40	Bagian Administrasi Kesra Setda	10		3	6	1				
41	Kantor Lingkungan Hidup	19		7	4	5	3			
42	Kantor Ketahanan Pangan	25		6	2	13	1			
43	Kantor Kecamatan Pringsu	4		1		3			1	
44	Kantor Kecamatan Sudiro	20		12	1	6	1			
45	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	25		10	3	8	4	1		
46	Bagian Organisasi Setda	9		2	1	6		1		
47	Bagian Umum Setda	10		7	7	3				
48	Bagian Hukum	5		1		6	2			

## f. Kompetensi Sumber Daya Manusia

No	SKPD	Penguasaan Komputer					Kualifikasi Keahlian Khusus			Kualifikasi Bidang Pemrograman			Pegawai untuk mengelola Komputer & Jaringan		
		Linux	Windows	Internet	Office	Access	Linux Server	Maintenance Komputer	Jaringan	Pemrograman Web	Pemrograman Desktop	Lain2	Ada	Tidak Ada	Outsourcing
1	Kecamatan Kebonsung	1	11	3	3			1	1	1		1			
2	Sagian Kerjasama & Perbatasan		3	2	2								V		
3	Saiaian Administrasi Pemerintahan Umum		10	10	10								V		
4	Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Kebersihan		124	11	124	1		3				2			
5	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil								3	1		1			
6	Kantor Pendidikan dan Pelatihan		9		2				4				V		
7	Kantor Kecamatan Pacitan	31	31	31			1	1							
8	Dinas Pendidikan	3	75	84	84	9	2	6	2	1			V		
9	BPBD Kabupaten Pacitan		24	24	15							3			
10	Dinas Tanaman Pangan dan Peternakan		99	75	99	1									
11	Badan Penelitian, Pengembangan dan Statistik Kabupaten		24	24	15							3			
12	Bagian Administrasi SDA		3		3	3							V		
13	Badan Kepegawaian Daerah	1	39	30	39	8	1	4	5	2		2			
14	Kecamatan Donorojo			16	7							2		1	
15	Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	1	40	25	15	1	1	2	2	1		2			
16	Kantor Kec. Tegalombo		12	8	4										
17	Kecamatan Punung		10		5										
18	OPPKA	5	98	98	60	15	4	5	5	2	2	3			
19	RSUD Pacitan														
20	Bappeda		45	45	45			1		1			V		
21	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda Dan Olahraga		2	2	2								V		
22	BPM-PP		17	17	20	31		2	2	2	2	2			
23	Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi		19	28	28								V		
24	Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan		38	19	18					4					
25	Dinas Pertambangan dan Energi		30	30	30			2	2				V		
28	Dinas Kehutanan dan Perkebunan														
27	Kecamatan Nawangan		10	10	10	2		2				1			
28	Dinas Kelautan dan Perikanan												V		
29	Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa		29										V		
30	Satuan Polisi Pamong Praja			34	34								V		

No	SKPD	Penguasaan Komputer					Kualifikasi Keahlian Khusus			Kualifikasi Bidang Pamrograman			Pegawai untuk mengelola Komputer & Jaringan		
		Linux	Windows	Internet	Office	Access	Linux Server	Maintenance Komputer	Jaringan	Pemrograman Web	Pemrograman Desktop	Lain2	Ada	Tidak Ada	Outsourcing
31	Kecamatan Ngosrojo		4	4	4									V	
32	Kantor Perpustakaan, Arsip & Dokumentasi		7	7	7										
33	Kantor Camat Bandar		11	8	7										
34	Dinas Kesehatan														
35	Kantor Camat Tulakan		3	3	1	1				1	1				
36	Inspektorat		1	30	20	1	1	1						V	
37	Sekretariat DPRD		37	1	3	37									
3a	Bagian Humas dan Protokol Setda		16	16	16									V	
39	Badan KBPP		1	1	47										
40	Bagian Administrasi Kesra Setda			8	2										
41	Kantor Lingkungan Hidup		19	19	19									V	
42	Kantor Ketahanan Pangan		20	20	20									V	
43	Kantor Kecamatan Pringku		4	4	4	4		2						V	
44	Kantor Kecamatan Sudimoro		5	5	5									V	
45	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik		25	25	25			1	1			1		V	
46	Bagian Organisasi Setda		9	9	9									V	
47	Bagian Umum Setda		3		1										
48	Bagian Hukum														
	Jumlah	42	967	786	864	114	9	92	27	12	9	3	23		

**BUPATI PACITAN**

**Cap.ttd**

**INDARTATO**

No	SKPD	Panguasaan Komputer					Kualifikasi Keahlian Khusus			Kualifikasi Bidang Pemrograman			Pagawai untuk mengelola Komputer & Jaringan		
		Linux	Windows	Internet	Office	Access	Linux Server	Maintenance Komputer	Jaringan	Pemrograman Web	Pemrograman Desktop	Lain2	Ada	Tidak Ada	Outsourcing
31	Kecamatan Ngadirojo		4	4	4									V	
32	Kantor Perpustakaan, Arsip & Dokumentasi		7	7	7										
33	Kantor Camat Bandar		11	8	7										
34	Dinas Kesehatan														
35	Kantor Camat Tulakan		3	3	1	1				1	1				
36	Inspektorat		1	30	20	1	1	1						V	
37	Sekretariat DPRD		37	1	3	37									
38	Bagian Humas dan Protokol Setda		16	16	16									V	
39	Badan KBPP		1	1	47										
40	Bagian Administrasi Kesra Setda			8	2										
41	Kantor Lingkungan Hidup		19	19	19									V	
42	Kantor Ketahanan Pangan		20	20	20									V	
43	Kantor Kecamatan Pringkuku		4	4	4	4		2						V	
44	Kantor Kecamatan Sudimoro		5	5	5									V	
45	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik		25	25	25			1	1			1			
46	Bagian Organisasi Setda		9	9	9									V	
47	Bagian Umum Setda		3		1										
43	Bagian Hukum														
	Jumlah	42	967	786	864	114	9	32	27	12	9	3	23		

**BUPATI PACITAN**



**INDARTATO**